ANALISIS PELAKSANAAN PINJAMAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF PADA PENINGKATAN PENDAPATAN PEMINJAM PERSPEKTIF *MAṢLAḤAH*

(Studi pada Pinjaman UEP Desa Sendang di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Senori Kabupaten Tuban)

SKRIPSI

Oleh:

SITI NUR FARIKA

NIM: G94216203

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Siti Nur Farika

NIM : G94216203

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Pinjaman Usaha Ekonomi Produktif pada Peningkatan Pendapatan Peminjam Perspektif *Maṣlaḥah* (Studi Pada Pinjaman UEP Desa Sendang di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Senori Kabupaten Tuban)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01 Juli 2020

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
7732BAHF511645299
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Siti Nur Farika
NIM. G94216203

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Farika NIM. G94216203 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 01 Juli 2020

Pembimbing,

Abdul Hakim, M.EI
NIP. 197008042005011003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Farika NIM. G94216203 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 1 Juli 2020. Hasil skripsi dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Abdul Hakim, M.EI
NIP. 197008042005011003

Penguji II

Andriani Samsuri, S.Sos, MM
NIP.197608022009122002

Penguji III

Nurul Lathifah, S.A, M.A
NIP. 198905282018012001

Penguji IV

Hapsari Wiji Utami, M.SE
NIP.198603082019032012

Surabaya, 01 Juli 2020 Mengesahkan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM
NIP. 196212141993031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SITI NUR FARIKA
NIM : G94216203
Fakultas/Jurusan : FEBI/ Ekonomi Syariah
E-mail address : sitinurfarikaa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

Analisis Pelaksanaan Pinjaman Usaha Ekonomi Produktif pada Peningkatan Pendapatan Peminjam Perspektif *Mashlahah* (Studi pada Pinjaman UEP Desa Sendang di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Senori Kabupaten Tuban

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 Juli 2020

(Siti Nur Farika)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Pelaksanaan Pinjaman Usaha Ekonomi Produktif pada Peningkatan Pendapatan Peminjam Perspektif *Maṣlaḥah* (Studi pada Pinjaman UEP Desa Sendang di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Senori Kabupaten Tuban)". Skripsi ini ditulis dengan adanya latar belakang fenomena yang ada di Desa Sendang yangmana masyarakat miskin disana membutuhkan bantuan pinjaman untuk modal membuka ataupun mengembangkan usaha, namun banyak dari mereka yang mengeluhkan sulit untuk dapat akses pinjaman di bank dan koperasi. Pinjaman UEP disini hadir sebagai salahsatu jalan untuk menuntaskan masalah permodalan yang dialami oleh masyarakat miskin di Desa Sendang. Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian kualitatif studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis rumusan masalah atau pertanyaan mengenai bagaimana pelaksanaan pinjaman usaha ekonomi produktif pada peningkatan pendapatan peminjam di Desa Sendang dan bagaimana pinjaman usaha ekonomi produktif di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Senori dalam perspektif *maṣlaḥah*. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode pengamatan atau observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan yang terdiri dari pengurus UPK Kecamatan Senori, Kepala Desa Sendang, dan anggota peminjam dana usaha ekonomi produktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa UPK memiliki pedoman tersendiri terkait persyaratan, cara analisis, dan teknik mengatasi kredit macet yang tercantum dalam SOP tentang pelaksaan pinjaman Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Pelaksanaan pinjaman UEP mampu meningkatkan pendapatan peminjamnya selama dana tersebut digunakan untuk kebutuhan produkif pengembangan usaha. Beberapa peminjam yang tidak mengalami peningkatan pendapatan disebabkan karena dana pinjaman UEP disalahgunakan untuk kebutuhan konsumtif dan kurangnya manajemen dalam usaha mereka. Pinjaman UEP juga memberikan sebuah kemaslahatan bagi para peminjam yangmana dari adanya pinjaman tersebut dapat membawa kepada kesejahteraan ekonomi, serta keberadaan pinjaman usaha ekonomi produktif tergolong pada *maṣlaḥah hajiyyah*.

Saran yang dapat penulis sampaikan terkait skripsi ini adalah bagi pengurus UPK sebaiknya lebih detail dalam menentukan siapa saja yang layak untuk mendapat pinjaman UEP dengan pertimbangan adanya kasus penyalahgunaan pemanfaatan dana untuk kebutuhan konsumtif, bagi peminjam UEP sebaiknya mempergunakan dana pinjaman UEP benar-benar untuk kebutuhan produktif dan lebih terbuka terkait kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha.

Kata kunci: Pinjaman usaha ekonomi produktif, peningkatan pendapatan, *maṣlaḥah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN.....ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....iii
LEMBAR PENGESAHAN.....iv
PERNYATAAN PUBLIKASI.....v
ABSTRAK..... vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR..... xii
TRANSLITERASI.....xiii
BAB I PENDAHULUAN..... 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah..... 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka..... 8
E. Tujuan Penelitian 15
F. Kegunaan Hasil Penelitian 15
G. Definisi Operasional..... 16
H. Metode Penelitian..... 19
I. Sistematika Pembahasan 28
BAB II KERANGKA TEORITIS 30
A. Tinjauan Tentang Pinjaman 30
B. Peningkatan Pendapatan..... 41
C. Tinjauan Tentang *Maṣlaḥah*..... 48
D. Kerangka Konseptual 58
BAB III BAB III PELAKSANAAN PINJAMAN UEP PADA PENINGKATAN PENDAPATAN PERSPEKTIF *MAṢLAḤAH*..... 60
A. Gambaran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Senori..... 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Gambaran Umum Desa Sendang 75
C. Pelaksanaan Pinjaman Usaha Ekonomi Produktif pada Peningkatan Pendapatan Peminjam Perspektif *Maṣlaḥah*..... 78
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PINJAMAN UEP PADA PENINGKATAN PENDAPATAN PERSPEKTIF *MAṢLAḤAH*..... 109
A. Analisis Pelaksanaan Pinjaman Usaha Ekonomi Produktif pada Peningkatan Pendapatan Peminjam 109
B. Pinjaman Usaha Ekonomi Produktif Perspektif *Maṣlaḥah*..... 119
BAB V PENUTUP 127
A. Kesimpulan 127
B. Saran..... 128
DAFTAR PUSTAKA..... 129
LAMPIRAN 132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu.....11

Tabel 3.1 Kepengurusan BKAD.....64

Tabel 3.2 Kepengurusan BP-UPK.....64

Tabel 3.3 Kepengurusan Tim Verifikasi.....64

Tabel 3.4 Kepengurusan Tim Pendanaan.....65

Tabel 3.5 Kepengurusan UPK.....65

Tabel 3.6 Jumlah Kelompok yang Terdaftar di UPK Kecamatan Senori.....74

Tabel 3.7 Rincian Luas Wilayah Desa Sendang.....76

Tabel 3.8 Jumlah Penduduk Desa Sendang.....76

Tabel 3.9 Pekerjaan Masyarakat Desa Sendang.....77

Tabel 3.10 Tingkat Pendidikan di Desa Sendang.....77

Tabel 3.11 Kelompok Peminjam UEP Desa Sendang di UPK Kecamatan Senori Tahun 2019.....77

Tabel 4.1 Perbedaan Pendapatan Sebelum dan Sesudah Melakukan Pinjaman UEP.....114

T.abel 4.2 Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan, Kondisi Tempat Tinggal, dan Fasilitas Tempat Tinggal Peminjam.....123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Triangulasi Metode.....25
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....58
Gambar 3.1 Gedung UPK Kecamatan Senori.....60
Gambar 3.2 Kantor Desa Sendang.....75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena kemiskinan dewasa ini sudah menjadi permasalahan pada setiap negara, baik di negara berkembang maupun di negara maju. Menurut Lincolin Arsyad, kemiskinan merupakan suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelesaikan masalah hidupnya sampai pada suatu taraf yang dianggap manusiawi[1]. Negara Indonesia, tak luput juga dari fenomena kemiskinan tersebut. Banyak upaya yang dilakukan demi menuntaskan masalah kemiskinan tersebut.

Sehubungan dengan upaya peningkatan penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah menciptakan sebuah upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan pertisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek lagi, melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan tersebut[2]. Dalam hal ini pemerintah perlu memperhatikan dan peduli terhadap warga desa yang notabenenya memiliki usaha kecil/ mulai merintis usaha, terkait bagaimana upaya untuk bisa mengembangkan usaha mereka demi pemenuhan kebutuhan hidupnya.

---

[1] Pahruroji, "Analisis Efektivitas Pinjaman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan terhadap Peningkatan Pendapatan Peminjam di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pinjaman PNPM Mandiri Pedesaan Desa Sinar Saudara Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus)" (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intanlampung, 2016), 5.

[2] Hakimah, "Praktik Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada PNPM MP di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik (Studi Analisis Peraturan PNPM MP dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bentuk upaya pemerintah dalam memberdayakan masyarakat miskin telah tercermin dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP). PNPM MP adalah kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat pedesaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. PNPM MP menyediakan dana langsung dari pusat (APBN) dan daerah (APBD) yang disalurkan melalui rekening kolektif desa di kecamatan (Unit Pengelola Kegiatan). Masyarakat desa dapat mempergunakan dana tersebut sebagai hibah pembangunan sarana dan prasarana penunjang produktivitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi/ individu untuk modal usaha, atau untuk kegiatan sosial lainnya seperti kesehatan dan pendidikan[3].

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM MP di tingkat kecamatan dan membantu Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)[4]. UPK menganut azas kekeluargaan dan berorientasi pada prinsip tolong menolong yang mana bertanggungjawab sebagai agen pemerintah dalam melakukan upaya peningkatan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di pedesaan. Oleh karena itu, UPK harus mampu meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan, dalam hal ini UPK diharapkan untuk terus membuat terobosan baru guna tetap bisa menjadi pilihan utama para pemanfaat yang selama ini telah setia mengambil manfaat dari dana bergulir yang

[3] Atina Nuzulia, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Pedesaan (Studi Kasus di UPK Amanah Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang)" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), 3.

[4] Rohmadani Sholikin, "Tinjauan Yuridis Unit Pengelola Kegiatan sebagai Agen Pemerintah dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Susukan)" (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disediakan oleh UPK. Dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan yang dirumuskan oleh pemerintah, UPK diamanati sebuah tugas pokok, yaitu sebagai berikut[5]:

1. Melakukan dan mengawasi pengelolaan kegiatan PNPM MP;
2. Melaksanakan kegiatan pelestarian dana simpan pinjam kelompok/ individu (dana bergulir);
3. Membantu memfasilitasi permasalahan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan program PNPM MP yang ada di desa;
4. Melakukan administrasi dan pelaporan kegiatan.

UPK melayani sektor mikro, sehingga lembaga ini mampu melayani kebutuhan keuangan masyarakat ekonomi bawah/ miskin yang sulit mengakses pembiayaan ke perbankan[6]. Bentuk program dana bergulir yang dijalankan oleh UPK adalah Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). SPP adalah kegiatan pemberian modal untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam di UPK terkait. Sedangkan UEP adalah program pinjaman yang kegiatannya di bidang ekonomi untuk kegiatan usaha ekonomi produktif dan untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja dan ketahanan pangan masyarakat berbasis sumberdaya lokal.

Pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman UEP ini bukan untuk membuat masyarakat menjadi semakin bergantung pada program tersebut, karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri. Dengan demikian maka tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan,

---

[5] Munjiati Munawaroh dan Hasnah Rimiyati, "Evaluasi Perkembangan Usaha Masyarakat Penerima Pinjaman Dana Bergulir Melalui UPK-SPP, di Wilayah Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul", *Jurnal Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Vol 9, No 1, (Maret, 2018), 106.

[6] Amin Syarifudin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Perjanjian pada Pemberian Dana Kredit Usaha Ekonomi Produktif (Studi Kasus pada Unit Pengelola Kegiatan PNPM Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen)" (Manuskrip--Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan membangun kekuatan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik dan berkesinambungan. Salah satu tujuan utamanya adalah meningkatkan pendapatan peminjamnya. Pendapatan diartikan sebagai hasil dari sebuah pekerjaan, produktivitas serta kemampuan dan keterampilan dari kegiatan yang dijalani atau bisa dikenal dengan penghasilan[7].

Desa Sendang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, yang mana sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, buruh dan pedagang. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sejatinya masyarakat di Kecamatan Senori memerlukan modal untuk merintis ataupun mengembangkan usahanya. Karena, hasil panen petani disana tidak begitu menjanjikan, selain itu musim panen pertama dan kedua terpaut waktu yang cukup lama. Jadi jika para petani tersebut hanya mengandalkan hasil panennya, mereka akan kelimpungan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Untuk itu, banyak masyarakat yang merintis usaha untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Namun, untuk bisa memulai ataupun mengembangkan usahanya, mereka mendapati kendala utama dalam hal permodalan.

Keberadaan lembaga keuangan tentunya memberikan berpengaruh terhadap keberlangsungan kegiatan perekonomian masyarakat tersebut. Eksistensi lembaga keuangan baik bank maupun non-bank akan membantu mereka yang mengalami masalah dalam hal pemenuhan kebutuhan ataupun permodalan usaha. Namun, fenomena yang terjadi di Desa Sendang adalah, masyarakat miskin sulit untuk mendapat akses pinjaman yang dikarenakan oleh jenis usaha yang akan atau sedang dijalankan tidak begitu menjanjikan tingkat keuntungannya. Ibu Musringah, salah

[7] Munawir. S, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu masyarakat miskin (anggota peminjam UEP) yang mengeluhkan bahwa pengajuan pinjamannya ke bank ditolak karena usaha yang dijalankan tidak menjanjikan keuntungannya. Sehingga beliau memilih melakukan pinjaman UEP di UPK Kecamatan Senori.

Disini UPK memiliki peran penting dalam membantu masyarakat miskin melakukan pinjaman modal usaha melalui pinjaman UEP. Akan tetapi terdapat beberapa anggota peminjam yang melakukan penyalahgunaan atas pemanfaatan dana pinjaman UEP tersebut selain itu juga terjadi penyelewengan oleh ketua kelompoknya, dimana ketika anggota sudah membayar kewajiaban bayarnya namun uang tersebut digunakan secara pribadi oleh ketua kelompok.

Menurut Asy-Syatibi, *maṣlaḥah* adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Manfaat adalah ungkapan dari keseluruhan kenikmatan yang diperoleh dari usaha yang telah dilakukan dan segala hal yang masih berhubungan dengan manfaat tersebut, sedangkan kerusakan adalah keseluruhan akibat yang merugikan dan menyakitkan atau segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kerusakan tersebut. Al-Thufi mengemukakan dalil dari al-Qur'an yang menunjukkan *al-syar'i* sangat menekankan pentingnya memelihara kemaslahatan manusia.

يَأَ يُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ. قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُوْنَ.

Artinya: *"Hai manusia sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran (al-wa'z) dari Tuhanmu dan penyembuh bagi (penyakit yang berada) di dalam dada,dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah: Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan rahmat-Nya itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (Q.S. Yunus: 57-58)

Dari ayat diatas dimaksudkan betapa maslahat sangat dipentingkan, yaitu menekankan pentingnya pelajaran (*al-wa'z*) bagi manusia, dimana dengan *al-wa'z* tersebut Allah mencegah manusia dari kebinasaan dan mengarahkan kepada jalan yang benar. Kemudian Allah memberikan predikat al-Qur'an sebagai "*penyembuh bagi penyakit yang di dada"*, *al-huda* dan *al-rohmah* yangmana predikat tersebut merupakan kemaslahatan yang besar bagi manusia. Kemudian Allah memerintahkan manusia agar bergembira. Kegembiraan tersebut karena adanya kemaslahatan yang besar[8].

Jika dilihat dalam lingkup ekonomi, *maṣlaḥah* sangat diperlukan karena tidak banyak *nas* yang membahasnya. Prinsip *maṣlaḥah* menjadi acuan dan patokan penting dalam bidang ekonomi, terlebih jika menyangkut kebijakan-kebijakan ekonomi yang minim akan aturan syara' yang mana terjadi kekosongan aturan hukumnya. Implementasi dari *maṣlaḥah* dalam lingkup ekonomi dapat dilihat dari aspek mekanisme pasar, pembentukan lembaga *hisbah*, zakat produktif, dan adanya lembaga keuangan syariah[9].

Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana pelaksanaan pinjaman Usaha Ekonomi Produktif di Unit Pengelola Kegiatan dalam meningkatkan pendapatan peminjamn, yangmana tujuan dari UPK sendiri adalah untuk memberdayakan dan memberikan modal untuk menumbuhkembangkan usaha masyarakat dalam membenahi keadaan ekonominya

---

[8] Ahmad Qorib, "Penerapan *Maṣlaḥah Mursalah* dalam Ekonomi Islam", *Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 1 (2016), 65.

[9] Rizal Fahlefi, "Implementasi *Maṣlaḥah* dalam Kegiatan Ekonomi Syariah", *Juris*, Vol. 14, No. 2 (2015), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga diharapkan dapat menciptakan sebuah kemaslahatan. Maka judul yang penulis gunakan adalah "Analisis Pelaksanaan Pinjaman Usaha Ekonomi Produktif pada Peningkatan Pendapatan Peminjam Perspektif *Maṣlaḥah* (Studi pada Pinjaman UEP Desa Sendang di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Senori Kabupaten Tuban)".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diidentifikasi, diantaranya adalah:

1. Masyarakat Desa Sendang sulit untuk memulai ataupun mengembangkan usahanya karena seringkali mengalami masalah permodalan.
2. Masyarakat miskin Desa Sendang sulit mengakses pinjaman ke lembaga keuangan perbankan.
3. UPK Kecamatan Senori mampu memberikan pinjaman UEP tanpa adanya agunan, persyaratan yang lebih mudah, dan biaya jasa tidak tinggi.
4. Pelaksanaan pinjaman UEP memberikan sebuah kemaslahatan di sisi ekonomi bagi peminjamnya.
5. Peminjam tidak menggunakan dana pinjaman UEP untuk kebutuhan produktif/ modal usaha, namum malah digunakan untuk keperluan kebutuhan konsumtif.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijabarkan diatas, maka perlu adanya pembatasan masalah. Mengingat banyaknya permasalahan yang ada, peneliti membatasi penelitian ini pada masalah:

1. Pelaksanaan program pinjaman UEP Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Senori dalam meningkatkan pendapatan peminjam di Desa Sendang.
2. Adanya *maṣlaḥah* atas pelaksanaan pinjaman UEP di UPK Kecamatan Senori.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pinjaman Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Senori pada peningkatan pendapatan peminjam di Desa Sendang?
2. Bagaimana pinjaman Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Senori dalam perspektif *maṣlaḥah*?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang sudah ada[10]. Setelah menelusuri beberapa kajian terdahulu, penulis menemukan beberapa referensi kajian pustaka yang membahas mengenai:

Dalam jurnal yang berjudul "Evaluasi Perkembangan Usaha Masyarakat Penerima Pinjaman Dana Bergulir melalui UPK-SPP, di Wilayah Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta" oleh Munjiati Munawaroh[11]. Penelitian ini membahas tentang perkembangan usaha masyarakat penerima pinjaman bergulir. Setelah diketahui bagaimana perkembangan usahanya, digali juga faktor pendukung dan juga penghambat yang mempengaruhi perkembangan usaha peminjamnya. Dari hasil data dan analisis yang dilakukan maka akan diperoleh sebuah hasil dari pelaksanaan pinjaman tersebut bisa dikatakan sukses atau tidaknya. Terdapat

---

[10] Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel, "Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi" (Surabaya: FEBI UIN Sunan Ampel, 2017), 10.

[11] Munjiati Munawaroh, "Evaluasi Perkembangan Usaha Masyarakat Penerima Pinjaman Dana Bergulir melalui UPK-SPP, di Wilayah Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul Yogyakarta", *Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Vol 9, No 1 (Maret 2018), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persamaan objek penelitian, yaitu pada instansi UPK namun letak geografisnya berbeda. Sedangkan perbedaannya terletak pada adanya pengamatan yang dilakukan terkait perkembangan usaha peminjamnya. Hasil dari penelitian ini akan memberikan jawaban antara sukses dan tidaknya program pinjaman tersebut dalam membantu mengembangkan usaha peminjam, faktor yang mempengaruhi, dan perkembangan yang dialami termasuk dalam kategori cepat, tetap, atau lambat.

Dalam skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus di UPK Amanah Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang)" oleh Atina Nuzulia. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang praktek Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP), mulai dari bagaimana sistem SPP, alur melakukan pinjaman, persyaratan yang harus dipenuhi, dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan SPP PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Gringsing[12]. Terdapat persamaan objek penelitian, yaitu pada instansi UPK namun letak geografisnya berbeda. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis pinjaman dan analisis dalam segi Ekonomi Islamnya. Pada penelitian ini, transaksi pinjaman yang diteliti adalah SPP, sedangkan yang akan diteliti penulis adalah jenis pinjaman UEP. Hasil akhir dari penelitian ini akan memberikan jawaban *riba* atau tidaknya jenis pinjaman tersebut, pada penelitian yang akan penulis lakukan, akan terfokus pada pelaksanaan pinjaman UEP UEP yangmana dapat meningkatkan pendapatan peminjamnya dan memberikan sebuah *maṣlaḥah* dalam segi ekonomi bagi masyarakat miskin.

Dalam skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Tanpa Agunan di UPK PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat)

[12] Atina Nuzulia, Tinjauan Hukum Islam...,20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang" oleh Zaenal Abidin. Membahas tentang hutang piutang/ pinjaman tanpa adanya agunan, nyang meliputi mekanisme hutang piutang, sistem pengelolaan hutang piutang, dan analisis hukum Islam terhadap pinjaman tanpa aguanan di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Penggaron Lor Makmur[13]. Persamaan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya yaitu di UPK hanya berbeda letak geografisnya. Perbedaanya pada penelitian ini fokus pada sistem pinjaman tanpa agunan yang nantinya akan dianalisis berdasarkan tinjauan Hukum Islam dengan hasil pinjaman tersebut masuk dalam kategori *al-qard.* Sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan lebih fokus pada pelaksanaan pinjaman UEP yangmana dapat meningkatkan pendapatan peminjamnya dan memberikan sebuah *maṣlaḥah* bagi masyarakat miskin.

Hasil penelitian oleh Dina Nurdiana yang berjudul "Dampak Signifikansi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Tambahan Modal Dana UEP (Usaha Ekonomi Produktif) pada Peningkatan Keberdayaan Usaha Mikro Perempuan di Kecamatan Kota Sumenep" menjelaskan tentang keadaan usaha mikro, pengelolaan modal pinjaman UEP, dan tingkat keberdayaan usaha mikro[14]. Persamaan penelitian ini juga terletak pada objek penelitiannya. Sedangkan perbedaannya, jika pada penelitian ini membahas tentang keberdayaan peminjam secara umum, baik dari sisi ekonomi maupun sosial, selain itu juga tidak adanya analisis menggunakan perspektif *masalahah* ekonomi. Sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan fokus

[13] Zaenal Abidin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Tanpa Agunan di UPK PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015), 15.

[14] Dina Nurdiana, "Dampak Signifikansi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Tambahan Modal Dana UEP (Usaha Ekonomi Produktif) pada Peningkatan Keberdayaan Usaha Mikro Perempuan di Kecamatan Kota Sumenep", *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 4, No. 2, ISSN 2303-341X , (Mei-Agustus 2016), 293.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada pelaksanaan pinjaman UEP yangmana dapat meningkatkan pendapatan peminjamnya dan memberikan sebuah *maṣlaḥah* bagi masyarakat miskin di Desa Sendang.

Dalam skripsi yang berjudul "Analisis Efektivitas Pinjaman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Terhadap Peningkatan Pendapatan Peminjam di Tinjau Dari Persfektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pinjaman PNPM Mandiri Perdesaan Desa Sinar Saudara Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus)" oleh Pahruroji, membahas tentang tingkat keefektifan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam meningkatkan pendapatan peminjamnya. Bahasan didalamnya memuat bagaimana pelaksanaan pinjaman yang dilakuakan PNPM, menganalisa tingkat pendapatan peminjamnya, dan pandangan Islam terkait pinjaman tersebut[15]. Persamaan penelitian ada pada objek penelitian di UPK. Pada penelitian ini fokus pada pinjaman dalam lingkup kelompok yang kemudian dianalisis tingkat pendapatan per anggota kelompoknya dan keberadaan program PNPM tersebut dalam perspektif ekonomi Islam memberikan kemaslahatan atau sebaliknya. Namun dalam penelitian yang akan penulis lakukan lebih fokus pada analisa pelaksanaan pinjaman UEP UEP yangmana dapat meningkatkan pendapatan peminjamnya dan memberikan sebuah *maṣlaḥah* bagi masyarakat miskin.

Tabel 1.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Munjiati Munawaroh	Evaluasi Perkembangan Usaha Masyarakat Penerima Pinjaman	Usaha masyarakat penerima pinjaman dana bergulir UPK SPP mengalami	Dalam penelitian membahas tentang tingkat perkembangan usaha peminjam setelah adanya

[15] Pahruroji, Analisis Efektivitas...,21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
		Dana Bergulir melalui UPK-SPP, di Wilayah Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta (2018)	perkembangan. Faktor yang mendukung adanya perkembangan usaha masyarakat penerima pinjaman bergulir dari UPK-SPP adalah adanya program yang dibuat oleh pengurus UPK SPP dalam hal pemasaran, pelatihan dan pendampingan. Selanjutnya secara umum operasional pelaksanaan perguliran dan UPK-SPP tergolong sukses dengan mengacu pada tingkat pengembalian yang lancar. Namun demikian, apabila dilihat dari perkembangan usaha masyarakat penerima dana UPK SPP mayoritas lambat.	pinjaman dana bergulir SPP selain itu juga menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi perkembangan usaha peminjam, sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan, akan lebih menekankan pada analisa pelaksanaan pinjaman UEP UEP yangmana dapat meningkatkan pendapatan peminjamnya dan memberikan sebuah *maṣlaḥah* bagi masyarakat miskin.
2.	Atina Nuzulia	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus di UPK Amanah Kecamatan Gringsing	Adanya biaya tambahan sebesar 1% yang wajib dibayarkan setiap bulannya oleh peminjam kepada pihak UPK yang telah disepakati di awal, jika ditinjau berdasarkan ekonomi Islam termasuk dalam kategori *riba*. Namun, ada beberapa pendapat golongan yang memperbolehkan tambahan jenis tersebut karena di	Perbedaannya terletak pada jenis pinjaman dan analisis dalam segi Ekonomi Islamnya. Pada penelitian ini, transaksi pinjaman yang diteliti adalah SPP sedangkan, yang akan diteliti penulis adalah jenis pinjaman UEP. Hasil akhir dari penelitian ini akan memberikan jawaban *riba*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
		Kabupaten Batang (2019)	dalamnya terdapat suatu tujuan yang baik, yaitu untuk mengentaskan kemiskinan dan memberikan modal kepada rumah tangga miskin agarndapat memulai suatu usaha demi memnuhi kebutuhan hidupnya. Maka dalam hal ini terdapat unsur tolong menolong menuju kemaslahatan serta merupakan kebijakan pemerintah untuk rakyatnya agar meningkatkan perekonomian.	atau tidaknya jenis pinjaman tersebut, namun pada penelitian yang akan penulis lakukan, akan terfokus pada analisa pelaksanaan pinjaman UEP UEP yangmana dapat meningkatkan pendapatan peminjamnya dan memberikan sebuah *maṣlaḥah* bagi masyarakat miskin.
3.	Zaenal Abidin	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Tanpa Agunan di UPK PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang (2015)	secara umum praktek pinjaman tanpa agunan di PNPM dikategorikan dalam *Al-qardh* atau dengan kata lain disebut transaksi non profit. *Al-qardh* masuk dalam kategori akad *ta'awuni* yaitu akad tolong menolong, karena dalam PNPM dana yang disalurkan hanya diperuntukan bagi masyarakat miskin. Keberadaan PNPM memberikan *maṣlaḥah* bagi warga miskin seperti direalisasikan dalam kegiatan santunan warga panti jompo miskin dan membuat WC *septic tank* bagi masyarakat miskin.	Penelitian ini fokus pada sistem pinjaman tanpa agunan yang nantinya akan dianalisis berdasarkan tinjauan Hukum Islam dengan hasil pinjaman tersebut masuk dalam kategori *al-qard.* Sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan lebih fokus pada analisa pelaksanaan pinjaman UEP UEP yangmana dapat meningkatkan pendapatan peminjamnya dan memberikan sebuah *maṣlaḥah* bagi masyarakat miskin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
4.	Dina Nurdiana	Dampak Signifikansi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Tambahan Modal Dana UEP (Usaha Ekonomi Produktif) pada Peningkatan Keberdayaan Usaha Mikro Perempuan di Kecamatan Kota Sumenep (2016)	Tambahan modal yang diberikan pihak UPK Kecamatan Kota Sumenep kepada pelaku usaha mikro menunjukkan bahwa dana tersebut dapat membantu kegiatan usaha yang dijalankan oleh para ibu-ibu peminjam. Namun untuk mencapai tingkat keberdayaan usaha yang sbenarnya masih cukup jauh karena masih tingginya angka ketergantungan para pelaku usaha mikro terhadap tambahan pinjaman modal yang diberikan oleh UPK. hal itu terjadi karena pelaku usaha mikro kurang tepat dalam mengelola dana pinjaman tersebut.	Penelitian ini membahas tentang bagaimana dampak dari adanya tambahan modal dana UEP pada peningkatan keberdayaan usaha mikro perempuan yang kemudian dianalisis faktor yang mempengaruhi dari keberdayaan yang terjadi setelah adanya pinjaman tersebut. Sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan fokus pada analisa pelaksanaan pinjaman UEP UEP yangmana dapat meningkatkan pendapatan peminjamnya dan memberikan sebuah *maṣlaḥah* bagi masyarakat miskin.
5.	Pahruroji	Analisis Efektivitas Pinjaman Progrpam Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Terhadap Peningkatan Pendapatan Peminjam di Tinjau Dari Persfektif	program pinjaman yang dilakukan oleh PNPM MP Kecamatan Wonosobo sudah efektif dalam meningkatkan pendapatan anggota peminjamnya. Jika ditinjau dari sisi ekonomi Islam, program pinjaman tersebut sudah sesuai dengan syariah Islam karena terdapat unsur tolong menolong serta memberikan pinjaman dalam	Pada penelitian ini fokus pada pinjaman dalam lingkup kelompok yang kemudian dianalisis tingkat pendapatan per anggota kelompoknya dan keberadaan program PNPM tersebut dalam perspektif ekonomi Islam memberikan kemaslahatan atau sebaliknya. Namun dalam penelitian yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
		Ekonomi Islam (Studi Pada Pinjaman PNPM Mandiri Perdesaan Desa Sinar Saudara Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus) (2016)	hal kebaikan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.	akan penulis lakukan lebih fokus pada analisa pelaksanaan pinjaman UEP UEP yangmana dapat meningkatkan pendapatan peminjamnya dan memberikan sebuah *maṣlaḥah* bagi masyarakat miskin.

Sumber: Data diolah 2020

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan pinjaman Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Senori pada peningkatkan pendapatan peminjam di Desa Sendang.
2. Menjelaskan perspektif *maṣlaḥah* terhadap pinjaman Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Senori.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi kontibusi dalam hal mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah yang berkaitan dengan UPK dan menjadi bahan kajian bagi peneliti selanjutnya dan untuk mendalami konsep operasional UPK sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Keguanaan Praktis
   a. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan atau sumbangan pemikiran bagi pihak pengurus/pengelola UPK;
   b. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi UPK dalam menentukan kebijakan dalam melaksanakan program kegiatannya;
   c. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait pinjaman UEP dan mekanisme pelaksanaan serta alur pengajuan pinjamannya;
   d. Dapat berguna bagi penerapan suatu ilmu di lapangan atau di masyarakat.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan bagian yang mendefinisikan sebuah konsep/variabel agar dapat diukur, dengan cara melihat pada dimensi (indikator) dari suatu konsep/variabel[16]. Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini dan untuk meminimalisir sebuah kesalahpahaman, maka perlu adanya definisi operasional dari variabel penelitian yang berjudul "Analisis Pelaksanaan Pinjaman Usaha Ekonomi Produktif pada Peningkatan Pendapatan Peminjam Perspektif *Maṣlaḥah* (Studi pada Pinjaman UEP Desa Sendang di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Senori Kabupaten Tuban)" diantaranya:

1. Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

   Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM MP di kecamatan dan membantu Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dalam mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. UPK bertanggungjawab sebagai agen pemerintah dalam melakukan peningkatan

[16] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di pedesaan[17]. UPK merupakan unit pengelola dana bergulir dari pemerintah yang dialokasikan untuk memberikan jasa simpan pinjam kepada masyarakat sebagai wadah untuk mencapai tujuan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. Salah satu objek dalam penelitian ini adalah UPK, dimana akan digali informasi mengenai program UEP yang dijalankan demi membantu masalah permodalan masyarakat miskin.

2. Pinjaman

Pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan, yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu[18]. Sedangkan pinjaman dalam ruang lingkup pendanaan berarti sejumlah dana yang dipinjamkan oleh suatu lembaga keuangan dan debitur wajib mengembalikannya dalam suatu jangka waktu tertentu melalui angsuran pembayaran berupa pokok pinjaman ditambah dengan bunga pinjaman.

3. Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah program yang kegiatannya di bidang ekonomi untuk kegiatan usaha ekonomi produktif dan untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja dan ketahanan pangan masyarakat berbasis sumberdaya lokal. Tujuan dari program UEP sendiri adalah untuk mendorong masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya

[17] Rohmadani Sholikin, Tinjauan Yuridis...,3.
[18] Ardiyos, *Kamus Besar Akuntansi*, (Jakarta: Citra Harta Prima, 2004), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui usaha yang dikelolanya melalui suntikan dana pinjaman tersebut[19]. Pinjaman UEP bisa dilakukan baik secara individu ataupun melalui kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP). Dalam penelitian ini, program pinjaman UEP ini yang akan menjadi pokok pembahasan, pasalnya UEP ini memiliki nilai plus dikalangan masyarakat kecamatan Senori. Karena sistem pengembalian modalnya tidak memberatkan bagi mereka yang dalam kategori ekonomi rendah.

4. Peningkatan Pendapatan Peminjam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata peningkatan adalah proses, cara, perbuatan meningkatkan usaha atau kegiatan. Jadi, peningkatan adalah lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan, peningkatan berarti kemajuan, penamabahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Sedangkan pendapatan adalah hasil dari sebuah pekerjaan, produktivitas serta kemampuan dan keterampilan dari kegiatan yang dijalani atau bisa dikenal dengan penghasilan[20]. Maka peningkatan pendapatan peminjam dapat diartikan sebagai kemajuan atau bertambahnya hasil dari sebuah pekerjaan yang sedang dijalani oleh peminjam dana.

Seseorang dikatakan mengalami peningkatan pendapatan tentunya memiliki sebuah indikator yang harus dipenuhi. Indikator peningkatan pendapatan tersebut diantaranya adalah permodalan usaha, volume penjualan, jumlah produksi, jumlah tenaga kerja, tingkat pendidikan, perbaikan kualitas usaha, peningkatan laba dan omset. Pada penelitian ini, indikator yang digunakan

[19] Atina Nuzulia, Tinjauan Hukum...,4.
[20] Munawir. S, Analisis Laporan...,26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai acuan peningkatan pendapatan peminjam adalah ketika peminjam mengalami peningkatan laba dan atau omset.

5. *Maṣlaḥah*

Menurut Asy-Syatibi, *maṣlaḥah* adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Manfaat adalah ungkapan dari keseluruhan kenikmatan yang diperoleh dari usaha yang telah dilakukan dan segala hal yang masih berhubungan dengan manfaat tersebut, sedangkan kerusakan adalah keseluruhan akibat yang merugikan dan menyakitkan atau segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kerusakan tersebut. Penerapan *maṣlaḥah* dan mafsadah tidak ada yang murni, ukurannya ditentukan oleh kekuatan yang mendominasi dan banyaknya aktifitas yang dikerjakan. Jika *maṣlaḥah* lebih banyak dan kuat, maka disebut *maṣlaḥah*, sebaliknya jika mafsadahnya yang lebih banyak dan dominan, maka masuklah pada sesuatu yang mafsadah[21].

Pada penelitian ini, akan terfokus pada teori *maṣlaḥah* yang dikemukakan oleh Asy-Syatibi. Pelaksanaan pinjaman UEP di UPK Kecamatan Senori lebih mengarah pada kegiatan meringankan beban masyarakat miskin yang kemudian akan mengarah pada sebuah kemaslahatan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Selain itu, metode penelitian juga bisa diartikan sebagai suatu cara yang ditempuh guna mencari, menggali, mengolah dan membahas data-data

[21] Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul asy-Syar'iyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

guna memperoleh suatu jawaban tentang apa yang ditanyakan dalam rumusan permasalahan[22].

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Penelitian kualitatif menurut Sulistyo dan Basuki ialah penelitian yang berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, kepercayaan orang yang akan diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. Dalam penelitian kualitatif, teori yang digunakan tidak dipaksakan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang telah diteliti. Sedangkan pendekatan deskriptif kualitatif adalah metode pengolahan data dengan cara menganalisa faktor-faktor yang berkaitan dengan objek penelitian dengan penyajian data secara lebih mendalam terhadap objek penelitian[23]. Penelitian studi kasus ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu studi kasus yang mana dilakukan analisis secara tajam terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus tersebut sehingga akhirnya akan diperoleh kesimpulan yang akurat. Hasil dari penelitian ini hanya berlaku pada kasus yang diselidiki[24].

1. Lokasi Penelitian

   Lokasi penelitian dilakukan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.

2. Teknik Pengumpulan Data

   Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan atau suatu proses pengadaan data primer

---

[22] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),1.
[23] Aan Probowo, Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik, *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, Vol. 4 No. 2, (2013), 5.
[24] Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik kondisi yang alami, sumber data primer, dan lebih banyak pada teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi[25]. Adapun teknik pengumpulan data yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut:

a. Pengamatan atau Observasi

Metode pengamatan atau observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Metode observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku subjek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu[26]. Kegiatan yang akan diamati dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pinjaman UEP di UPK Kecamatan Senori pada peningkatan pendapatan masyarakat miskin (peminjam). Skema penelitian ini bermula pada proses peminjaman antara UPK dengan peminjam, setelah itu dana yang telah diterima oleh peminjam dikelola sesuai dengan perjanjian atau terjadi penyalahgunaan. Selanjutnya dari dana tersebut apakah memberikan perubahan terkait pendapatan peminjamnya atau sebaliknya.

[25] M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 164.

[26] Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, dan bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara)[27]. Adapun objek wawancara dalam penelitian ini adalah Petugas UPK Kecamatan Senori, Kepala Desa Sendang, dan anggota peminjam (pemanfaat pinjaman UEP).

Wawancara dengan Petugas UPK Kecamatan Senori akan mengorek informasi tentang bagaimana pelaksanaan pinjaman UEP mulai dari proses pengajuan hingga pengembalian dana. Sedangkan wawancara dengan Kepala Desa Sendang untuk mengetahui keadaan warga Desa Sendang tersebut terkait keadaan perekonomian dan peran pinjaman UEP dalam membantu meningkatkan pendapatan warganya.

Wawancara dengan anggota/ peminjam dana UEP untuk mengetahui alasan mengapa melakukan pinjaman UEP, kegiatan usaha yang dijalankan, tingkat pendapatan, dan persepsi tentang pelaksanaan pinjaman UEP. Diperlukan beberapa informan yang sekiranya dapat memberikan informasi terkait skripsi penulis. Dari informan kunci tersebut nantinya akan dapat memberikan informasi lanjutan tentang siapa saja yang nantinya layak untuk diwawancarai. Kriteria pemilihan informan disini berdasarkan jumlah pinjaman, lama bergabung dengan kelompok, dan jenis usaha yang dijalankan oleh peminjam.

[27] Ibid; 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berasal dari dokumen, website, foto, dan data lain yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu UPK, dengan tujuan untuk memperoleh data yang menunjang kelengkapan dalam penelitian ini.

3. Sumber Data

Data adalah suatu hasil dari penelitian berupa fakta atau keterangan yang dapat dijadikan bahan untuk mendapatkan suatu informasi yang memiliki peran penting dalam suatu penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut dapat diperoleh dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan[28]. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan Pengurus UPK Kecamatan Senori, Kepala Desa Sendang, dan anggota peminjam (pemanfaat pinjaman UEP).

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar penelitian itu sendiri[29]. Bahan-bahan dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah website UPK Kecamatan Senori,

[28] Papundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.
[29] Ibid; 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data terkait peminjam UEP Desa Sendang, data SOP UPK Kecamatan Senori, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul dari hasil pengumpulan dokumen maupun hasil pustaka, maka dilakukan pengolahan data dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan hal-hal (data) lain untuk pengecekan atau perbandingan data. Dalam penelitian kualitatif dikenal empat jenis teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi peneliti, triangulasi metode, dan triangulasi teori.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi metode. Terdapat dua strategi yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan dengan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Artinya peneliti tidak hanya menggunakan wawancara saja dalam melakukan penelitian, akan tetapi peneliti juga melakukan observasi dan dokumentasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak serta-merta langsung mempercayai data hasil wawancara saja, sehingga untuk melengkapinya peneliti juga menggunakan hasil observasi dan dokumentasi yang nantinya akan dicocokkan dengan data hasil wawancara[30].

Hasil wawancara dengan Ketua UPK terkait pelaksanaan pinjaman akan dicocokkan dengan data SOP dan teori manajemen pinjaman yangmana data hasil dari pencocokkan tersebut yang akan dijadikan sebagai acuan apakah pelaksanaan pinjaman UEP sudah mengimplementasikan pengelolaan pinjaman

[30]Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 330.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau belum. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sendang terkait proposal pengajuan pinjaman, sosialisasi, dan monitoring monitoring akan dibandingkan dengan praktek yang dilakukan oleh UPK terhadap kegiatan tersebut bagaimana mekanismenya. Hasil wawancara dengan peminjam dana UEP terkait peningkatan pendapatan akan dicocokkan dengan kondisi ekonomi seperti komoditi yang dijual, kondisi rumah, dan tingkat pendidikan anak.

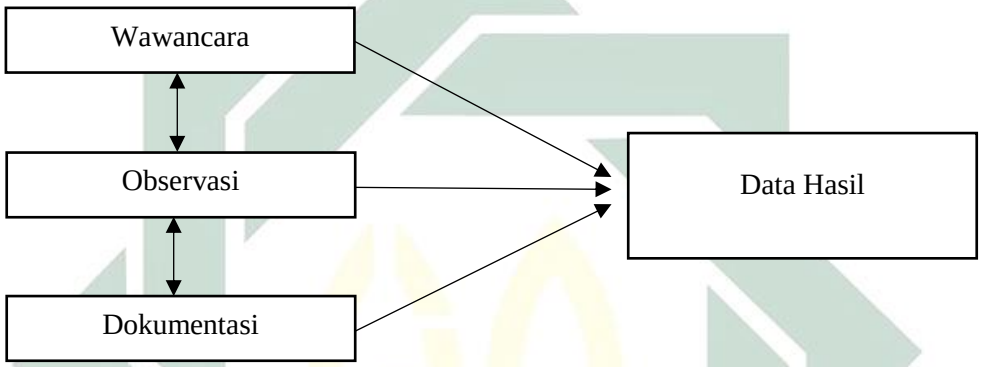

Gambar 1.1 Triangulasi Metode
Sumber: Data diolah 2020

5. Teknik Analisis Data

Setelah diperoleh data dan informasi yang dirasa cukup, maka dilakukan tahap analisis data dengan tujuan menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, mengacu pada analisis kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena yang menggambarkan kondisi objektif dari objek penelitian yang kemudian akan diuraikan dalam bentuk kalimat berdasarkan data primer atau sekunder[31].

[31] Hari Wijaya, *Teknik Penulisan Skripsi dan Thesis*, (Yogyakarta: Hangar Creator, 2008), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses analisis data yang dilakukan peneliti yaitu dengan langkah-langkah berikut, yaitu:

a. Reduksi data, yang berarti merangkum, memilih, memfokuskan pada hal-hal pokok. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi seperti gambaran umum UPK, gambaran umum Desa Sendang, dan pelaksanaan pinjaman UEP pada peningkatan pendapatan peminjam perspektif *maṣlaḥah* selanjutnya akan di reduksi.

   Data gambaran umum UPK akan direduksi terkait sejarah berdirinya, struktur kepengurusan, program yang dijalankan, pelaksanaan pinjaman UEP di UPK, dan *list* desa yang terdaftar pada UPK. Gambaran umum Desa Sendang akan di reduksi terkait letak dan kondisi geografisnya dan daftar kelompok peminjam UEP Desa Sendang di UPK. Data wawancara tentang pelaksanaan pinjaman UEP pada peningkatan pendapatan peminjam perspektif *maṣlaḥah* akan direduksi terkait mata pencaharian dan keadaan ekonomi masyarakat Desa Sendang, pengajuan proposal pinjaman, adanya sosialisasi dan monitoring, persyaratan pinjaman, penggunaan dana, tingkat pendapatan peminjam sebelum dan sesudah mendapat pinjaman UEP, dan kemaslahatan dari adanya pinjaman UEP. Dengan demikian, data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas terkait penelitian dan akan mempermudah peneliti pada proses pengolahan data selanjutnya.

b. Setelah data selesai direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan dalam memahami apa yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebenarnya terjadi, merencanakan tahap selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami[32].

Data hasil reduksi dari sejarah berdirinya UPK disajikan dalam bentuk narasi singkat, struktur kepengurusan disajikan dalam tabel dan narasi singkat, program yang dijalankan UPK disajikan dalam bentuk narasi, pelaksanaan pinjaman UEP di UPK disajikan dalam narasi yang membentuk urutan yang saling tekait, dan *list* desa yang terdaftar pada UPK disajikan dalam bentuk tabel.

Data hasil reduksi dari letak dan kondisi geografis Desa Sendang disajikan dalam bentuk uraian singkat dan beberapa tabel yang memuat informasi tentang luas desa, jumlah penduduk, mata pencaharian, dan tingkat pendidikan. Daftar kelompok peminjam UEP Desa Sendang di UPK disajikan dalam bentuk tabel.

Data hasil reduksi dari mata pencaharian dan keadaan ekonomi masyarakat Desa Sendang, pengajuan proposal pinjaman, adanya sosialisasi dan monitoring, persyaratan pinjaman, penggunaan dana, tingkat pendapatan peminjam sebelum dan sesudah mendapat pinjaman UEP, dan kemaslahatan dari adanya pinjaman UEP disajikan dalam bentuk narasi.

c. Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono adalah proses penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan atau verifikasi data adalah kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditemukan di

[32] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan dapat membawa temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada[33].

Data yang telah disajikan lalu dianalisis, terkait pelaksanaan pinjaman UEP pada peningkatan pendpatan peminjam akan dianalisis dengan mengacu pada teori manajemen pinjaman yang nantinya akan diperoleh sebuah kesimpulan apakah pelaksanaan pinjaman UEP sesuai dengan teori manajemen pinjaman atau didapati sebuah temuan baru yang berbeda dengan teori tersebut. Hasil penyajian data terkait kemaslahatan dari adanya pinjaman UEP akan dianalisis dengan mengacu pada teori *maṣlaḥah* perpektif ekonomi tentang syarat dari suatu kegiatan bisa dikatakan membawa kepada kemaslahatan dengan beberapa syarat dari sisi ekonomi, yang selanjutnya akan ditarik kesimpulan dari pinjaman UEP tersebut apakah memenuhi dari syarat tersebut atau hanya memenuhi beberapa dan hasil akhirnya bisa digolongkan pada tingkat *maṣlaḥah* yang dikemukakan Asy-Syatibi.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan gambaran pembahasan secara global dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh penelitian ini, maka penulis menyusun pembahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab yang masing-masing memiliki bahasan yang berbeda, namun tetap dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Adapun sistematika pembahsan dalam penelitian ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini terdapat beberapa sub bab yang dibahas yaitu latar belakang penelitian, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah,

[33] Ibid; 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinjauan pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KERANGKA TEORITIS, pada bab ini akan membahas mengenai pokok bahasan tentang landasan teori, mulai dari definisi dari pinjaman UEP, peningkatan pendapatan, dan *maṣlaḥah*. Pada tiap sub bab tersebut akan dijabarkan lagi poin-poin yang selaras dengan topik yang dibahas.

BAB III DATA PENELITIAN, dalam bab ini akan mebahas terkait data-data yang telah diperoleh saat penelitian, yaitu gambaran umum UPK Kecamatan Senori, keadaan masyarakat (kondisi ekonomi dan mata pencaharian) Desa Sendang, pelaksanaan pinjaman UEP, peningkatan pendapatan peminjam, dan nilai *maṣlaḥah* pada pinjaman UEP tersebut.

BAB IV ANALISIS DATA, pada bab ini data yang diperoleh pada penelitian akan dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif studi kasus yang kemudian akan disajikan hasil dari analisis pelaksanaan program pinjaman UEP terhadap peningkatan pendapatan peminjam ditinjau dari *maṣlaḥah*.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil analisis data yang telah dilakukan dan saran yang ditujukan pada lembaga, pembaca, dan peneliti selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Tinjauan Tentang Pinjaman

1. Definisi Pinjaman Secara Umum

Pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan, yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu[1]. Pinjaman sama halnya dengan kredit. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersembahkan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga[2].

Pinjaman dalam ruang lingkup pendanaan berarti sejumlah dana yang dipinjamkan oleh suatu lembaga keuangan dan debitur wajib mengembalikannya dalam suatu jangka waktu tertentu melalui angsuran pembayaran berupa pokok pinjaman ditambah dengan bunga pinjaman. Dasar dari pinjaman adalah sebuah kepercayaan. Seseorang maupun lembaga yang memberikan pinjaman percaya bahwa penerima (peminjam) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala yang telah dijanjikan di awal. Terdapat beberapa unsur yang terkandung dalam kegiatan pemberian pinjaman, diantaranya adalah:

---

[1] Ardiyos, *Kamus Besar*...,34.

[2] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi pinjaman bahwa objek yang dipinjamkan (barang atau jasa) akan sepenuhnya dikembalikan dimasa mendatang sesuai yang telah ditentukan diawal perjanjian.
b. Kesepakatan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, kesepakatan ini dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani perjanjian tersebut, baik hak maupun kewajibannya.
c. Jangka waktu, yaitu setiap bentuk pinjaman memiliki jangka waktu tertentu terkait masa pengembalian yang sebelumnya telah disepakati. Jangka waktu tersebut dapat berupa kredit jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.
d. Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan mengakibatkan munculnya risiko tidak tertagih atau macet dalam pengembalian pinjamannya.
e. Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu pinjaman barang atau jasa[3].

Beragamnya jenis kegiatan usaha menjadikan beragam pula kebutuhan akan jenis pinjamannya. Secara umum jenis-jenis pinjaman yang biasa disalurkan oleh lembaga keuangan adalah sebagai berikut:

a. Dilihat dari Segi Kegunaan
   1) Pinjaman Investasi

      Pinjaman investasi adalah pinjaman yang digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau pembangunan sebuah proyek/ pabrik dimana masa

[3] Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemakaiannya untuk satu periode yang relative lebih lama dan biasanya kegunaan pinjaman ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

2) Pinajaman Modal Kerja

Pinjaman modal kerja adalah pinjaman yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

b. Dilihat dari Segi Tujuan Pinjaman

1) Pinjaman Produktif

Pinjaman produktif adalah pinjaman yang diperguanakan untuk meningkatkan atau mengembangkan usaha pada tingkat produksi untuk mengasilkan barang atau jasa.

2) Pinjaman Konsumtif

Pinjaman konsumtif adalah pinjaman yang diperguanakan untuk kegiatan konsumtif secara pribadi, misal pembelian rumah atau mobil pribadi.

3) Pinjaman Perdagangan

Pinjaman perdagangan yang dimaksud disini adalah pinjaman yang digunakan untuk kegiatan perdagangan, dimana dana pinjaman akan digunakan untuk pembelian barang dagangan yang nantinya pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang tersebut.

c. Dilihat dari Segi Agunan

1) Pinjaman dengan Agunan

Pinjaman dengan agunan adalah pinjaman yang diberikan dengan mensyaratkan sebuah jaminan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pinjaman tanpa Agunan

Pinjaman tanpa agunan adalah pinjaman yang diberikan tanpa adanya syarat pemberian jaminan kepada pemberi pinjaman.

d. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

1) Pinjaman untuk pertanian baik di sektor perkebunan maupun pertanian sawah rakyat
2) Pinjaman untuk peternakan, yang meliputi peternakan ayam, kambing, sapi dan peternakan hewan lainnya yang bersifat produktif
3) Pinjaman untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar
4) Pinjaman untuk pertambangan jangka panjang seperti pertambangan emas, minyak, dan timah
5) Pinjaman untuk pendidikan dalam hal pembangunan sarana dan prasarana sekolah
6) Pinjaman untuk profesi, seperti guru, dosen, dokter, atau pengacara
7) Pinjaman untuk pembangunan ataupun pembelian perumahan.

e. Dilihat dari Segi Jangka Waktu Pinjaman

1) Pinjaman Jangka Pendek

Pinjaman yang mana jangka waktu pengembaliannya dalam kurun waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun, yang biasanya digunakan untuk modal kerja.

2) Pinjaman Jangka Menengah

Pinjaman yang mana jangka waktu pengembaliannya dalam kurun waktu antara satu tahun hingga tiga tahun, dan biasanya dana pinjaman digunakan untuk investasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Pinjaman Jangka Panjang

Pinjaman yang mana masa pengembaliannya terhitung lama, yaitu diatas tiga tahun dan selebihnya.

Dari uraian diatas, jenis pinjaman yang disalurkan kepada masyarakat miskin di Desa Sendang oleh UPK Kecamatan Senori adalah jenis pinjaman Usaha Ekonomi Produktif (UEP), jika dilihat dari segi kegunaannya termasuk dalam pinjaman modal kerja karena bertujuan untuk meningkatkan produksi usaha bagi peminjamnya. Sedangkan jika dilihat dari segi jangka waktu, termasuk dalam pinjaman jangka pendek, karena kurun waktu pengembaliannya paling lama adalah satu tahun.

2. Pinjaman Usaha Ekonomi Produktif

Pemerintah dapat melakukan program-program penanggulangan kemiskinan sebagai bentuk dari upaya mendukung partisipasi masyarakat dalam membangun perekonomian. Salah satunya dengan mengadakan program pemberian bantuan Pinjaman Usaha Ekonomi Produktif dengan tujuan dapat mewujudkan cita-cita untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan. Pengelolaan pinjaman UEP diarahkan untuk pengembangan dan penggerak sektor ekonomi yang merupakan salah satu kekuatan sendi dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Pinjaman Usaha Ekonomi Produktif adalah pinjaman yang diberikan untuk suatu aktivitas ekonomi yang dilakukan dengan penuh keyakinan dan secara terus menerus melalui berbagai cara untuk meningkatkan pemanfaatan nilai-nilai dari faktor produksi sumber daya produktif secara efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan barang dan atau jasa yang dapat digunakan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencukupi kebutuhan hidup. Pinjaman UEP merupakan serangkaian pinjaman yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan pendapatan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. Jenis usaha yang dijalankan oleh pemanfaat pinjaman UEP pada umumnya berkaitan dengan mata pencaharian pokok keluarga seperti pertanian, peternakan, perdagangan/jasa, perikanan, dan lain-lain[4].

Sasaran dari kegiatan pinjaman UEP adalah masyarakat yang memiliki usaha namun masih kurang mampu dalam hal permodalan. Tentunya pinjaman modal ini menyasar masyarakat miskin yang produktif. Miskin produktif disini artinya adalah masyarakat yang memiliki usaha mikro yang modalnya belum cukup. Dengan adanya pinjaman UEP ini diharapkan akan dapat membantu mengurangi beban masyarakat miskin di bidang permodalan.

Penyaluran dana bergulir UEP dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 138/319/SJ tanggal 14 Pebruari 2003, dilakukan oleh lembaga Pelaksana Program Kecamatan (PPK) tingkat kecamatan. PPK (atau yang sekarang diganti UPK) dalam menyalurkan dana bekerjasama dengan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). PPK atau UPK menyediakan pendanaan agar LPD dapat memperluas jangkauan pelayanan pinjamannya kepada golongan masyarakat miskin di wilayahnya. Dengan demikian, masyarakat miskin yang mendapatkan pinjaman modal usaha melalui pinjaman UEP diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja. Muara dari peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja

[4] Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora Utama Pres, 2010), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah semakin berkurangnya angka kemiskinan dan selanjutnya dapat mengarah pada kesejahteraan masyarakat.[5]

3. Manajemen Pinjaman

Manajemen pinjaman adalah pengelolaan pinjaman yang baik mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian pinjaman, analisis pemberian pinjaman sampai kepada pengendalian dan pengawasan kredit macet[6].

a. Perencanaan Jumlah Kredit

Dasar dalam penyusunan perencanaan disusun atas beberapa kemungkinan dan selanjutnya tujuan. Setelah tujuan disusun, kemudian dirumuskan strategi dan program dengan tahapan menyusun tugas pokok lembaga keuangan dan kemungkinan yang akan terjadi. Kemungkinan-kemungkinan tersebut diantaranya mencakup hal-hal berikut:

1) Keinginan – keinginan yang ingin dicapai, meliputi keinginan- keinginan yang dapat mempengaruhi kebijakan pengarahan dan pengelolaan kredit, tingkat keuntungan, dan perluasan bank
2) Analisis keadaan (SWOT), yang meliputi kekuatan(*Strengths*), (*Weakness*) kelemahan, (*Opportunities*) peluang dan tantangan (*Threats*) yang akan datang dari luar, seta keadaan dan kebijakan ekonomi
3) *Database*, untuk memberi gambaran besaran yang perlu bagi perencanaan. Data dasar meliputi data kredit, dana, dan biaya. Data

[5] I Made Oka Wirawan, "Efektivitas Program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam Upaya Peningkatan Kesempatan Kerja dan Pendapatan Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Kerambitan", *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 5, No. 1, (2015), 121.

[6] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Cetakan Kedua, (Jakarta: PT Raja Grafindo Prasada, 2011) 71-85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

realisasi kredit tahun-tahun yang lalu penting karena dengan data tersebut dapat dilakukan ramalan pemberian kredit diwaktu yang akan datang dengan melihat trend perkembangan pemberian kredit

4) Menyusun tujuan – tujuan
5) Menyusun strategi
6) Menyusun program atau target
7) Pelakasanaan dan pengawasan.

b. Penentuan Suku Bunga

1) Bunga tetap (*Fixed Interest*) dalam sistem ini, tingkat suku bunga tidak akan berubah selama periode tertentu sesuai kesepakatan. Jika tingkat suku bunga pasar (*market interest rate*) berubah (naik atau turun), lembaga keuangan akan konsisten pada suku bunga yang telah ditetapkan. Lembaga pembiayaan yang menerapkan sistem bunga tetap menetapkan jangka waktu kredit antara 1-5 tahun.
2) Bunga Mengambang (*Floating interest*) dalam sistem ini, tingkat suku bunga akan mengikuti naik-turunnya suku bunga pasar. Jika suku bunga pasar naik, maka bunga kredit akan naik, demikian pula sebaliknya. Suku bunga ini diterapkan untuk kredit jangka panjang, seperti kredit kepemilikan rumah, modal kerja, usaha dan investasi.
3) Bunga Flat (*Flat interest*) dalam sistem ini, jumlah pembayaran pokok dan bunga kredit besarnya sama setiap bulan. Bunga flat biasanya diperuntuhkan untuk kredit jangka pendek. Contoh kredit mobil, kredit motor dan kredit tanpa angunan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Bunga Efektif (*Effective interest*) dalam sistem ini, perhitungan beban bunga dihitung setiap akhir periode pembayaran angsuran berdasarkan saldo pokok. Beban bunga akan semakin menurun setiap bulan karena pokok utang juga berkurang seiring cicilan.

5) Bunga Anuitas (*Anuitas interest*) Bunga anuitas boleh disertakan dengan bunga efektif. Bedanya ada rumus anuitas yang bisa menetapkan besarnya cicilan sama secara terusmenerus sepanjang waktu kredit. Jika tingkat bunga berubah maka angsuran akan menyesuaikan. Dalam perhitungan anuitas porsi bunga pada masa awal sangat besar sedangkan porsi angsuran sangat kecil. Mendekati berakhirnya masa kredit, keadaan akan menjadi terbalik. Porsi angsuran pokok akan sangat besar sedangkan porsi bunga menjadi lebih kecil.

c. Prosedur Pemberian Pinjaman

1) Pengajuan proposal, untuk memperoleh fasilitas kredit maka tahap pertam yang dilakukan pemohon kredit untuk mengajukan permohonan secara tertulis dalam suatu proposal dan harus dilampiri dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.

2) Penyelidikan berkas pinjaman, untuk membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang ada, seperti kebenaran dan keaslian Akte notaris, TDP, KTP, dan surat-surat jaminan seperti sertifikat tanah, BPKB. Kemudian jika asli maka pihak krditur akan mencoba mengkalkulasi jumlah kredit yang diminta apakah relevan apa tidak dan kemampuan nasabah untuk membayar.

3) Penilaian kelayakan kredit, yaitu dengan analisis 5C dan 7P.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Wawancara dengan pihak pemohon kredit.

5) Peninjauan lokasi.

6) Keputusan kredit, untuk menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit akan mencakup:

   a) Akad kredit yang akan ditandatangani

   b) Jumlah uang diterima

   c) Jangka waktu kredit

   d) Biaya-biaya yang harus dibayar

   e) Penandatanganan akd kredit/perjanjian lainnya

   f) Realisasi kredit.

d. Analisis Pemberian Pinjaman

Sebelum fasilitas kredit diberikan maka kreditur harus yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penelian kredit sebelum kredit tersebut tersalurkan. Penilaian kredit oleh kreditur dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk keyakinan atas nasabahnya, diantaranya dengan analisis 6C dan 7P.

e. Teknik Penyelesaian Kredit Macet

1) *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Rescheduling dapat dilakukan dengan cara:

   a) Memperpanjang jangka waktu kredit Dalam hal ini kreditur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lama untuk mengembalikannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Memperpanjang jangka waktu angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya. Misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun mengecil seiring dengan penambahan jumlah anggsuran.

2) *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Reconditioning dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

a) Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan hutang pokok
b) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
c) Penurunan suku bunga Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.
d) Pembebasan bunga, dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman sampai lunas.

3) *Restructuring* (Penataan Kembali)

Penataan kembali, yaitu perubahan syaratsyarat kredit yang meliputi:

a) Penambahan dana kredit, merupakan tindakan yang dilakukan kreditur dalam rangka memperbaiki kinerja usaha debitur agar dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beroprasi kembali secara normal dengan penambahan kredit, sehingga akan meningkatkan kemampuan usaha debitur untuk memenuuhi kewajiban kepada kreditur dari hasil usahanya.

b) Pengurangan tunggakan pokok, merupakan upaya pengurangan hutang pokok debitur agar sisa hutang pokok yang masih ada berikut bunga masih dapat dibayar dari hasil usahanya, sehinggu usaha debitur masih dapat dipertahankan.

c) Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, merupakan tindakan yang diambil kreditu apabila berdasarkan analisa ternyata timbulnya kredit macet disebabkan adanya kelemahan dalam manajemen perusahaan.Sedangkan dari segi bisnis usaha masih layak untuk tetap dipertahankan dan mempunyai prospek yang baik.

4) Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan adalah jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai etikad baik atau sudah tidak mampu lagi membayar semua hutang-hutangnya.

B. Peningkatan Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitas oprasional penjualan produk atau jasa kepada pelanggan. Pendapatan merupakan suatu hasil yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga dari berusaha atau bekerja[7]. Pendapatan menurut ilmu ekonomi diartikan sebagai nilai maksimum yang

[7] Nazir, "Analisis Determinan Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Aceh Utara" (Tesis--Universitas Sumatera Utara, 2010), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Definisi tersebut menitikberatkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Dengan kata lain pendapatan merupakan jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi. Secara garis besar pendapatan didefinisikan sebagai jumlah harta kekayaan awal periode ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang[8]. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan yaitu biaya yang timbul dari perolehan mengolah produk, dan harga jual yang mempengaruhi volume penjualan dan besarnya volume penjualan berpengaruh terhadap volume produksi.

Menurut Riyanto, peningkatan pendapatan adalah kemampuan perusahaan dalam memaksimalkan modal untuk menghasilkan laba maksimal selama periode tertentu. Peningkatan pendapatan adalah menurunnya ongkos sehubungan penggunaan yang lebih besar short-term financing dan berkurangnya *long-term financing*[9]. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai peningkatan pendapatan adalah kemampuan suatu usaha dengan seluruh modal yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Pendapatan yang meningkat dihasilkan oleh pekerja dengan kemampuan dan keterampilan tinggi sedangkan pekerja dengan kemampuan dan keterampilan rendah maka rendah pula pendapatannya. Rendahnya tingkat produktivitas menyebabkan rendahnya pendapatan yang diterima.

---

[8] Nurul Huda, *Ekonomika Indonesia*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2009),347.
[9] Alwi, *Ekonomi Kerakyatan, (*Jakarta: Salemba Empat, 2005), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jenis-jenis Pendapatan

Pendapatan menunjukkan sejumlah uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu. Pendapatan yang diterima oleh seseorang tentu berbeda antara satu dengan yang lainnya, hal ini disebabkan karena berbedanya jenis pekerjaan yang dilakukannya. Secara garis besar, pendapatan digolongkan menjadi tiga jenis yaitu[10]:

a. Gaji atau upah

Gaji atau disebut juga upah adalah suatu penerimaan sebagai suatu imbalan pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa telah dan akan dilakukan sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan. Gaji upah juga bisa diartikan sebagai pengganti jasa bagi tenaga kerja yang meliputi masa dan syarat-syarat tertentu dengan tugas-tugas yang sifatnya lebih konstan, ditetapkan meliputi masa yang panjang[11].

b. Pendapatan dari Usaha Sendiri

Pendapatan dari usaha sendiri atau bisa dikatakan juga sebagai pendapatan dari kekayaan adalah nilai total yang diperoleh dari hasil produksi yang telah dikurangi dengan beban-beban yang dibayar. Usaha yang dimaksud disini adalah usaha kepemilikan sendiri atau keluarga dan tenaga kerja berasal dari anggota keluarga sendiri, nilai sewa kapital milik sendiri juga dan semua biaya ini biasanya tidak diperhitungkan.

---

[10] M. Suparmoko, *Pengantar Teori Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 2010), 36.
[11] Hadi Poerwono, *Tata Personalia*, (Jakarta: Djambatan, 1991), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pendapatan dari Usaha Lain

Pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja dan biasanya merupakan pendapatan sampingan, antara lain yaitu pendapatan dari hasil menyewakan sebuah aset yang dimiliki seperti rumah, tanah, ternak dan barang lainnya, sumbangan dari pihak lain, dan pendapatan dari pensiun[12].

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Pendapatan

Peningkatan pendapatan dipengaruhi oleh tingkat perkembangan usaha, dimana para pelaku usaha kecil memiliki beberapa permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan usahanya baik permasalahan internal maupun eksternal. Permasalahan internal yang dihadapi seorang pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya adalah terkait banyaknya pesaing usaha yang sejenis, belum adanya pembinaan yang memadai dan akses kredit yang masih sukar dan terbatas. Sedangkan permasalahan eksternal yang dihadapi adalah struktur modal yang sangat lemah, terbatasnya komoditas yang diperjualbelikan, pendidikan rendah dan kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai. Usaha kecil ini kurang dapat berkembang ke arah usaha yang lebih besar walaupun pada dasarnya memiliki daya jual yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan kemampuan dalam pengelolaan usaha yang masih bersifat tradisional, tambahan modal kredit dari pihak ketiga yang masih relatif kecil dan informasi tentang dunia usaha sangat terbatas, sifat kualitas barang yang diperjualbelikan hanya sebatas kebutuhan untuk barang dagangan. Oleh karena

[12] Ferry Christian, "Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban pada PT. Bank Perkreditan Rakyar Prisma Dana Manado", *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 13 No. 2, (2018), 213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, untuk meningkatkan pendapatan usaha kecil harus didukung oleh penguasaan terhadap usaha tersebut[13].

Tujuan dari para pengusaha kecil masih seputar bagaimana cara meningkatkan pendapatan demi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kendala klasik seputar usaha kecil di Indonesia yang sering dibicarakan sampai saat ini adalah soal kekurangan modal, kredit, tenaga kerja, disamping peralatan atau teknologi dan juga pemasaran. Sehingga muncul pertanyaan yang paling esensial dari dampak permasalahan tersebut yaitu bagaimana sektor usaha kecil dalam negeri dapat didorong menjadi sektor usaha berskala besar sehingga memberikan tingkat pendapatan masyarakat yang cukup baik[14]. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan sektor usaha kecil diantaranya adalah[15]:

a. Modal

Modal merupakan barang-barang hasil produksi tahan lama yang pada gilirannya digunakan sebagai input produktif untuk produksi lebih lanjut. Modal adalah segala bentuk kekayaan berupa barang dan uang yang bisa didapatkan sendiri maupun pihak lain berupa pinjaman[16]. Modal usaha digunakan oleh pedagang untuk membeli berbagai bahan dagangan dan juga pengolahannya. Secara logis dapat dikemukakan bahwa semakin tinggi modal yang dikeluarkan oleh pedagang maka semakin tinggi pula laba atau

[13] Nurlaila Hanum, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Sektor Usaha Kecil di Kota Kuala Simpang", *Jurnal Samudra Ekonomika*, Vol. 1, No. 1, (2017), 73.

[14] Agustian, "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Seberang Ulu Plaju", *Jurnal Ilmiah MBIA*, Vol. 14, No. 3, (2015), 102.

[15] Moniaga Brenda, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan pada Pemilik Warung Sembako di Kota Manado", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 17 No.02, (2017), 27-28.

[16] M. Suparmoko, Pengantar Teori..., 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapatan yang diperoleh. Modal dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

1) Modal usaha adalah kapital semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan langsung maupun tidak langsung, untuk menambah *output*. Modal dari sektor usaha kecil itu sendiri meliputi modal tetap yang berupa bangunan dan peralatan sedangkan modal lancarnya adalah uang kas dan barang dagangan.
2) Modal kerja adalah kapital yang diperlukan untuk membelanjai operasi sehari-hari atau disebut biaya tetap suatu usaha. Contohnya uang muka dan gaji pegawai, dimana uang tersebut akan kembali lagi masuk ke perusahaan melalui hasil penjualan. Jumlah modal kerja lebih fleksibel, dapat diperbesar ataupun diperkecil sesuai dengan kebutuhannya[17].

b. Lama Usaha

Lama usaha menunjukkan sudah berapa lama pedagang menjalani kegiatan usaha berdagang dalam satuan tahun. Lama usaha diukur dari awal usaha itu didirikan. Lama usaha berkaitan dengan seberapa banyak orang mengetahui keberadaan usaha tersebut, semakin lama usaha tersebut berjalan maka bisa dibilang usaha tersebut telah banyak diketahui oleh masyarakat. Sejalan dengan bertumbuhnya pengalaman kerja, maka akan bertumbuh pula pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya, karena penguasaan terhadap situasi dan kondisi dalam menghadapi calon pelanggan yang bervariasi.

[17] Ewsaningrat Artianto, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Gladag Langen Bogan Surakarta" (Skripsi--Universitas Sebelas Maret, Solo, 2010), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jam Kerja

Jam kerja merupakan lamanya waktu yang digunakan/ dicurahkan untuk berdagang setiap harinya. Jam kerja dihitung dalam satuan jam setiap harinya. Lama jam kerja yang digunakan seseorang akan menentukan tingkat pendapatan yang diterimanya. Semakin lama jam kerja (jam operasional) sebuah usaha, maka pendapatan yang diterima akan meningkat, begitu sebaliknya. Seorang pengusaha selalu mengharapkan adanya konsumen yang datang untuk membeli produknya, sebagai pengusaha harus bisa mengerti waktu-waktu tertentu yang memungkinkan banyaknya konsumen yang akan datang. Oleh karena itu, jam kerja akan mempengaruhi jumlah konsumen yang datang yang secara langsung akan memberikan dampak pada tingkat pendapatan.

d. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang ditempuh oleh sesorang pada dasarnya merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk dapat memperoleh kinerja atau mencapai tingkat hidup yang lebih baik. Tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi pendapatan yang diterimanya dalam bekerja. Pendidikan memberikan pengetahuan bukan hanya dalam pelaksanaan kerja, akan tetapi juga sebagai landasan untuk mengembangkan diri dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekitar demi kelancaran sebuah pekerjaan. Asumsi dasar teori *Human Capital* bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilan dengan cara meningkatkan tingkat pendidikannya. Pendidikan yang baik akan memberikan sebuah keterampilan, dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterampilan yang dimiliki seorang pedagang, maka akan meningkatkan keuntungannya.

Peningkatan pendapatan yang dialami oleh peminjam dana UEP disini akan lebih terfokus pada faktor pertama, yaitu berkaitan dengan modal. Karena dalam penelitian ini, kegiatan yang diteliti berkaitan dengan pinjaman modal yang diberikan oleh pihak UPK kepada masyarakat miskin Desa Sendang, apakah memberikan dampak peningkatan pendapatan atau sebaliknya. Tujuan diberikannya pinjaman UEP tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin. Oleh karena itu, dari pelaksanaan pinjaman UEP akan dianalisis ketercapaian tujuan awal pemberian pinjaman tersebut.

C. Tinjauan Tentang *Maṣlaḥah*

1. Definisi *Maṣlaḥah*

Menurut bahasa, kata *maṣlaḥah* bersal dari Bahasa Arab *salaha, yasluhu, salahan* (صلح, يصلح, صلحا) artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat yang kemudian telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata maslahat, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan[18]. *Maṣlaḥah* adalah spirit Islam. Secara etimologi, *maṣlaḥah* mempunyai makna yang identik dengan manfaat, keuntungan, kenikmatan, kegembiraan, atau segala upaya yang dapat mendatangkan hal tersebut. Pada tataran substansi, ulama mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai suatu kondisi dari

[18] Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1995), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upaya untuk mendatangkan sesuatu yang berdampak positif (manfaat) serta menghindarkan diri dari hal-hal yang berdimensi negatif (mudarat)[19].

2. Pemikiran Asy-Syatibi Tentang *Maṣlaḥah*

Menurut Asy-Syatibi, *maṣlaḥah* adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Manfaat adalah ungkapan dari keseluruhan kenikmatan yang diperoleh dari usaha yang telah dilakukan dan segala hal yang masih berhubungan dengan manfaat tersebut, sedangkan kerusakan adalah keseluruhan akibat yang merugikan dan menyakitkan atau segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kerusakan tersebut.

Penerapan *maṣlaḥah* dan mafsadah tidak ada yang murni, ukurannya ditentukan oleh kekuatan yang mendominasi dan banyaknya aktifitas yang dikerjakan. Jika *maṣlaḥah* lebih banyak dan kuat, maka disebut *maṣlaḥah*, sebaliknya jika mafsadahnya yang lebih banyak dan dominan, maka masuklah pada sesuatu yang mafsadah[20]. Asy-Syatibi mengugkapkan *maṣlaḥah* adalah bagian dari *maqasid asy-syar'iyah* yang harus diwujudkan. *Maqasid asy-syar'iyah* memiliki dasar paradigma yang kuat, yakni *i'tibar al-amal*. Paradigma inilah yang menjadi jiwa dalam mempertimbangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. *I'tibar al-amal* adalah sebuah cara pandang yang tidak terjebak pada aspek formal suatu perbuatan, tetapi harus melihat jauh ke depan serta menekankan pada pentingnya untuk mengawasi dan mewaspadai dari implikasi suatu perbuatan, artinya status hukum perkara itu sangat tergantung pada dampak atau implikasi baik dan buruknya yang akan ditimbulkan[21].

---

[19] Amir Machmud, *Ekonomi Islam untuk Dunia yang Lebih Baik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 20.
[20] Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul*...,20.
[21] Ibid; 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukumNya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Asy-Syatibi mengungkapkan bahwa tujuan utama dari syariah ialah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, yaitu *daruriyyah*, *hajjiyah,* dan *tahsiniyah*. Tujuan dari masing-masing kategori tersebut adalah untuk memastikam bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat, terwujud dengan cara yang baik dan karena Tuhan. Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, menurut Asy-Syatibi ada 3 (tiga) kategori tingkatan *maṣlaḥah*, yaitu:

1) *Daruriyyah* (Kebutuhan Primer)

   Kebutuhan primer yang dimaksud adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensi manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia tanpa harus dipenuhinya kebutuhan tersebut sebagai ciri dan kelengkapan kehidupan manusia. *Daruriyyah* disini meliputi pemeliharaan atas agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kelima *daruriyyah* tersebut adalah hal mutlak yang harus ada pada diri manusia. Karenanya Allah memerintahkan manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya, Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima *daruriyyah* tersebut.

2) *Hajiyyah* (Kebutuhan Sekunder)

   Kebutuhan tingkat sekunder bagi kehidupan manusia yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi keberlangsungan kehidupannya, namun tidak mencapai pada tingkat *daruriyyah*. Seandainya kebutuhan tersebut tidak terpenuhi,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan manusia. Jika keberadaannya tidak diperhatikan, maka manusia akan mengalami kesulitan, kendati tidak merugikan kemaslahatan secara umum. Contoh *maṣlaḥah* pada tingkat *hajiyyah* diantaranya adalah diperbolehkannya transaksi-transaksi untuk pemenuhan kebutuhan seperti hutang-piutang, persewaan, adanya lembaga sosial dan perbankan.

3) *Tahsiniyyah* (Kebutuhan Tersier)

Kebutuhan tingkat tersier adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut, kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaan kebutuhan tersier sebagai penyempurna dari dua tingkatan kebutuhan sebelumnya, ia bersifat pelengkap dalam kehidupan manusia yang di titikberatkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan. Contohnya tata krama ketika makan dan minum.

Asy-Syatibi memberikan sebuah korelasi antara *daruriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Bahwa *daruriyyah* merupakan dasar dari *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*. Kerusakan pada *daruriyyah* akan membawa kerusakan pula pada *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*. Namun, kerusakan pada *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* tidak dapat merusak *daruriyyah*. Kerusakan pada *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* yang bersifat absolut terkadang dapat merusak *daruriyyah*. Pemeliharaan terhadap *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* perlu dilakukan demi terpeliharanya *daruriyyah* secara baik dan tepat. Dengan demikian, dalam usaha mencapai pemeliharaan lima

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unsur pokok secara sempurna, ketiga tingkat kebutuhan tersebut tidak dapat dipisahkan[22]. Asy-Syatibi mengemukakan apabila terjadi pertentangan antara wahyu dan akal, maka yang dimenangkan adalah wahyu dan tidak dibenarkan akal melakukan penalaran terkecuali sesuai dengan wahyu. Sesuatu bisa dikatakan sebagai *maṣlaḥah* ketika memenuhi syarat-syarat berikut[23]:

1) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syar'i yang secara ushul dan *furu'*nya tidak bertentangan dengan *nash*
2) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial dan ekonomi (*muamalah*) dimana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam *muamalah* tidak diatur secara rinci dalam *nash.*
3) Hasil *maṣlaḥah* merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *daruriyyah***,** *hajjiyyah, dan tahsiniyyah.*

4. *Maṣlaḥah* dalam Lingkup Kesejahtaeraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang saling berhubungan[24]. Kesejahteraan ekonomi dari sisi Islam bertujuan untuk terciptanya sebuah kemaslahatan yang mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara. Dalam *maṣlaḥah* tidak terlepas dari sebuah kesejahteraan, karena *maṣlaḥah* adalah kesejahteraan itu sendiri. Indikator yang digunakan Biro

[22] Ibid; 16-17.
[23] Asy-Syatibi, *Al-I'tisam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), 23.
[24] Lyncolin Arsyad, *Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Gemapress, 1999), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pusat Statistik (BPS) untuk mengetahui tingkat kesejahteraan adalah sebagai berikut[25]:

a) Tingkat pendapatan: tinggi, sedang, dan rendah
b) Komposisi pengeluaran rumah tangga: tinggi, sedang, dan rendah
c) Tingkat pendidikan keluarga: biaya sekolah, jarak sekolah, dan proses penerimaan. Dari tiga item akan digolongkan pada mudah, cukup, dan sulit.
d) Tingkat kesehatan keluarga: bagus, cukup, dan kurang
e) Kondisi tempat tinggal: jenis atap rumah, dinding, status kepemilikn rumah, lantai, dan luas lantai. Dari lima item tersebut akan digolongkan pada permanen, semi permanen, dan non permanen.
f) Fasilitas tempat tinggal: pekarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan, bahan bakar memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, sumber air minum, fasilitas mandi cuci kakus (MCK), dan jarak MCK dari rumah. Dari 12 item tersebut akan digolongkan pada lengkap, cukup, dan kurang.
g) Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan: jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan, harga obat-obatan, dan alat kontrasepsi. Dari lima item tersebut digolongkan pada mudah, cukup, dan sulit.
h) Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi: ongkos kendaraan, fasilitas kendaraan, dan status kepemilikan kendaraan. Dari tiga item tersebut akan digolongkan pada mudah, cukup, dan sulit.

[25] Dokumen Biro Pusat Statistik Indonesia Tahun 2000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Implementasi *Maṣlaḥah* Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah

Salah satu aspek kehidupan manusia yang mendapat perhatian khusus dalam hal penerapan konsep *maṣhlaḥah* adalah aspek ekonomi. Karena aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia, maka prinsip *maṣhlaḥah* dalam ekonomi Islam bukanlah sekedar kajian teori tetapi perlu diimplementasikan dengan metode yang benar.

Sejalan dengan perkembangan kemajuan dan peradaban, maka permasalahan kehidupan manusia akan semakin kompleks dan beragam dan memerlukan kepastian hukum. Beberapa perkembangan di bidang ekonomi Islam yang sebelumnya belum pernah ada, juga memerlukan kepastian hukum apakah model-model, produk-produk tersebut boleh diterapkan mengingat tidak ada *nash* yang dapat dirujuk atas aktivitas tersebut. Persoalan-persoalan ekonomi kontemporer tersebut misalnya tidak akan mampu diselesaikan jika hanya mengandalkan pada pendekatan metode lama yang dipergunakan oleh ulama terdahulu. Kesulitan untuk mendapatkan *nash-nash* dalam persoalan-persoalan tertentu sangat mungkin terjadi sehingga tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan qiyas karena tidak ditemukan padanannya di dalam *nash*, atau ijma ulama karena masanya yang sudah terlalu jauh[26].

Adanya pertimbangan *maṣhlaḥah*, regulasi perekonomian bisa berubah dari teks *naṣh* kepada konteks *naṣh* yang mengandung *maṣhlaḥah*. Implementasi *maṣhlaḥah* dalam kegiatan ekonomi tersebut dapat dilihat dalam berbagai aspek, diantaranya adalah:

---

[26] Ahmad Qorib, "Penerapan *Maṣlaḥah* dalam Ekonomi Islam", *Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 1, (2016), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Mekanisme pasar

Pertimbangan yang berdasarkan *maṣlaḥah* dalam hal mekanisme pasar dapat dilihat dalam kasus intervensi harga. Contoh pada kejadian dimana ketika Nabi Muhammad didesak oleh para sahabat untuk melakukan intervensi harga (menentukan harga) karena harga barang di pasar mengalami kenaikan. Beliau sebagai pemimpin saat itu mengatakan tidak berhak ikut campur tangan dalam masalah penentuan harga, karena perbuatan campur tangan itu merupakan sesuatu yang dzalim. Tetapi dalam situasi dan kondisi tertentu seperti terancamnya kebutuhan masyarakat, terjadinya monopoli, pemboikotan, atau terjadinya kolusi antar penjual, maka Ibnu Taimiyyah membolehkan pemerintah melakukan intervensi harga[27]. Pernyataan Ibnu Taimiyyah yang memberi peluang kepada penguasa untuk melakukan intervensi harga bertentangan dengan apa yang menjadi ketetapan Nabi Muhammad SAW. Namun, karena situasi dan kondisinya berbeda disertai dengan pergerakan harga yang telah merusak mekanisme pasar, maka intervensi harus dilakukan supaya harga tetap stabil. Adapun tujuan penguasa dalam melakukan intervensi pada saat itu, semata-mata untuk mencegah terjadinya tindak kezaliman dan atas pertimbangan kemaslahatan.

Sepanjang mekanisme pasar berjalan normal, mengedepankan keadilan dan tidak mengancam terpenuhinya kebutuhan minimal seluruh rakyat, maka negara dalam hal ini otoritas ekonomi tidak akan mengintervensi pasar dalam bentuk apapun. Tetapi, jika terjadi kegagalan pasar di luar sebab-sebab ketidakadilan dari pelaku pasar, otoritas negara

[27] Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), 162-163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh melakukan intervensi sepanjang kegagalan pasar tersebut mengancam dan merusak kebutuhan rakyat. Untuk menjaga kemaslahatan dan kestabilan pasar maka dibentuklah lembaga *ḥisbah* atau regulator pasar yang berperan sebagai pengawas dalam seluruh aktivitas ekonomi yang berjalan di pasar.

b. Pembentukan lembaga *hisbah*

Tugas lembaga *hisbah*/ regulator pasar adalah mengawasi kegiatan-kegiatan pasar. Selain itu juga memberikan dan menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan oleh pasar untuk memudahkan semua pelaku pasar. Fasilitas-fasilitas yang harus disediakan oleh lembaga *ḥisbah* antara lain berupa lahan yang memadai, transportasi, penerangan, penginapan bagi pedagang dari luar, dan semua falititas yang mendukung kelancaran transaksi pasar. Dengan demikian, keberpihakan lembaga *ḥisbah* dalam mendukung keseluruhan aktivitas yang menjadi kebutuhan para pelaku pasar merupakan bentuk *maṣhlaḥah* yang akan dapat menekan semua hambatan bagi siapa saja yang ingin masuk ke pasar, sehingga kestabilan mekanisme pasar dapat diwujudkan[28].

c. Zakat produktif

Maṣhlaḥah dalam kebijakan pengelolaan zakat dapat dilihat dalam masalah zakat produktif. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh *Public Interest Research and Advocacy Center* (PIRAC) mencatat bahwa tingkat kesadaran masyarakat muslim Indonesia dalam membayar zakat sangat

[28] Ali Sakti, *Analisisi Teoritis Ekonomi Islam, Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*, (Jakarta: Aqsa Publishing, 2007), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinggi, yakni mencapai angka 95%[29]. Supaya dana zakat dapat memberi manfaat yang lebih besar dan berkelanjutan bagi para *mustaḥik*, maka pola pendistribusian dalam bentuk konsumtif harus diminimalisir dan beralih kepada pola pendistribusian zakat produktif. Untuk tujuan *maṣlaḥah*, maka perlu regulasi otoritas pemerintah dalam mewujudkan peran konstruktif zakat melalui kebijakan zakat produktif sebagai solusi untuk menanggulangi problema kemiskinan di negeri ini.

d. Pendirian lembaga keuangan syariah

Kehadiran lembaga-lembaga perbankan dan keuangan syari'ah juga didasarkan kepada *maṣhlaḥah*. Jika ditinjau dari rasionalitas pasar, bunga atau sistem riba sebenarnya membuat mekanisme pasar menjadi tidak rasional. Dengan bunga, pasar selalu dipaksa dalam keadaan positif, semua unit usaha selalu ada dalam kondisi profit, tentu hal ini tidak mungkin. sistem bagi hasil menawarkan solusi dimana dalam setiap usaha akan mengalami untung atau rugi, sehingga tidak rasional ketika perekonomian hanya mengadopsi satu kondisi saja dari dua kondisi ekonomi tersebut. Oleh karena itu, usaha bagi hasil harus sesuai dengan prinsip syariah, tidak diperkenankan mengandung unsur riba, judi dan *gharar*, dilarang memproduksi barang haram. Dengan demikian, keberanian otoritas pemerintah dalam mengambil kebijakan dan mengembangkan lembaga keuangan berbasis syariah di tanah air mengandung nilai *maṣlaḥah* yang tinggi[30].

---

[29] Zaidi Zaim, *Restorasi Zakat Sebuah Keniscayaan: Teladan dari Kaum Muslim Cape Town Afrika Selatan*, (Jakarta: Forum Zakat, 2006), 176.

[30] Ali Sakti, Analisis Teoritis...,234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lain dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konseptual digunakan untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti[31]. Adapun gambar kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah:

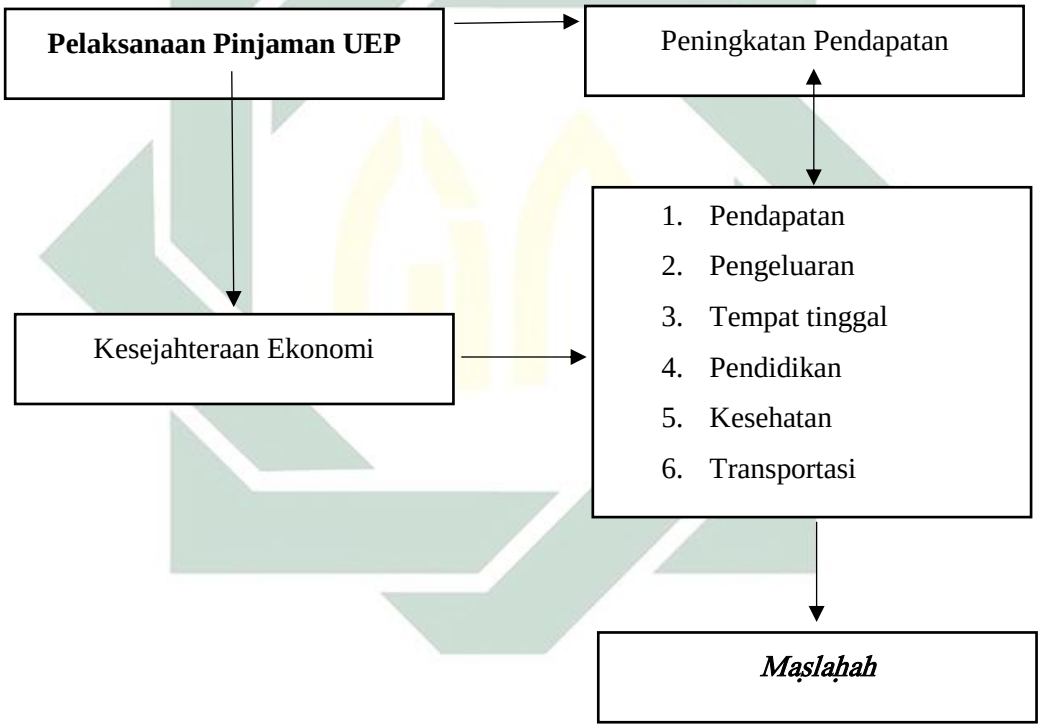

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Sumber: Data diolah 2020

Penelitian ini diawali dengan pengumpulan informasi seputar pelaksanaan pinjaman UEP di UPK Kecamatan Senori dengan cara pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah diperoleh data tersebut maka akan

[31] Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1982), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianalisis dengan teori manajemen pinjaman yang selanjutnya hasil dari analisis tersebut akan memberikan jawaban apakah pelaksanaan pinjaman UEP sesuai dengan teori tersebut atau didapati sebuah temuan baru.

Pelaksanaan pinjaman UEP akan dilihat apakah membawa perubahan pada tingkat pendapatan peminjam atau tidak. Selain itu juga dilihat apakah dari adanya pinjaman UEP tersebut membawa pada kesejahteraan ekonomi dengan mengacu pada enam unsur sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan ekonomi yaitu pendapatan, pengeluaran, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Keenam tolok ukur tadi merupakan beberapa kriteria *maṣlaḥah* dalam bidang ekonomi, ketika terpenuhi dari keenam tolok ukur tersebut maka bisa disebut pinjaman UEP membawa pada sebuah kemaslahatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Senori

Gambar 3.1 Gedung UPK Kecamatan Senori
Sumber: Dokumentasi oleh Peneliti 2020

1. Sejarah Berdirinya UPK Kecamatan Senori

UPK Kecamatan Senori didirikan sejak tahun 2000, namun mulai aktif beroperasi pada tahun 2006. UPK Kecamatan Senori menyediakan modal bagi masyarakat miskin yang berfokus pada pengembangan potensi ekonomi dan perkembangan aset, peningkatan SDM, serta mampu bekerjasama antar berbagai pihak. Maka dari itu, UPK harus menjadi pelopor dan bisa memposisikan diri sebagai pelopor pembangunan terutama di wilayah kecamatan. Visi dan misi UPK Kecamatan Senori sendiri adalah:

Visi menciptakan tumbuhnya perekonomian masyarakat Kecamatan Senori yang mandiri didukung dengan tersedianya sarana prasarana sosial

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi sesuai dengan kebutuhan mereka serta peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam pembangunan.

Sedangkan misinya adalah membantu masyarakat dengan menyediakan modal usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Senori, mendorong masyarakat untuk mandiri serta berinisiatif dalam pengembangan usaha, pemberdayaan dan pembelajaran masyarakat Kecamatan Senori untuk berusaha meningkatkan pendapatan dengan pelatihan wirausaha, mendorong peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam pembangunan

Secara umum, UPK mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1) Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM MP
2) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh kegiatan PNPM MP
3) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM MP yang bersifat keuangan
4) Bertanggung jawab terhadap dana bergulir
5) Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam
6) Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM MP
7) Membuat perancangan keuangan dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)/ Musyawarah Antar Desa (MAD)
8) Melakukan pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggung jawaban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disampaikan kepada seluruh desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan

9) Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD)

10) Melakukan bimbingan teknisi.

Dalam hal merealisasikan program pemberdayaan masyarakat miskin, pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp. 1.878.464.100, yang selanjutnya harus dikelola UPK Kecamatan Senori dalam menjalankan program pemberdayaan yang dicairkan secara berkala selama program tersebut berlangsung (2006 – 2014). Pengalokasian dana tersebut mengikuti Panduan Teknis Operasional (PTO), yaitu sebesar 75% dari dana yang digelontorkan pemerintah harus digunakan untuk pembangunan fisik yang meliputi perbaikan jalan umum, gedung TK, pasar desa, gedung pertemuan dan sarana prasarana lainnya. Sedangkan sebesar 25% harus disalurkan untuk kegiatan simpan pinjam. Pada awal terbentuknya UPK Kecamatan Senori, kegiatan yang dijalankan adalah program-program pemberdayaan yang dikonsepkan oleh pemerintah. Namun setelah program tersebut berakhir, UPK Kecamatan Senori melanjutkan program simpan pinjam yang telah dijalankan sebelumnya.

Pada saat program PNPM MP berakhir, dana yang tersisa di UPK dibagi menjadi dua bagian, yaitu dana untuk pembangunan fisik dan dana simpan pinjam. Dana pembangunan fisik dihibahkan secara merata di 12 desa Kecamatan Senori, sedangkan dana simpan pinjam dikelola lagi oleh UPK untuk mengembangkan kegiatan simpan pinjam yang sebelumnya telah dijalankan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tercatat per 31 Desember 2019, jumlah dana yang dikelola oleh UPK Kecamatan Senori sebesar Rp. 5.510.000.000.

Terdapat unsur kelembagaan lain di dalam UPK yang menjadi satu kesatuan dalam menjalankan kegiatan yang dikelola. Diantaranya adalah[1]:

1. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yaitu lembaga yang anggotanya ditetapkan oleh musyawarah antar desa, BKAD merupakan organisasi kerja yang mempunyai lingkup wilayah antar desa, berperan sebagai lembaga dalam mengelola perencanaan pembangunan partisipatif, mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan kerjasama antar desa, menumbuhkan usaha-usaha pengelolaan aset produktif serta mengembagkan kemampuan pengelolaan program-program pengembangan masyarakat. Dimana BKAD memiliki wewenang sebagai pengambil keputusan paling tinggi.
2. Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP UPK), kegiatan pemeriksaan BP UPK berupa temuan dan rekomendasi kinerja pada UPK dan kelompok. Dari hasil temuan tersebut selanjutnya di audit dan ditindaklanjuti penyelesaian masalah, serta validasi dari data tersebut.
3. Tim Verifikasi (TV) berinteraksi langsung dengan kelompok untuk menilai kelayakan dan keakuratan usulan yang masuk.
4. Tim Pendanaan (TP) berwenang mencairkan dana atas kelompok yang telah di setujui akan diberikan pinjaman melalui rapat bersama

[1] Dokumen Laporan Pertanggungjawaban BKAD UPK Kecamatan Senori Tahun 2019, 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Struktur Kepengurusan

Struktur kepengurusan adalah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasi secara formal. Adapun struktur kepengurusan Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Senori adalah sebagai berikut:

a. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)

Tabel 3.1
Kepengurusan BKAD

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Edi Firmanto	Ketua	Desa Wanglu Kulon
2	Nur Priyatiningsih	Sekretaris	Desa Rayung
3	Parmin, S.Pd.	Bendahara	Desa Sendang
4	Mansyur, S.Pd.	Sie Ekonomi	Desa Rayung
5	Siti Asmuniroh	Sie Pengembangan Usaha	Desa Leran

Sumber: Dokumentasi UPK Kecamatan Senori 2020

b. Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP UPK)

Tabel 3.2
Kepengurusan BP UPK

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Tukiman, S.Pd.	Ketua	Desa Banyu Urip
2	Ali Rohim	Anggota 1	Desa Leran
3	Zainal Arifin	Anggota 2	Desa Wanglu Wetan

Sumber: Dokumentasi UPK Kecamatan Senori 2020

c. Tim Verifikasi (TV)

Tabel 3.3
Kepengurusan Tim Verifikasi

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	M. Muslih, S.Pd.	Ketua	Desa Wanglu Kulon
2	Ali Mahfudi, S.Pd.	Anggota 1	Desa Jatisari
3	Sri Wahyuni	Anggota 2	Desa Wanglu Wetan

Sumber: Dokumentasi UPK Kecamatan Senori 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Tim Pendanaan

Tabel 3.4
Kepengurusan Tim Pendanaan

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Nurul Yaqin	Ketua	Desa Jatisari
2	Nurlina Wati	Anggota	Desa Wanglu Kulon

Sumber: Dokumentasi UPK Kecamatan Senori 2020

e. Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Tabel 3.5
Kepengurusan UPK

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Ibnu Chamzah	Ketua	Desa Jatisari
2	Winda Yuniarnis, S.Kom.	Sekretaris	Desa Wonosari
3	Sri Winarni, S.Pd.	Bendahara	Desa Wonosari
4	Siti Masrufah	Kasir	Desa Jatisari
5	Syaifuddin	PL UPK	Desa Jatisari

Sumber: Dokumentasi UPK Kecamatan Senori 2020

3. Program yang Dijalankan oleh Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Senori

UPK melayani sektor mikro, sehingga lembaga ini mampu melayani kebutuhan keuangan masyarakat ekonomi menengah bawah yang sulit mengakses pinjaman ke perbankan. Setelah program PNPM MP berakhir, UPK hanya fokus pada kegiatan dana bergulir dan simpan pinjam. Program yang dijalankan oleh UPK Kecamatan Senori diantaranya adalah[2]:

a. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)

Simpan Pinjam Kelompok Perempuan adalah suatu program simpan pinjam khusus bagi kaum perempuan berupa dana bergulir yang disalurkan untuk usaha peningkatan kesejahteraan kaum perempuan melalui kelompok tersebut. Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) secara umum

[2] Ibnu Hamzah, *Wawancara*, Senori, 31 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengentasan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja di pedesaan.

b. Pinjaman Musiman Khusus (PMK)

Pinjaman Musiman Khusus (PMK) adalah pinjaman yang dipergunakan untuk suatu kegiatan pada musim-musim tertentu. PMK adalah program baru yang digagas oleh UPK Kecamatan Senori, karena melihat banyaknya kasus tentang kurangnya dana dalam melakukan suatu kegiatan. Contoh kegiatan yang dimaksud dalam PMK adalah pinjaman untuk keperluan hajatan di musim setelah idul fitri dan idul adha. Dimana di musim tersebut, banyak dari masyarakat yang menggelar hajatan, seperti sunatan dan nikahan. Untuk menyelenggarakan hajatan tersebut, tentunya diperlukan sejumlah dana untuk kebutuhan konsumsi, sewa peralatan, dan lainnya. Dari hajatan tersebut, akan diperoleh sejumlah uang dan berbagai pemberian dari tamu yang datang. Hasil tersebut yang nantinya akan dibayarkan ke UPK atas pinjaman PMK tersebut.

c. Dana Sosial Tahunan

Dana sosial tahunan ini dilaksanakan sekali dalam kurun waktu satu tahun, yaitu di penghujung tahun di bulan Desember. Pemberian dana sosial ini diperuntukan untuk keluarga miskin di Kecamatan Senori. Sebesar 18% dari dana Sisa Hasil Usaha (SHU) akan dibelanjakan berbagai bahan pokok yang nantinya akan dibagikan merata di 12 desa yang ada di Kecamatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Senori. UPK akan berkoordinasi dengan BKAD untuk menentukan calon penerima dana sosial tersebut. Tercatat pada akhir tahun 2019, UPK membagikan dana sosial berupa bingkisan sembako sejumlah 60 paket di 12 desa di Kecamatan Senori.

Selain dana sosial berupa sembako, UPK juga mempunyai program santunan anak yatim pada setiap bulan Ramadhan. UPK bekerjasama dengan Yayasan Kafayatul 'Aitam yang mana dana dari UPK akan diserahkan kepada yayasan tersebut selaku pengelola yayasan anak yatim. Pada tahun 2019 lalu, UPK Kecamatan Senori memberikan dana santunan sebesar Rp. 2.500.000, nominal tersebut ditetapkan UPK atas keputusan rapat bersama pengurus UPK Kecamatan Senori.

d. Pinjaman Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Pinjaman Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah serangkaian pinjaman yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan pendapatan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. Pinjaman UEP adalah salah satu produk dana bergulir yang dinilai sukses oleh UPK Kecamatan Senori dalam membantu masyarakat miskin dalam menyelesaikan masalah permodalan mereka.

4. Pelaksanaan Pinjaman UEP di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Senori

Masyarakat miskin yang mendapatkan pinjaman modal usaha melalui pinjaman UEP diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja. Muara dari peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja adalah semakin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkurangnya angka kemiskinan dan selanjutnya dapat mengarah pada kesejahteraan masyarakat. Berikut SOP pelaksanaan pinjaman UEP di UPK Kecamatan Senori:

a. Tujuan
   1) Memberikan kemudahan akses permodalan usaha, baik kepada masyarakat pemanfaat maupun kelompok usaha dan mendorong peningkatan pendapatan rumah tangga miskin
   2) Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan program
   3) Peningkatan pelayanan kepada rumah tangga miskin dalam menentukann kebutuhan ekonomi rumah tangga terkait permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat.
b. Sasaran
   1) Perseorangan yang memiliki kegiatan usaha, dalam kategori miskin dan sulit mengembangkan usahanya karena terkendala masalah modal
   2) Kelompok yang didalamnya tergabung 10 – 20 orang yang menjalankan kegiatan usaha, dalam kategori miskin, dan terkendala dalam masalah permodalan usaha
c. Persyaratan
   1) Individu
      a) Dana untuk permodalan usaha, jenis usaha tidak boleh melanggar hukum dan agama
      b) Pengajuan pinjaman maksimal Rp. 5.000.000
      c) Menyertakan jaminan berupa BPKB sepeda motor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Kelompok

a) Dana untuk permodalan usaha, jenis usaha tidak boleh melanggar hukum dan agama

b) Kelompok harus beranggotakan minimal 5 orang dan maksimal 25 orang

c) Umur kelompok terbentuk sekurang-kurangnya 4 bulan

d) Anggota kelompok pemula (1 – 2 tahun) hanya boleh mengajukan pinjaman maksimal Rp. 2.000.000

e) Anggota kelompok yang telah bergabung lebih dari dua tahun bisa mengajukan pinjaman maksimal Rp. 5.000.000

d. Alur peminjaman

Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) melalui forum MAD mengambil keputusan dan persiapan perguliran, kemudian UPK melakukan evaluasi internal untuk menilai kesiapan keuangan, dengan persyaratan sebagai berikut:

1) Harus atas sepengetahuan Kepala Desa dalam bentuk rekomendasi tertulis

2) Susunan proposal pengajuan pinjaman kelompok harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan UPK

3) Umur kelompok terbentuk sekurang-kurangnya 4 bulan

4) Dokumen pengajuan pinjaman kelompok harus dilampiri:

a) Daftar calon penerima pinjaman

b) Foto copy KTP atau identitas formal yang lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Proposal kelompok diserahkan kepada UPK setelah ditandatangani oleh Kepala Desa
6) Evaluasi proposal pinjaman oleh UPK
   a) UPK melakukan pemeriksaan kelengkapan proposal pinjaman kelompok yang diterima. Proposal pinjaman kelompok yang tidak lengkap akan diberikan catatan kekurangan dan dikembalikan kepada kelompok yang bersangkutan. Sedangkan proposal yang lengkap akan diarsip dan dicatat dalam daftar proposal pinjaman kelompok.
   b) UPK melakukan evaluasi proposal pinjman kelompok sekurang-kurangnya meliputi:
      (1) Latar belakang
      (2) Kondisi calon peminjam
      (3) Riwayat pinjaman di UPK
      (4) Rencana proposal kelompok
      (5) Hasil penilaian kelompok
7) Verifikasi oleh tim verifikasi UPK
   a) Tim verifikasi melakukan *riview* atas semua dokumen proposal pinjaman kelompok dari hasil evaluasi UPK
   b) Tim verifikasi menyusun perencanaan dan jadwal verifikasi lapangan ke semua kelompok yang mengajukan proposal pinjaman
   c) UPK mendampingi kegiatan tim verifikasi di lapangan
   d) Tim verivikasi membuat keputusan rekomendasi layak atau tidak layak untuk didanai untuk semua proposal yang telah dilakukan verifikasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Tim verifikasi membuat laporan tertulis hasil kegiatan verivikasi kepada pendanaan perguliran.

8) Keputusan pendanaan oleh tim pendanaan

a) Keputusan tim pendanaan dilakukan oleh tim pendanaan dalam forum musyawarah pendanaan perguliran dan dipertanggungjawabkan kepada BKAD dalam forum MAD

b) Musyawarah pendanaan perguliran dihadiri oleh pembina di kecamatan yaitu Camat, pengurus BKAD, tim pendanaan, UPK, TV, BP-UPK dan kelompok yang mengajukan pinjaman

c) Peran tim verifikasi dalam musyawarah pendanaan perguliran adalah melaporkan hasil kegiatan verifikasi terhadap semua proposal kelompok yang masuk dalam bentuk rekomendasi kelayakan

d) Proposal kelompok yang mendapat rekomendasi layak yang dapat dilakukan pembahasan untuk mendapatkan penetapan pendanaan

e) Tim pendanaan melakukan perengkingan terhadap kelompok yang ditetapkan untuk didanai

f) Hasil musyawarah pendanaan perguliran yang berisi daftar kelompok yang akan didanai, diumumkan kepada masyarakat oleh UPK melalui papan informasi UPK atau media lainnya.

9) Pencairan pendanaan proposal pinjaman oleh UPK

a) Berdasarkan berita acara dan hasil musyawarah pendanaan perguliran, UPK menyusun jadwal pencairan sesuai dengan pendapatan rangking.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Sebelum dilakukan pencairan dana, berkas pinjaman harus dilampiri dengan:

(1) Dokumen pengajuan proposal kelompok

(2) Hasil evaluasi UPK

(3) Hasil verifikasi dan keputusan pendanaan

(4) Surat perjanjian pinjaman dan kartu pinjaman yang telah ditandatangani antar anggota kelompok dan UPK

(5) UPK wajib mengumumkan daftar seluruh nama kelompok penerima manfaat melalui papan informasi dan media lainnya.

e. Pembinaan dan pengawasan

1) UPK berkewajiban melakukan pembinaan kepada seluruh kelompok pemanfaat baik pembinaan administratif maupun pembinaan langsung lapangan

2) Pengurus BKAD melakukan kegiatan pengawasan terhadap seluruh proses kegiatan perguliran secara langsung maupun melalui pengurus BP-UPK

3) BP-UPK berkewajiban melakukan supervisi, pemeriksaan dan pengawasan terhadap seluruh proses kegiatan perguliran dan dilaporkan kepada BKAD.

f. Penentuan jasa pinjaman

1) Besaran jasa pinjaman ditentukan berdasarkan jumlah pendapatan atau keuntungan peminjam

2) Sistem perhitungan jasa pinjaman menurun atau tetap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Penetapan jasa pinjaman bisa menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan pola syari'ah
4) Besaran pinjaman dan sistem perhitungan ditetapkan oleh BKAD melalui MAD.

g. Jangka waktu pinjaman

Jangka waktu pinjaman UEP untuk kelompok peminjam maksimal 12 bulan (1 tahun), dengan pilihan angsuran setiap bulan ataupun per 3 bulan sekali.

h. Penetapan daftar tunggu

Usulan kegiatan pinjaman yang belum didanai pinjaman UEP, dapat ditetapkan sebagai kelompok tunggu yang dilaporkan dalam daftar tunggu.

i. Penanganan masalah

Dalam kegiatan pinjaman, tentunya ada kemungkinan terjadinya risiko macet, oleh karena itu diperlukan sebuah metode dalam menangani masalah kredi macet yang kemungkinan akan terjadi, yaitu dengan cara-cara umum sebagai berikut:

1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.
2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan lembaga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana dan atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan jasa pinjaman menjadi pokok kredit baru, dan atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam lembaga.

Selain dengan cara diatas, sebelumnya akan dilakukan cara penanganan secara khusus dari UPK Kecamatan Senori. Penanganan masalah khusus tunggakan yang dilakukan yaitu dengan berkoordinasi dengan pihak kecamatan sebagai pembina, pengarah, dan penasehat sehingga tunggakan ini merupakan tanggungjawab bersama, dengan menanggung pihak-pihak terkait (Polsek, Babinkamtibmas dan Danramil/Babinsa). Prosedur yang dilakukan adalah:

1) Surat Peringatan (SP I, II, III)
2) Kunjungan oleh pihak UPK
3) Pemanggilan kelompok ke kantor Kecamatan Senori
4) Kunjungan oleh UPK bersama Babinkamtibmas dan Babinsa[3]

5. Desa yang Terdaftar pada Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Senori

Berikut daftar jumlah kelompok peminjam dana UEP yang tercatat di UPK Kecamatan Senori periode 2018 hingga 2019.

Tabel 3.6
Jumlah Kelompok Desa yang Terdaftar di UPK Kecamatan Senori

No	Nama Desa	Jumlah Kelompok	Alokasi Pinjaman UEP
1	Banyu Urip	3	Rp. 39.858.100
2	Jatisari	6	Rp. 171.406.400
3	Kaligede	5	Rp. 104.680.000
4	Katerban	1	Rp. 56.000.000
5	Leran	1	Rp. 21.000.000

[3] SOP BKAD UPK Kecamatan Senori

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Nama Desa	Jumlah Kelompok	Alokasi Pinjaman UEP
6	Medalem	6	Rp. 171.500.000
7	Rayung	3	Rp. 61.360.000
8	Sendang	21	Rp. 684.927.003
9	Sidoharjo	6	Rp. 315.000.000
10	Wanglu Kulon	1	Rp. 46.000.000
11	Wanglu Wetan	1	Rp. 42.000.000
12	Wonosari	1	Rp. 76.000.000
	Jumlah	**55**	**Rp. 1.789.731.503**

Sumber: Dokumentasi UPK Kecamatan Senori 2020

B. Gambaran Umum Desa Sendang

Gambar 3.2 Kantor Desa Sendang
Sumber: Dokumentasi oleh Peneliti 2020

1. Letak dan Kondisi Desa Sendang

Desa Sendang merupakan salah satu dari 12 desa yang ada di Kecamatan Senori Kabupaten Tuban. Desa Sendang termasuk salah satu desa yang lokasinya cukup jauh dari pusat kota Kabupaten Tuban, yaitu berjarak 65 km. Sehingga Desa Sendang termasuk desa yang masuk dalam kategori desa tertinggal. Desa Sendang memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut:

(1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lajukidul (Kecamatan Singgahan) dan Desa Weden (Kecamatan Bangilan)

(2) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanggir (Kecamatan Singgahan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wanglu Kulon (Kecamatan Senori) dan Wanglu Wetan (Kecamatan Senori)

(4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jatisari (Kecamatan Senori) dan Desa Medalem (Kecamatan Senori).

a. Luas Desa

Luas Desa Sendang adalah 652 Ha, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.7

Rincian Luas Wilayah Desa Sendang

Rincian Lahan	Luas
Lahan Sawah	214 ha
Pemukiman	257 ha
Tegal/ Ladang	49 ha
Hutan	87 ha
Lain-lain	45 ha

Sumber: Dokumentasi Desa Sendang 2019

b. Wilayah Pemerintahan

Desa Sendang terdiri dari lima dusun, kelima dusun tersebut adalah Dusun Baleono, Jati Malang, Karanganyar Timur, Karanganyar Barat, dan Sendang. Jumlah keseluruhan Desa Sendang terdiri dari atas 32 RT dan 11 RW.

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Sendang berdasarkan registrasi tercatat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.8

Jumlah Penduduk Desa Sendang

Tahun	Jumlah
2018	5.215 jiwa
2019	5.764 jiwa

Sumber: Dokumentasi Desa Sendang 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Mata Pencaharian

Warga Desa Sendang dalam memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, dengan berbagai mata pencaharian antara lain sebagai berikut:

Tabel 3.9

Pekerjaan Masyarakat Desa Sendang

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Petani	1316 orang
Buruh Tani	113 orang
Pedagang	807 orang
Karyawan Swasta	115 orang
Guru	101 orang

Sumber: Dokumentasi Desa Sendang 2019

e. Tingkat Pendidikan

Tabel 3.10

Tingkat Pendidikan di Desa Sendang

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SD	1432 orang
SLTP	992 orang
SLTA	859 orang
Strata 1	177 orang
Tidak/ Belum Sekolah	1403 orang

Sumber: Dokumentasi Desa Sendang 2019

2. Kelompok Peminjam UEP Desa Sendang di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Senori

Tabel 3.11

Kelompok Peminjam UEP Desa Sendang di UPK Kecamatan Senori Tahun 2019

No	Nama Kelompok	Ketua Kelompok	Jumlah Anggota	Pinjaman Kelompok
1	Tani Makmur	Mawadah Fitriyah	6 Orang	Rp. 30.000.000
2	Melati	Mursini	14 Orang	Rp. 67.000.000
3	Sandana	Maryam	9 Orang	Rp. 24.000.000
4	Anyelir	Hariyanto	5 Orang	Rp. 13.000.000
5	Hidayatul Ummah	Mutmainah	17 Orang	Rp. 85.000.000
6	Riz	M. Nur Wahyudin	12 Orang	Rp. 32.000.000
7	Delima	Suti	15 Orang	Rp. 72.000.000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Nama Kelompok	Ketua Kelompok	Jumlah Anggota	Pinjaman Kelompok
8	Nangka 1	Istiqomah	9 Orang	Rp. 45.000.000
9	Nangka 2	M. Mahfud Ridwan	7 Orang	Rp. 28.000.000
10	Matahari	Erni Johan	22 Orang	Rp. 76.000.000
	Jumlah		**116 Orang**	**Rp. 472.000.000**

Sumber: Dokumentasi UPK Kecamatan Senori 2019

C. Pelaksanaan Pinjaman Usaha Ekonomi Produktif pada Peningkatan Pendapatan Peminjam Perspektif *Maṣlaḥah*

1. Pelaksanaan Pinjaman Usaha Ekonomi Produktif

a. Wawancara dengan Pengurus UPK Kecamatan Senori

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ibnu Hamzah selaku ketua Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Senori, ia mengatakan bahwa untuk sekarang, UPK fokus pada pinjaman UEP, karena data peminjam setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pinjaman UEP dinilai lebih efektif berjalan untuk kategori peminjam kelompok, karena UPK lebih mudah memonitoring dan berkoordinasi dengan perwakilan ketua kelompok. Banyak dari kelompok peminjam yang mengatakan mereka sulit mengakses pinjaman ke bank karena persyaratan administratif dan usaha yang dijalankan tidak menjanjikan keuntungannya.

Selanjutnya alur pelaksanaan pinjaman UEP dilakukan berdasarkan SOP. Penyuluhan serta sosialisasi dilakukan kepada calon anggota kelompok peminjam sebelum pihak UPK menyerahkan dana kepada mereka. Pencairan dana dilakukan setelah mendapat persetujuan BKAD melalui MAD, sedangkan dana perguliran dilakukan pencairan maksimal 4 (empat) kali setiap individu. Untuk perhitungan jasa pinjaman/ margin ditentukan prosentase sebesar 1,7% untuk UPK dari hasil keuntungan setelah dikurangi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biaya kulakan setiap bulannya. Pihak UPK akan membuat proyeksi keuntungan usaha peminjam yang nantinya akan dijadikan acuan menentukan jumlah biaya jasa pinjaman. Penentuan proyeksi keuntungan mengacu pada jenis usaha dan tingkat penjualan peminjamnya, hal itu bisa diketahui melalui monitoring yang dilakukan oleh pihak UPK. UPK melakukan monitoring sekali dalam satu bulan di setiap perwakilan kelompok untuk menganalisa usaha dan tingkat keuntungan yang diperoleh si peminjam.

Sebelum pencairan dana, semua anggota kelompok harus hadir di UPK untuk sosialisasi dan pembuatan perjanjian pinjaman. Sebesar 10% dari keseluruhan dana pinjaman kelompok akan di endapkan di UPK sebagai jaminan ketika terjadi penunggakan, dengan proporsi setiap anggota berhak atas 10% dari pinjaman masing-masing. Hal itu dilakukan dengan harapan jika salah satu anggota menunggak/ macet, maka akan ditanggung bersama (tanggung renteng) dengan dana 10% tersebut. Namun pada prakteknya ketika salah satu anggota menunggak, tidak serta merta anggota yang lain merelakan uangnya untuk menutup tunggakan tersebut. Cara mengatasi masalah tunggakan tersebut secara umum dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Selain itu, UPK memiliki cara khusus untuk penanganan tunggakan yaitu dengan surat peringatan dan kunjungan ke rumah yang bersangkutan.

Pengembalian dana/ cicilan bisa dilakukan setiap bulan ataupun 3 (tiga) bulan sekali. Sistem pengembalian dana/ cicilan kelompok di UPK dengan cara anggota menyetorkan sejumlah uang cicilan yang sudah ditetapkan kepada ketua kelompok, selanjutnya ketua kelompok akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyetorkannya ke UPK. Terdapat beberapa kelompok di Desa Sendang yang mengalami permasalahan dalam hal pengembalian dananya. Masalah berkaitan dengan penyalahgunaan atas uang yang telah dibayarkan oleh anggota kelompoknya. Uang tersebut digunakan secara pribadi oleh ketua kelompok, yang akibatnya pengembalian dana ke UPK macet. Ketika dijumpai permasalahan tersebut maka, kepengurusan atas kelompok tersebut harus dirombak untuk pada akhirnya kelompok tersebut tetap aktif melakukan kewajibannya. Masalah lain yaitu ada pada anggota kelompok yang dalam melakukan pembayaran cicilan mengalami penunggakan.

Untuk permasalahan penyalahgunaan uang, penyelesaian masalahnya akan menggunakan pendekatan kekeluargaan, namun jika tidak berhasil akan diselesaikan dengan jalur hukum. Bapak Ibnu Hamzah mengatakan sudah pernah terjadi kasus penyelesaian dengan kunjungan pihak UPK bersama kepolisian dan babinkamtibmas Desa Sendang untuk menegaskan kewajiban yang harus dibayarkannya. Untuk permasalahan anggota macet, pihak UPK menggunakan sistem dengan *rescheduling* dan lainnya serta cara khusus dari UPK. Jika cara-cara tersebut tidak juga berhasil, maka jalan terakhir adalah dengan memanfaatkan dana sebesar 10% yang sebelumnya telah diendapkan di UPK sebagai jaminan. Secara rinci ia menjelaskan untuk kredit macet biasanya dikarenakan toko mereka sedang sepi dan tidak memiliki modal lagi untuk kulakan dan uang hasil usaha digunakan untuk kebutuhan konsumtif[4].

[4] Ibnu Hamzah, *Wawancara*, Senori, 31 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Total alokasi dana pinjaman UEP di Desa Sendang tercatat per 31 Desember 2019 adalah Rp. 684.927.003[5].

b. Wawancara dengan Kepala Desa Sendang[6]

1) Wawancara Tentang Pekerjaan Masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mohibin selaku Kepala Desa Sendang, ia mengatakan bahwa mata pecaharian warga bermacam-macam, seperti petani, buruh tani, pedagang, karyawan swasta, dan guru, tetapi mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Sendang adalah petani. Jika para petani hanya mengandalkan hasil panen (dua kali dalam setahun), mereka kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Karena hasil panen yang tidak begitu menjanjikan disebabkan sering terjadi gagal panen yang karena kurangnya curah hujan dan banyak hama menyerang. Karena hal tersebut, mereka harus lebih banyak mengeluarkan uang untuk membiayai kebutuhan pertaniannya, dan tidak sedikit dari mereka yang kesulitan mendapatkan dana tersebut, akhirnya hasil panen tidak memuaskan. Selain itu, jarak antara panen pertama dan kedua juga cukup lama, yaitu berkisar 5 bulan. Jadi hasil panen pertama tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan dikala menjelang panen kedua.

Ketika dilakukan observasi kepada sebagian besar masyarakat Desa Sendang, memang benar pekerjaan yang paling dominan adalah petani. Saat peneliti akan melakukan wawancara di pagi hari dengan beberapa peminjam UEP, banyak dari mereka yang tidak ada di rumah

[5] Pembukuan Tahunan 2019 UPK Kecamatan Senori.
[6] Mohibin,*Wawancara*, Senori, 21 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena sedang pergi ke sawah. Salah satunya adalah Ibu Sukarti, ia pergi ke sawah setiap pagi dan pulang ketika menjelang waktu sholat dhuhur. Ia bekerja sebagai petani dan membuka toko sembako dengan alasan hasil panen yang di dapat tidak bisa untuk mencukupi kebutuhannya.

2) Wawancara Tentang Surat Rekomendasi dan Proposal Pengajuan Pinjaman

Berdasarkan wawancara lebih lanjut dengan Bapak Mohibin ia menuturkan dalam menentukan surat rekomendasi untuk proposal calon peminjam yang meminjam di UPK berdasarkan Musyawarah Antar Desa (MAD). Secara detailnya ia tidak begitu memahami bagaimana alurnya, karena menurutnya jika calon peminjam sudah mengajukan proposal ke Kantor Kelurahan berarti mereka secara administratif sudah disetujui oleh pihak UPK.

Namun ia menyatakan lebih lanjut surat rekomendasi untuk proposal pengajuan pinjaman kepada UPK hanya menekankan pada tiga aspek utama, yaitu:

a) Kebenaran bahwa calon anggota kelompok adalah warga Desa Sendang
b) Dana pinjaman UEP tersebut harus dipergunakan untuk kegiatan usaha yang tidak menyalahi aturan agama dan hukum
c) Kesiapan calon anggota kelompok dalam perjanjian dan pembayaran.

3) Wawancara Tentang Sosialisasi dan Monitoring Pinjaman UEP

Dalam kaitannya tentang sosialisasi, berdasarkan wawancara dengan Bapak Mohibin mengatakan bahwa, sosialisasi tentang pinjaman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UEP dilakukan di tingkat Kecamatan melalui Musyawarah Antar Desa (MAD), kalau dari pihak desa tidak ada sosialisasi tentang pinjaman tersebut karna memang desa tidak mempunyai tim untuk sosialisasi, lembaga UPK itu sendiri yang memberikan sosialisasi serta memonitoring masyarakat, adapun aparat desa sifatnya hanya membantu mensukseskan program tersebut. Namun, pada saat akan dilakukan pencairan dana pinjaman, anggota kelompok diberikan sosialisasi tentang bagaimana mengelola dana tersebut untuk kebutuhan modal usaha. Selain itu, UPK juga melakukan monitoring setiap bulan di setiap kelompok.

UPK berkoordinasi dengan desa lebih pada kegiatan sosial seperti bantuan sembako dan santunan anak yatim. Bapak Mohibin menyatakan untuk kegiatan sosial pihak desa juga ikut terlibat dalam menentukan calon penerima sembako dan menghadiri acara santunan anak yatim.

c. Wawancara dengan Peminjam UEP

1) Wawancara Tentang Persyaratan dan Alur Pinjaman

Dari segi persyaratan dinilai cukup mudah, dengan tidak menggunakan jaminan dalam mengajukan pinjaman**.** Berdasarkan wawancara dengan sebagian besar anggota peminjam menyatakan bahwa, persyaratan untuk mengajukan pinjaman tanpa harus ada anggunan atau jaminan menjadi alasan utama melakukan peminjaman. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Musringah, salah satu anggota peminjam kelompok Anyelir secara mendalam ia mengatakan bahwa, persyaratan memang tidak menyulitkan, ada beberapa persayaratan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajukan proposal pinjaman UEP di UPK Kecamatan Senori antara lain[7]:

a) Membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat yang terdiri dari lima orang atau lebih dan setiap anggota kelompok harus memiki sebuah usaha
b) Meminta surat persetujuan atau rekomendasi untuk meminjam pinjaman UEP dari kepala Desa
c) Mengisi blangko proposal yang disediakan oleh UPK
d) Mendaftarakan dan menyerahkan proposal yang telah ditandatangani oleh kepala desa kepada UPK, kemudian menunggu keputusan pencairan dana dari UPK.

Sama halnya dengan Ibu Musringah, hasil wawancara dengan Ibu Siti Aminah anggota kelompok Hidayatul Ummah ia juga mengatakan persyaratan untuk mengajukan pinjaman UEP tidaklah memberatkan/ sulit. Terkait pembayaran cicilan kelompok Hidayatul Ummah menyetorkan ke UPK setiap bulan yang diwakilkan oleh ketua kelompok, jumlah cicilan meliputi cicilan pokok ditambah dengan jasa pinjaman. Jasa pinjaman ditentukan dari perkiraan keuntungan setelah dikurangi biaya kulakan yang diperoleh peminjamnya, UPK mendapat bagian sebesar 1,7% dari perkiraan pendapatan yang sebelumnya telah ditentukan pihak UPK. Tetapi, walaupun keuntungan yang diperoleh tidak sesuai perkiraan yang dibuat UPK, peminjam tetap harus membayar cicilan sesuai ketentuan di awal.

[7] Musringah, *Wawancara*, Senori, 01 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lebih lanjut Ibu Siti Aminah memberikan contoh, misalnya di awal ditemukan perkiraan keuntungan yang sudah dikurangi biaya kulakan yang diperoleh peminjam selama satu bulan sebesar Rp. 1.500.000, maka cicilan yang harus dibayar setiap bulan adalah cicilan pokok ditambah 1,7% dari Rp. 1.500.000. Namun, ketika keuntungan yang diperoleh peminjam tidak mencapai Rp. 1.500.000, kita harus tetap membayar cicilan pokok ditambah 1,7% dari Rp. 1.500.000. Lebih lanjut bisa diinterpretasikan skema cicilan per bulannya adalah dengan pinjaman Rp. 5.000.000 maka yang perlu dibayarkan setiap bulannya adalah uang pokok Rp. 416.666 (Rp. 5.000.000 : 12 bulan) ditambah dengan biaya jasa Rp. 25.500 (Rp. 1.500.000 x 1,7%), maka ditemukan cicilan per bulannya adalah Rp. 442.666. Ia menyatakan tidak keberatan jika harus membayar 1,7% dari keuntungan yang diperolehnya, karena dengan pinjaman UEP tersebut ia bisa mengembangkan usahanya dan pendapatan yang diperoleh pun meningkat[8].

Hasil wawancara dengan anggota kelompok peminjam lainnya pun memberikan jawaban yang sama terkait persyaratan dan alur pinjaman. Namun, untuk biaya jasa pinjaman yang ditentukan UPK, ada beberapa anggota yang mengatakan mereka terbebani atas jumlah proyeksi keuntungan yang ditentukan pihak UPK. Pasalnya, mereka yang mengatakan hal tersebut adalah anggota yang tidak mengalami peningkatan pendapatan dan melakukan penyalahgunaan atas dana

[8] Siti Aminah, *Wawancara*, Senori, 20 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pinjaman UEP, yaitu Ibu Muslimatus, Hartatik, Watini, Sumiati, Bapak Sukron dan Sumaji.

2) Wawancara Tentang Sosialisasi dan Monitoring Pinjaman UEP

Berdasrakan hasil wawancara dengan sebagian besar anggota peminjam, menyatakan bahwa sosialisasi dari pihak UPK hanya dilakukan sekali ketika awal dana akan dicairkan, untuk pencairan dana kedua dan seterusnya tidak ada sosialisasi lagi kepada peminjam. Ketika dilakukan wawancara dengan Ibu Pasih, salah satu anggota peminjam kelompok Hidayatul Ummah, ia mengatakan hanya sekali mengikuti sosialisasi di awal periode pencairan dana dan selanjutnya tidak ada perintah untuk mengikuti sosialisasi lagi. Sedangkan monitoring dilakukan setiap bulan, tetapi tidak ke semua peminjam. Monitoring yang dilakukan UPK biasanya menanyakan tentang kegiatan usahanya, seperti kendala yang dialami dan tingkat keuntungan yang diperoleh[9].

2. Penggunaan Dana Pinjaman dan Peningkatan Pendapatan

a. Wawancara dengan Ketua Kelompok

(1) Berdasarkan wawancara dengan Ibu Mutmainah selaku ketua kelompok Hidayatul Ummah, ia mengatakan tidak sepenuhnya mengetahui dana pinjaman digunakan untuk keperluan apa oleh anggotanya. Ibu Mutmainah mengatakan tingkat pendidikan sebagian besar anggota kelompoknya hanya sampai pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), karena sekolah bisa dilakukan ketika kebutuhan sehari-hari sudah terpenuhi. Sedangkan keluarganya berasal

[9] Pasih, *Wawancara*, Senori, 01 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari kategori keluarga "tidak punya", jadi hanya sanggup bersekolah sampai tingkat SD dan SMP.

Di awal perjanjian, dana akan digunakan untuk modal usaha, yang terpenting adalah ketika jatuh tempo pengembalian dana anggotanya membayar tepat waktu. Terkait penggunaan dana memang banyak diketahui digunakan untuk modal usaha, namun lebih lanjut ia tidak tahu secara detailnya. Adanya pinjaman UEP menurut Ibu Mutmainah, secara umum memberikan dampak baik untuk perekonomian anggotanya. Awal sebelum melakukan pinjaman, banyak dari anggotanya sering mengeluhkan barang dagangannya semakin berkurang, dan tidak cukup modal untuk kulakan lebih banyak yang dikarenakan uang hasil penjualan digunakan langsung untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah bergabung kelompok dan ikut serta memanfaatkan pinjaman UEP, terlihat banyak dari anggota sering bercerita ketika pertemuan pengajian, salah satunya Ibu Pasih yang mengatakan bisa membeli etalase barang untuk tokonya[10].

(2) Hasil wawancara dengan Bapak M. Mahfud Ridwan selaku ketua kelompok peminjam Nangka 2, ia mengatakan dana yang diperoleh dari pinjaman UEP digunakan untuk modal usaha. Untuk anggota kelompok yang terdiri dari 6 orang adalah tetangga yang tak jauh dari rumahnya. Seperti Bapak Suud dan Ibu Salamah yang dana pinjamannya digunakan untuk modal usaha berdagang sayur keliling, Ibu Sukarti dan Kartini berdagang sembako, sedangkan Bapak Munawar berjualan bakso. Terkait pendapatan para anggotanya, bapak M. Mahfud tidak tahu pasti apakah

[10] Mutmainah, *Wawancara*, Senori, 31 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalami peningkatan atau sebaliknya. Namun, secara umum mereka bisa terus kulakan. Sebelum menerima pinjaman UEP, Bapak Suud sempat tidak bisa berjualan karena tidak adanya modal untuk kulakan[11]. Sama halnya dengan Ibu Mutmainah, Bapak Mahfud juga mengatakan hal serupa terkait tingkat pendidikan anggota kelompoknya. Ia menuturkan bahwa ia sendiri hanya sekolah sampai tingkat SD, karena orang tua tidak sanggup membiayai untuk melanjutkan di tingkat SMP.

b. Wawancara dengan Anggota Kelompok

a) Wawancara Tentang Pengelolaan Dana Pinjaman UEP

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Narju Nikmah anggota kelompok Matahari, ia memanfaatkan pinjaman UEP untuk membuka usaha berdagang penyetan ketika sore hingga malam hari. Ia memutuskan untuk bergabung dengan kelompok Matahari untuk selanjutnya memanfaatkan pinjaman UEP yang digalakan oleh UPK. Sementara, untuk mengajukan pinjaman di bank cukup sulit dan harus membuat rancangan usaha yang dinilai cukup ribet menurut Ibu Narju Nikmah[12].

Selain Ibu Narju Nikmah, anggota kelompok lain seperti Ibu Siti Aminah, Maryam, Nadhiroh, Kartini, Sukarti, Salamah, Bapak Suud, dan Bapak Munawar juga memanfaatkan dana pinjaman UEP untuk keperluan modal usaha mereka. Karena motif setiap individu berbeda antara satu dengan lainnya, ada juga beberapa anggota yang peneliti wawancara menyatakan dana pinjaman UEP tidak sepenuhnya digunakan

[11] M. Mahfud Ridwan, *Wawancara*, Senori, 31 Januari 2020.
[12] Narju Nikmah, *Wawancara*, Senori, 01 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk kegiatan usaha. Contohnya Ibu Kanipah ia menyatakan pada pencairan dana kedua, ia mempergunakan dana tersebut untuk biaya rumah sakit suaminya. Kejadian serupa juga terjadi pada Ibu Wartini, ia meminjam dana UEP untuk keperluan pembelian semen dan pembuatan *septic tank* di rumahnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumaji, ia mengatakan pada awal pengajuan pinjaman UEP memang tujuannya untuk menggarap sawahnya dengan membelikan pupuk dan pestisida. Namun setelah dana dicairkan, dana tersebut tidak digunakan sebagaimana tujuan awal peminjaman. Karena saat dana telah dicairkan, biaya sekolah anaknya menuntut ia untuk memperoleh dana demi keberlangsungan sekolah anakanya. Maka sebagian dana pinjaman UEP digunakan untuk kebutuhan tersebut dan sebagian lagi untuk pembelian pupuk[13].

b) Wawancara Tentang Peningkatan Pendapatan

(1) Hasil wawancara dengan Ibu Narju Nikmah, anggota kelompok Matahari, mengatakan jika ia hanya mengandalkan hasil panen sawahnya, akan sulit memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Yangmana suami dari Ibu Narju Nikmah bekerja sebagai petani sewa lahan dan hasil panen harus dibagi dengan pemilik lahan, jadi ia memutuskan untuk berjualan lauk penyetan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pinjaman UEP menurut Ibu Narju sangat membantunya dalam menjalankan usahanya tersebut. Dengan adanya pinjaman UEP

[13] Sumaji, *Wawancara*, Senori, 01 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebesar Rp. 2.000.000, ia bisa membeli keperluan berjualan seperti meja, kursi, alat penggorengan besar, dan lainnya. Dari tambahan modal sebesar Rp. 2.000.000, Ibu Narju bisa memperoleh penghasilan sebesar Rp. 1.000.000 setiap hari/ setiap berjualan[14].

(2) Berdasarkan wawancara dengan Bapak Munawar sebagai anggota kelompok Nangka 2, ia mengatakan setelah dana pinjaman UEP dicairkan ia bisa memproduksi bakso lebih banyak, karena banyak peluang konsumen yang datang. Dari berjualan bakso tersebut diperoleh hasil penjualan sekitar Rp. 500.000 per hari. Ia bersyukur karena tau adanya pinjaman UEP yang mudah diakses untuk kalangan menengah ke bawah. Bapak Munawar mengatakan pendapatannya sekarang jauh lebih baik dari sebelumnya, karena ia bisa menambah jumlah produksi baksonya. Pendapatan yang diperoleh per hari berkisar antara Rp. 800.000[15].

(3) Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Ibu Siti Aminah anggota kelompok peminjam Hidayatul Ummah, berdasarkan wawancara ia mengatakan bisa menambah jenis usahanya karena adanya pinjaman UEP tersebut. Sudah sejak lama ia ingin mengembangkan usahanya dengan menambah berjualan kopi untuk kalangan orang tua. Karena sering ada bapak-bapak yang nongkrong di sebelah tokonya. Namun, untuk merealisasikannya Ibu Siti Aminah perlu membeli beberapa meja, kursi, dan gelas kopi untuk kebutuhan

[14] Narju Nikmah, *Wawancara*, Senori, 01 Februari 2020.
[15] Munawar, *Wawancara*, Senori, 20 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warung kopinya. Ia tidak membutuhkan sewa lahan karena warung kopi tersebut berada di dalam toko yang sebelumnya sudah beroperasi. Setelah berjualan kopi dari hasil pinjaman UEP, ia bisa meningkatkan pendapatannya. Ia mengatakan sebelumnya sehari hanya ada sekitar 10 – 15 pembeli di tokonya, sekarang jauh lebih ramai terlebih jika malam hari banyak yang membeli kopi dan rokok. Pendapatannya pun bertambah, sebelum berjualan kopi hanya sekitar Rp. 150.000 per hari, sekarang bisa mencapai Rp. 350.000 per hari[16].

(4) Ibu Musringah adalah seorang janda yangmana ia harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia menjalankan usaha berjualan sayur keliling. Ibu Musringah mengatakan bahwa ia sudah pernah mengajukan pinjaman di bank, namun di tolak dengan alasan usaha yang akan dijalankan tidak memiliki keuntungan yang menjanjikan. Lalu ia bergabung dengan kelompok pinjaman UEP untuk memulai usaha tersebut. Dari hasil pinjaman UEP Ibu Musringah bisa memenuhi kebutuhannya dengan rata-rata pendapatan Rp. 850.000 per hari[17].

(5) Seperti halnya Ibu Musringah, Ibu Mukarromah juga seorang janda. Namun Ibu Mukarromah dulu sudah sempat berdagang sayur, namun ketika suaminya sakit ia beralih jualan gorengan di rumah karena harus menjaga suami yang sakit, namun pendapatannya hanya Rp. 100.000 per hari dan banyak dagangan yang tersisa. Akhirnya ia

[16] Siti Aminah, *Wawancara*, Senori, 20 Februari 2020.
[17] Musringah, *Wawancara*, Senori, 01 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali jualan sayur keliling dengan melakukan pinjaman UEP. Karena sudah memiliki pelanggan tetap di masa lalu, pendapatan yang diperoleh pun cukup tinggi yaitu berkisar Rp. 900.000 per harinya[18].

(6) Berdasarkan wawancara dengan Ibu Maryam ketua kelompok Sandana ia mengatakan bahwa, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Ibu Maryam hanya menunggu penghasilan dari suami yang bekerja sebagai buruh tani, tetapi terkadang seharian tidak ada pekerjaan karena tidak ada yang membutuhkan jasanya, sehingga pendapatan suami pun tidak menentu. Untuk dapat membantu pendapatan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, Ibu Maryam mencoba untuk membuka usaha dagang sayur keliling dengan mengajukan pinjaman UEP melalui kelompok Sandana di UPK Kecamatan Senori, sebesar Rp. 2.000.000, dari modal tersebut Ibu Maryam membelanjakannya ke pasar lalu menjualnya kembali dengan keliling desa, dari jualan sayur keliling tersebut pendapatkan yang diperoleh berkisar Rp. 800.000 per hari tiap kali keliling[19].

(7) Hasil wawancara dengan Ibu Kartini yangmana ia menjalankan usaha toko berjualan sembako dan kebutuhan rumah tangga. Ibu Kartini mengatakan, karena uang hasil jualan dan uang pribadi masih bercampur, suatu ketika ia tidak lagi mampu kulakan karena pendapatan dari hasil usahanya sudah habis digunakan untuk kebutuhan lainnya. Yang pada awalnya pendapatan per harinya hanya

[18] Mukarromah, *Wawancara*, Senori, 21 Februari 2020.
[19] Maryam, *Wawancara*, Senori, 21 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekitar Rp. 170.000 karena barang yang diperjualbelikan tidak banyak. Namun setelah dapat pinjaman UEP, ia menambah jumlah barang dagangannya dan menyisihkan pendapatan hasil usaha yang nantinya akan digunakan untuk kulakan lagi. Dan pendapatannya pun mengalami peningkatan hingga Rp. 250.000 per hari[20].

(8) Ibu Sukarti yang tergabung di kelompok peminjam Nangka 2, juga menjalankan usaha toko sembako. Ia menyatakan pendapatan awal sebelum pinjaman UEP rata-rata Rp. 150.000 meningkat menjadi Rp. 250.000 per harinya. Dana pinjaman UEP tersebut ia gunakan untuk menambah barang dagangan yang perputarannya cepat, seperti gas elpigi, air minum, telor, mie, dan minyak. Biasanya di pagi hingga siang hari menjelang dhuhur ia di sawah, tokonya dijaga anaknya yang sudah tidak bersekolah karena alasan biaya[21].

(9) Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nadhiroh sebagai anggota kelompok peminjam Matahari, ia menyatakan dengan pinjaman UEP bisa membeli gerobak untuk berjualan es. Setelah pembelian gerobak, ia bisa berjualan keliling, karena sebelumnya hanya berjualan di depan rumah yangmana tidak banyak pembeli yang datang karena lokasi rumah yang jauh dari jalan raya. Selain untuk pembelian gerobak, dana pinjaman UEP juga digunakan untuk menambah jumlah kulakan kebutuhan penjualan es dan pembelian kulkas kecil untuk pembuatan es batu sendiri karena sebelumnya Ibu Nadhiroh

[20] Kartini, *Wawancara*, Senori, 31 Januari 2020.
[21] Sukarti, *Wawancara*, Senori, 31 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membeli es batu di tetangganya. Dengan memiliki kulkas sendiri akan menekan biaya pembelian bahan pokok yang kemudian bisa meningkatkan pendapatan. Ibu Nadhiroh menyatakan pendapatan yang diperoleh ketika berjualan di rumah hanya berkisar Rp. 175.000 per hari, setalah memiliki gerobak dan memutuskan untuk berdagang keliling, pendapatannya cukup mengalami peningkatan dibanding ketika berjualan di rumah, yaitu rata-rata Rp. 500.000 per hari[22].

(10) Ibu Mawadah mengatakan dengan adanya pinjaman UEP dapat membantu ia dalam mengembangkan usahanya memproduksi tahu dan tempe. Yangmana dari pendapatan usahanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. Sebelumnya ia hanya memiliki satu rak kecil untuk tempat fermentasi tempe, sehingga jumlah produksinya terbatas dan pendapatannya pun pas-pasan. Dengan adanya pinjaman UEP, ia memanfaatkan untuk membeli 3 rak dan beberapa wadah panci/ wajan besar. Ibu Mawadah menjelaskan bahwa pendapatannya mulai meningkat seiring dengan ditambahnya jumlah produksi tempe tahu. Sebelum mendapat tambahan modal dari pinjaman UEP pendapatan per harinya berkisar Rp. 400.000, namun setelah peminjaman meningkat hingga Rp. 600.000 per hari[23].

(11) Berdasarkan wawancara dengan Ibu Umyaroh anggota peminjam kelompok Matahari ia mengatakan bahwa, pinjaman UEP sebesar Rp. 2.000.000 digunakan untuk tambahan modal berjualan nasi dan mie

[22] Nadhiroh, *Wawancara*, Senori, 20 Februari 2020.
[23] Mawadah, *Wawancara*, Senori, 21 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

goreng. Pendapatan suaminya tidak menentu sebagai buruh tani, sedangkan kebutuhan datang setiap harinya. Hal itu mendorong Ibu Umyaroh untuk melakukan pinjaman UEP dengan bergabung dengan kelompok Matahari. Dari usaha jualan nasi dan mie goreng yang dilakukan ibu Umyaroh pendapatan yang diperoleh rata-rata sebesar Rp. 900.000, per/hari, dari pendapatan tersebut ia gunakan untuk melanjutkan usahanya dan memenuhi kebutuhan harian keluarga yang sebelumnya hanya mengandalkan penghasilan dari suaminya[24].

(12) Berdasarkan wawancara dengan Ibu Kasminah anggota peminjam kelompok Riz ia mengatakan bahwa, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari hanya menunggu penghasilan dari suami yang bekerja sebagai pedagang ikan di pasar, tetapi terkadang hanya sedikit bahkan tidak memperoleh ikan dari nelayan untuk dijual kembali, sehingga pendapatan suami pun tidak menentu. Untuk dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga, Ibu Kasminah mencoba untuk dagang sayur dengan mengajukan pinjaman UEP di UPK Kecamatan Senori sebesar Rp. 2.000.000, dari pinjaman tersebut Ibu Kasminah membelanjakannya ke pasar lalu menjualnya kembali, dari jualan sayur tersebut pendapatkan Ibu Kasminah rata-rata sebesar Rp. 700.000, per/hari[25].

(13) Peryataan yang sama juga dikemukakan oleh Ibu Rasbingah anggota peminjam kelompok Delima, berdasarkan wawancara dengan

[24] Umyaroh, *Wawancara*, Senori, 28 Februari 2020.
[25] Kasminah, *Wawancara*, Senori, 27 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibu Rasbingah mengatakan bahwa, dalam kesehariannya ia hanya menunggu pendapatan hasil kerja suaminya sebagai buruh pasar/ kuli panggul. Sedangkan Ibu Rasbingah dirumah, berjualan gorengan yang pendapatannya sehari hanya sekitar Rp. 150.000. Pinjaman UEP digunakan untuk mengembangkan usahanya dengan berjualan nasi (warteg). Sebelumnya, Ibu Rasbingah berjualan gorengan di dalam rumah dalam artian tidak memiliki toko. Setelah pencairan dana pinjaman UEP sebesar Rp. 5.000.000, dana tersebut digunakan untuk membeli keprluan untuk membuka warung. Pendapatan yang diperoleh Ibu Rasbingah tentunya mengalami peningkatan, ia mengatakan setelah membuka warung makan tersebut pendapatan per harinya mencapai rata-rata sebesar Rp. 1.000.000[26].

(14) Berdasarkan wawancara dengan Ibu Laili Mufidah, ia mengatakan hasil panen yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Sawahnya jauh dari aliran air, sehingga tanamannya sering kekurangan air yang mengakibatkan hasil panen tidak memuaskan. Ibu Laili Mufidah pernah mengajukan pinjaman di koperasi untuk kebutuhan permodalan usaha, namun persyaratannya susah, jadi ia memutuskan untuk membatalkan pengajuan pinjaman tersebut. Akhirnya ia bergabung dengan kelompok pinjaman UEP untuk mendapatkan pinjaman modal usaha karena persyaratan yang diminta UPK tidak menyulitkan peminjam. Setelah dana pinjaman cair, Ibu Laili Mufidah memanfaatkan dana tersebut untuk membeli

[26] Rasbingah, *Wawancara*, Senori, 27 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan berjualan lontong dan beberapa lauk di pasar. Ibu Laili Mufidah tidak perlu menyewa tempat, karena ia berjualan hanya membawa satu meja kecil dan beberapa ember untuk tempat lontong dan bahan lainnya. Pendapatan yang diperoleh Ibu Laili Mufidah rata-rata Rp. 450.000 setiap jualan[27].

(15) Hasil wawanacara dengan Bapak Agus, ia mengatakan usaha warung kopi yang ia jalankan mengalami peningkatan pendapatan. Sebelumnya warung kopi Bapak Agus tidak dipasangi wifi, sehingga tidak begitu banyak pembeli yang datang, pendapatan per harinya rata-rata Rp. 150.000. Bapak Agus memutuskan untuk ikut melakukan pinjaman di UPK Kecamatan Senori guna mengembangkan usahanya dengan pemasangan wifi. Ternyata setelah pemasangan wifi, jumlah pembeli dari hari ke hari kian bertambah, begitupun dengan pendapatan yang diperoleh bisa mencapai Rp. 450.000 per malam[28].

(16) Wawancara dengan Ibu Nur Asih anggota peminjam kelompok peminjam Sandana, ia menjalankan usaha dengan membuat roti serta kue, tetapi pembuatan kue dilakukan pada saat ada pesanan saja, pendapatan tiap pesanan rata-rata sebesar Rp. 250.000, namun terkadang ia kehilangan pelanggan karena banyaknya pesanan yang bersifat musiman, yang tentu tidak bisa diterima semua pesanan tersebut. Dalam upaya mengembangkan usahanya, Ibu Nur Asih

[27] Laili Mufidah, *Wawancara*, Senori, 27 Februari 2020.
[28] Agus, *Wawancara*, Senori, 21 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajukan pinjaman UEP ke UPK Kecamatan Senori melalui kelompok Sandana. Setelah pencairan dana pinjaman tersebut, Ibu Nur Asih tidak hanya menunggu adanya pesanan pembuatan roti dan kue, tetapi ia mampu membuat roti dan kue untuk dijual dan titipkan diwarung, dari tiap kali pembuatan kue Ibu Nur Asih memperoleh pendapatan rata-rata sebesar Rp. 450.000 tiap kali pembuatan[29].

(17) Ibu Siti Fatimah adalah seorang janda yang hidup bersama kedua anaknya yang masih bersekolah, ia bekerja sebagai buruh tani yangmana penghasilan yang diperoleh tidak menentu. Ia mengatakan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup apalagi masih harus membayar biaya sekolah kedua anaknya. Ibu Siti Fatimah ikut bergabung dengan kelompok Sandana untuk melakukan pinjaman UEP di UPK Kecamatan Senori. Dana tersebut ia gunakan untuk modal usaha berjualan sosis di sekolah ketika pagi hari dan di TPA ketika sore hari. Pendapatan yang diperoleh Ibu Siti Fatimah rata-rata Rp. 300.000 per hari[30].

(18) Wawancara dengan Ibu Aslihatul, ia mengatakan bahwa usahanya ternak lele cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun, Ibu Aslihatul mendapati sebuah musibah, lele ternakannya sebanyak 2 (dua) kolam yang kira-kira berjumlah 2.000 ekor tiba-tiba mati dan hanya tersisa sekitar 20 ekor yang masih hidup. Ibu Aslihatul mengatakan kematian lele tersebut dikarenakan sebuah penyakit yang

[29] Nur Asih, *Wawancara*, Senori, 28 Februari 2020.
[30] Siti Fatimah, *Wawancara*, Senori, 20 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebabkan kurang terawatnya kebersihan kolam. Dikarenakan musibah tersebut, Ibu Aslihatul kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan suaminya hanya sebagai buruh tani. Ibu Aslihatul memanfaatkan pinjaman UEP untuk pembelian bibit lele, pakan, alat pembersih kolam, serta menambah 1 (satu) kolam lagi. Pendapatan yang diperoleh Ibu Aslihatul dari dua kolam lele rata-rata Rp. 3.500.000, setelah menambah satu kolam lagi melalui pinjaman modal UEP hasil panen yang diperoleh dari tiga kolam sekitar Rp. 5.500.000[31].

(19) Hasil wawancara dengan Bapak Mukhayanto diketahui bahwa pendapatan atas usaha yang dijalankan tidak mengalami kenaikan dengan adanya pinjaman UEP. Diawal wawancara ia mengatakan pendapatannya tidak naik/ bertambah karena stok barang di tokonya kurang lengkap yang menyebabkan tokonya sepi. Setelah wawancara lebih mendalam, Bapak Mukhayanto mengatakan dana pinjaman UEP ia gunakan untuk pembelian televisi dan parabola[32].

(20) Hasil wawancara dengan Ibu Sumiati juga diketahui bahwa ia menyalahgunaan manfaat dari pinjaman UEP untuk keperluan konsumtif pembelian almari[33].

(21) Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ahmad Naim, benar bahwa dana pinjaman UEP digunakan untuk mengembangkan usahanya dalam pembuatan kerupuk. Namun dana tersebut tidak

[31] Aslihatul, *Wawancara*, Senori, 20 Februari 2020.
[32] Mukhayanto, *Wawancara*, Senori, 28 Februari 2020.
[33] Sumiati, *Wawancara*, Senori, 20 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepenuhnya digunakan untuk keperluan usahanya. Sebagian ia gunakan untuk membeli beberapa genteng dan semen untuk perbaikan rumah. Walaupun demikian, pendapatan yang diperoleh Bapak Ahmad Naim mengalami kenaikan karena jumlah produksi kerupuk lebih variatif dengan adanya alat pencetak kerupuk baru yang ia beli dengan dana pinjaman UEP tersebut. Sebelum pembelian alat cetak baru, Bapak Ahmad Naim mengatakan pendapatan per harinya berkisar Rp. 250.000, setalah menambah alat baru pendapatannya Rp. 400.000 per hari[34].

(22) Wawancara dengan Bapak Ropin mengatakan bahwa dana pinjaman UEP ia gunakan untuk mengembangkan usaha istrinya berjualan bawang merah. Dana tersebut digunakan untuk menambah kulakan bawang merah dengan beberapa kualitas berbeda. Pendapatan awal yang diperoleh sebelum mengembangkan usahanya rata-rata Rp. 300.000 setiap berjualan, setelah mengembangkan usaha tersebut pendapatannya naik berkisar Rp. 500.000 setiap kali berjualan. Sebelumnya Bapak Ropin merantau di Jakarta bekerja sebagai buruh pabrik, namun ia memutuskan untuk pulang dan bekerja di rumah setelah istrinya meninggal[35].

(23) Hasil wawancara dengan Ibu Ani, bahwa dana pinjaman UEP ia gunakan untuk membeli etalase barang dan menambah stok barang dagangannya. Sebelumnya Ibu Ani hanya berjualan sembako, lalu ia

[34] Ahmad Naim, *Wawancara*, Senori, 24 Februari 2020.
[35] Ropin, *Wawancara*, Senori, 24 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merangkap dengan berjualan obat-obat pertanian. Pendapatannya mengalami kenaikan yang sebelumnya hanya berkisar Rp. 150.000 per hari, setelah peminjaman bisa mencapai rata-rata Rp. 500.000 per hari[36].

(24) Berdasarkan wawancara dengan Ibu Hartatik, ia mengatakan usaha yang dijalankan tidak berjalan dengan baik. Ibu Hartatik berjualan pakaian secara online, ia merupakan *dropshipper* dari beberapa penjual online. Banyak barang yang sampai di tangan pembeli ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang disebutkan dalam pemasaran produknya, yang mengakibatkan banyak pembeli yang kecewa dan meminta pengembalian dana. Pendapatan yang ia peroleh tidak mengalami kenaikan, bahkan menurun yang rata-rata Rp. 250.000 menjadi Rp. 130.000[37].

(25) Ada beberapa peminjam yang menyatakan pendapatan antara sebelum dan setelah melakukan pinjaman UEP tetap tidak mengalami peningkatan pendapatan, karena jualannya sepi. Seperti pernyataan Ibu Khoridatul, ia mengatakan pendapatannya tidak ditentukan adanya modal, pendapatannya lebih bergantung pada adanya toko pesaing lain yang lebih besar dan lengkap. Rata-rata pendapatan per harinya Rp. 150.000. Setelah melakukan pinjaman UEP, pendapatannya pun tetap berkisar Rp. 150.000, tidak mengalami

[36] Ani, *Wawancara*, Senori, 24 Februari 2020.
[37] Hartatik, *Wawancara*, Senori, 20 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peningkatan. Karena banyaknya pesaing, persaingan harga tidak sehat, dan toko lain yang lebih lengkap[38].

(26) Selain itu, Bapak Sukron juga berpendapat serupa dengan Ibu Khoridatul. Ia mengatakan banyaknya pesaing baru yang berinovasi dalam menciptakan jajanan-jajanan baru. Bapak Sukron adalah pedagang pentol keliling yang pendapatan per harinya rata-rata Rp. 400.000, karena banyaknya pedagang baru dengan jenis jananan baru maka pentol tidak lagi begitu diminati. Ia bahkan sudah pernah mencoba beralih jualan martabak, namun hasilnya tidak sesuai harapan. Pendapatannya dibilang malah menurun kian hari[39].

(27) Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ibu Muslimatus ketika proses wawancara, ia mengatakan usaha berjualan kue basah hasilnya tidak menentu karena pendapatan bergantung pada ada atau tidaknya pesanan atas dagangannya. Dana pinjaman UEP digunakan Ibu Muslimatus untuk membeli beberapa alat pembuatan kue seperti mixer dan oven yang lebih besar, dengan espektasi akan banyak pesanan yang masuk. Oleh karena tidak banyak yang memesan kue di Ibu Muslimatus, semakin berjalannya waktu sisa uang pinjaman digunakan untuk kebutuhan konsumtif sehari-hari. Jadi pendapatan yang diperoleh Ibu Muslimatus tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh adanya pinjaman UEP tersebut. Pendapatan yang diperoleh tetap pada Rp. 200.000 tiap kali ada pesanan[40].

---

[38] Khoridatul, *Wawancara*, Senori, 20 Februari 2020.
[39] Sukron, *Wawancara*, Senori, 21 Februari 2020.
[40] Muslimatus, *Wawancara*, Senori, 01 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(28) Hasil wawancara dengan Ibu Wartini, ia menuturkan bahwa dana pinjaman UEP yang ia peroleh tidak digunakan sebagaimana mestinya[41].

(29) Bapak Sumaji juga mengemukakan hal serupa dengan Ibu Wartini, dana pinjaman UEP sebagian ia gunakan untuk biaya sekolah anaknya[42].

(30) Wawancara dengan Ibu Kanipah juga mendapatkan hasil yang sama dengan kedua informan diatas, dana tersebut ia gunakan untuk biaya rumah sakit suaminya. Dikarenakan dana tersebut tidak digunakan pada mestinya, hal tersebut tentunya memberikan dampak terhadap kemampuan membayar cicilan. Ibu Kanipah mengatakan untuk membayar uang cicilan mengalami kesulitan karena tidak ada penambahan produk di tokonya sehingga pendapatannya juga menurun karena tidak bisa kulakan[43].

Sebagian ada juga yang menyalahgunakan dana pinjaman UEP tersebut untuk kebutuhan konsumtif, yang tentu saja hal itu tidak dibenarkan dan tidak memberikan manfaat berkelanjutan. Ketika dana tersebut habis, maka tidak ada lagi perputaran uang yang produktif dari pinjaman tersebut, dan sudah pasti tidak memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatannya.

---

[41] Wartini, *Wawancara*, Senori, 22 Februari 2020.
[42] Sumaji, *Wawancara*, Senori, 01 Februari 2020.
[43] Kanipah, *Wawancara*, Senori, 22 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pinjaman Usaha Ekonomi Produktif Perspektif *Maṣlaḥah*

a. Wawancara dengan Kepala Desa Sendang[44]

Hasil wawancara dengan Bapak Mohibin selaku Kepala Desa Sendang, ia menyatakan seharusnya secara logika dengan adanya pinjaman UEP tersebut bisa membatu masyarakat miskin dalam melangsungkan bahkan membawa kepada kondisi yang lebih baik. Pelaksanaan pinjaman UEP bertujuan menyelamatkan masyarakat dari belenggu kemiskinan, yang mana pinjaman tersebut juga tidak melanggar hukum. Terlebih malah di apresiasi oleh pemerintah desa. Untuk usaha yang dijalankan oleh peminjam-peminjamnya ia kurang tahu pasti, namun sejauh yang ia tahu tidak ditemukan jenis usaha yang melanggar hukum dan agama.

Terkait keluhan ataupun beban atas adanya pelaksanaan pinjaman UEP tersebut, ia mengatakan sejauh ini tidak ada yang mengeluhkan keberatan ke pihak desa. Menurut Bapak Mohibin, hal itu lebih terkait langsung antara pihak UPK dengan masyarakatnya. Jadi keluhan semacam itu tidak perlu diceritakan ke pihak desa, desa sifatnya hanya mendukung dan mensukseskan program tersebut demi membantu masyarakat menuju kesejahteraan ekonomi. Sepengetahuannya, diantara kelompok yang meminta persetujuan desa dalam penyerahan proposal pinjaman, mereka mengatakan persyaratan pinjaman lebih mudah dan proses pencairan cukup cepat jika dibandingkan dengan pelaksanaan pinjaman di bank.

[44] Mohibin, *Wawancara*, Senori, 21 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wawancara dengan Ketua Kelompok

(1) Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mutmainah sebagai ketua kelompok peminjam Hidayatul Ummah, ia mengatakan adanya pinjaman UEP sangat membantu kepada anggotanya. Karena target dari pinjaman UEP adalah masyarakat miskin, maka benar adanya bahwa pelaksanaannya sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup masyarakat miskin. Lebih lanjut, ia mengatakan jika tidak adanya pinjaman UEP, bisa jadi masyarakat miskin yang membutuhkan modal usaha tidak lagi sanggup meneruskan usahanya tersebut. Karena akses pinjaman di bank cukup sulit bagi kalangan menengah ke bawah. Sedangkan kelangsungan usaha mereka sangat penting untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selain itu, dengan adanya monitoring dari pihak UPK dapat menciptakan rasa saling percaya dan transparan terkait pendapatan para peminjam.

Ibu Mutmainah mengatakan lebih lanjut dengan berkembangnya usaha maka juga bisa tercipta kesejahteraan ekonomi dengan adanya peningkatan pendapatan, pendidikan anak yang jauh lebih baik, dan kondisi rumah yang lebih bagus. Sedangkan untuk anggota kelompoknya, ia mengatakan secara umum bisa meringankan beban atas kebutuhan modal usaha mereka, selain itu juga ada peningkatan pendapatan dan komoditi yang di jual pun bertambah. Jenis usaha yang dijalankan bermacam macam seperti toko sembako, pedagang sayur keliling, pertanian dan lainnya. Ibu Mutmainah menuturkan jenis usaha yang dijalankan *Insyaallah* tidak ada yang melanggar hukum dan agama,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena pada dasarnya kelompok ini adalah kelompok pengajian jadi sedikit banyak para anggota tahu mana yang halah mana yang haram[45].

(2) Ibu Mawadah selaku ketua kelompok peminjam Tani Makmur juga menyatakan hal yang serupa. Ibu Mawadah mengatakan dengan adanya pinjaman UEP dapat membantu ia dalam mengembangkan usahanya memproduksi tahu dan tempe. Yangmana dari pendapatan usahanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sebelumnya ia hanya memiliki satu rak kecil untuk tempat fermentasi tempe, sehingga jumlah produksinya terbatas dan pendapatannya pun pas-pasan. Dengan adanya pinjaman UEP, ia memanfaatkan untuk membeli 3 rak dan beberapa wadah panci/ wajan besar. Ibu Mutmainah sangat mengapresiasi pelaksanaan pinjaman UEP yangmana secara umum dapat memberikan kemaslahatan bagi peminjamnya.

Terkait anggotanya, ia menuturkan tidak tahu secara detail penggunaan dana pinjaman UEP. Namun, dalam pengajuannya mereka menuliskan untuk keperluan modal usaha seperti jual gorengan, untuk pembelian pupuk pertanian, dan toko sembako. Menurut Ibu Mawadah pinjaman UEP memberikan manfaat dan tidak membebani peminjamnya, pasalnya mereka selalu bayar tepat waktu dan setelahnya ikut tergabung dalam pengajuan pinjaman lagi.

Pinjaman UEP membawa kepada arah yang lebih baik, ia menyatakan setelah pencairan pinjaman UEP, ia dapat mengembangkan

[45] Mutmainah, *Wawancara*, Senori, 31 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usahanya sehingga pendapatannya juga mengalami kenaikan serta adanya peningkatan terkait kondisi rumah, transportasi, dan pendidikan anaknya.

c. Wawancara dengan Anggota Kelompok

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mutikah, Ibu Pasih, dan Bapak Suud mereka mengatakan bahwa pinjaman UEP sepenuhnya memberikan sebuah kebaikan bagi masyarakat miskin. Pelaksanaan pinjaman UEP mulai dari persyaratan yang tidak mempersulit calon peminjam, adanya sosialisasi, monitoring dan sistem cicilan yang tidak memberatkan, proses tersebut menurut mereka memberikan sebuah kemaslahatan[46]. Terlepas dari penggunaan dana pinjaman tersebut.

Menurut Ibu Mutikah, jika tidak ada pinjaman UEP kemungkinan ia akan merantau, meninggalkan suami dan anaknya di rumah. Karena suaminya menggarap sawah, namun lahan sawahnya tidak begitu luas dan hasil panen tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga secara berkelanjutan. Maka perlu suatu usaha untuk menambah pendapatan demi pemenuhan kebutuhan hidup. Lebih lanjut ia menceritakan anak pertamanya yang putus sekolah karena ia tak sanggup membayar uang SPP dan pembelian buku. Ibu Mutikah bersyukur anak keduanya tidak bernasib sama seperti anak sulungnya, berkat pinjaman UEP pendapatan atas toko sembakonya semakin meningkat[47]. Secara tidak langsung, pelaksanaan pinjaman UEP bisa menyelamatkan jiwa, akal, harta, dan keturunan.

[46] Mutikah, Pasih, dan Suud, *Wawancara*, Senori, 01 Februari 2020.
[47] Mutikah, *Wawancara*, Senori, 01 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernyataan serupa juga disampaikan Bapak Mahfud Ridwan, Ibu Narju Nikmah, Ibu Umyaroh, Ibu Siti Fatimah, Ibu Aslihatul, dan Ibu Siti Aminah, menurutya pinjaman UEP bisa mendatangkan suatu kemaslahatan yangmana pelaksanaannya dalam membantu masyarakat miskin membawa hasil yang baik. Terlebih usaha yang mereka jalankan juga tidak melanggar hukum dan agama. Mereka mengatakan sangat membutuhkan pinjaman tersebut demi untuk keberlangsungan hidup, karena mereka dipersulit untuk akses pinjaman di lembaga lain. Maka UPK hadir dengan memberikan pinjaman UEP ibarat penolong bagi masyarakat miskin.

Berbeda dengan pernyataan para informan diatas, Ibu Muslimatus, Hartatik, Wartini, Sumiati, Kanipah, Bapak Sukron dan Sumaji memberikan pernyataan bahwa pelaksanaan pinjaman UEP dalam pengembalian dana terkait jasa pinjaman mereka tidak setuju dan dinilai memberatkan. Menurut mereka, proyeksi keuntungan yang dibuat oleh pihak UPK tidak sesuai dengan realitasnya. Keuntungan yang mereka peroleh tidak sesuai dengan proyeksi tersebut, karena keuntungan mereka tidak mencapai pada tingkat proyeksi yang dibuat oleh UPK. Hal itu dikarenakan mereka mengalami kendala dalam pengelolaan dana UEP tersebut, oleh karena itu mereka merasa terbebani atas pengembalian dananya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Pelaksanaan Pinjaman Usaha Ekonomi Produktif pada Peningkatan Pendapatan Peminjam

Pinjaman adalah sejumlah dana yang dipinjamkan oleh suatu lemabaga keunaga dan debitur wajib mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu melalui angsuran pembayaran berupa pokok pinjaman ditambah dengan bunga pinjaman. Kegiatan pemberian pinjaman dapat dilakukan ketika memenuhi lima unsur yang disebutkan dalam bab 2. Pinjaman UEP dilakukan atas dasar kepercayaan antara pihak UPK dengan calon peminjamnya. Pinjaman dilakukan dengan adanya kesepakatan antara dua belah pihak yang di implementasikan dengan penandatanganan perjanjian dalam kegiatan MAD. Jangka waktu dan biaya jasa juga ditetapkan ketika MAD. Dari pinjaman tersebut juga muncul risiko tidak tertagih atau kredit macet yang terjadi di UPK. Dilihat dari kegiatannya, pinjaman UEP masuk dalam kategori pinjaman produktif jangka pendek.

Pelaksanaan pinjaman UEP di UPK Kecamatan Senori dijalankan sesuai SOP yang berlaku. Keseluruhan kegiatan di UPK mengacu pada SOP sebagai patokan dalam menjalankannya. SOP tersebut dibuat atas persetujuan dari Badan Pengawas UPK (BP-UPK) dan juga Camat Kecamatan Senori. SOP tersebut memuat pedoman dalam melaksanakan kegiatan, mulai dari tujuan kegiatan, sasaran, persyaratan, alur pinjaman, adanya pembinaan dan pengawasan, penentuan jasa pinjaman, jangka waktu, penetapan peminjam dan daftar tunggu, dan penanganan masalah. Tujuan dari dibuatnya SOP untuk manajemen kegiatan, dibuatnya SOP pelaksanaan pinjaman UEP juga untuk memanajemen pinjaman UEP tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manajemen pinjaman adalah pengelolaan pinjaman yang baik mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian pinjaman, analisis pemberian pinjaman sampai kepada pengendalian dan pengawasan kredit macet[1]. Manajemn pinjaman sesuai teori yang dikemukakan pada bab 2, menyebutkan bahwa manajemen memuat dari adanya perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian pinjaman, analisis pemberian pinjaman, dan teknik penyelesaian kredit macet.

Perencanaan jumlah kredit pada pelaksanaan pinjaman UEP dilakukan ketika calon peminjam mengajukan proposal pinjaman, perencanaan tersebut dilakukan dengan mengacu pada tujuan calon peminjam memutuskan untuk pinjam, jangka waktu calon peminjam bergabung dengan kelompoknya, dan tingkat kemampuan bayar di tahun-tahun sebelumnya. Penentuan suku bunga atau dalam UPK dikenal dengan istilah biaya jasa, biaya jasa ini ditetapkan ketika kegiatan MAD dengan melihat daripada hasil proyeksi keuntungan yang sebelumnya telah dibuat oleh UPK. Porsi cicilan terhitung sama setiap bulannya antara jumlah uang pokok dan biaya jasa, oleh karenanya digongkan pada sistem bunga flat.

Prosedur atau alur pinjaman pada pelaksanaan pinjaman UEP dimulai dari pengajuan proposal pinjaman oleh calon peminjam yangmana proposal tersebut sudah harus di tandatangani oleh kepala desa. Selanjutnya proposal akan di evaluasi oleh pihak UPK, ketika data sudah lengkap maka akan di proses untuk survei, sedangkan data yang kurang lengkap akan dikembalikan kepada kelompok untuk selanjutnya bisa dilengkapi. Data yang dinilai sudah lengkap selanjutnya akan dilanjutkan pada proses survei yang dilakukan oleh tim verifikasi. Tim verifikasi

[1] Kasmir, *Manajemen Perbankan*...,71-85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan mentukan siapa yang layak dan tidak layak untuk mendapatkan pinajman UEP. Hasil penentuan tersebut akan dipertanggungjawabkan ketika MAD, di kegiatan MAD tersebut akan diputuskan kelompok yang berhak menerima pinjaman, jumlah pinjaman, dan biaya jasa. Setelah diputuskan oleh BKAD, maka UPK akan menyiapkan dana yang akan dicairkan kepada calon peminjam dan membuat jadwal pencairan.

Analisis pemberian pinjaman, dalam pelaksanaan pinjaman UEP ini tidak mengacu pada prinsip 6C dan 7P yang dijelaskan pada teori di bab 2. Analisis yang dilakukan oleh tim verifikasi tidak meliputi *collateral* karena dalam pinjaman UEP tidak ada syarat agunan. Analisis yang dilakukan oleh tim verifikasi berkutat pada keadaan usaha yang sedang atau yang akan dijalankan, mata pencaharian, lama bergabung dengan kelompok, dan riwayat pinjaman di UPK. Sedangkan analisis 7P juga tidak dilakukan oleh tim verifikasi. Tim verifikasi hanya memastikan tujuan penggunaan dana pinjaman UEP untuk kebutuhan produktif dan jenis usaha yang sedang atau akan dijalankan.

Teknik penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh pihak UPK yang utama adalah dengan surat peringatan, disamping pemberian surat peringatan, UPK juga menerapkan cara seperti *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Jika cara-cara tersebut tidak juga membuahkan hasil yang baik, maka UPK menggunakan cara dengan berkunjung langsung ke tempat tinggal yang bersangkutan dengan bantuan Babinkamtibmas dan Babinsa, yang sebelumnya sudah dimusyawarahkan dengan Camat Kecamatan Senori.

Secara umum pelaksanaan pinjaman UEP berbeda dengan teori manajemen pinjaman yang dikemukakan Kasmir yang telah dibahas pada bab 2. Pelaksanaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pinjaman UEP menyasar masyarakat miskin, oleh karenanya proses analisis yang dilakukan tidak begitu mendalam mempertimbangkan keadaan ekonomi mereka. Karena pada dasarnya keadaan ekonomi peminjamnya berada pada tingkat menengah kebawah. Akibatnya banyak terjadi kredit macet dan penyalahgunaan penggunaan dana, ketika wawancara dengan Ketua UPK ia menuturkan jika memang sudah benar-benar tidak memungkinkan untuk bayar cicilan pihak UPK lebih memilih mengikhlaskan kekurangan tersebut daripada harus memproses secara hukum, karena orientasi dari pinjaman UEP ini memang untuk menolong masyarakat miskin.

UPK memiliki cara tersendiri untuk mengontrol para peminjam tersebut melalui adanya monitoring yang dilakukan setiap bulan, namun cara tersebut tidak begitu efektif karena kurangnya SDM, sehingga kegiatan monitoring tidak dilakukan secara menyeluruh ke setiap peminjamnya. Terkait tidak adanya persyaratan untuk agunan, UPK mengganti dengan pengurangan dana sebesar 10% dari jumlah dana yang dicairkan. Dana tersebut diorientasikan sebagai dana simpanan oleh peminjam, yangmana ketika terjadi kredit macet akan digunakan untuk melunasi kekurangan cicilan.

Tujuan dari pelaksanaan pinjaman UEP salahsatunya adalah untuk meningkatkan pendapatan peminjamnya. Pada dasarnya, pendapatan adalah hasil dari sebuah pekerjaan, produktivitas serta kemampuan dan keterampilan dari kegiatan yang dijalani yang bisa dikenal dengan penghasilan. Secara umum, pendapatan merupakan suatu hasil yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga dari berusaha atau bekerja[2].

[2] Nazir, Analisis Determinan..., 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pinjaman Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di UPK Kecamatan Senori memiliki peran penting dalam membantu masyarakat miskin untuk pemenuhan kebutuhan akan modal usaha. Pelaksanaan pinjaman UEP dapat meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, jika dana pinjaman tersebut digunakan sebagaimana mestinya. Pada prakteknya, terdapat beberapa penyalahgunaan dana pinjaman tersebut yang tujuan awal diberikannya pinjaman tersebut untuk hal permodalan usaha/ kegiatan produktif yang berkelanjutan, dana pinjaman UEP yang seharusnya dimanfaatkan untuk modal usaha malah digunakan untuk kegiatan konsumtif, yang tentu saja hal itu tidak dibenarkan. Hasil penelitian mendapati bahwa masalah tersebut bisa terjadi karena bebreapa hal antara lain:

1. Adanya kebutuhan lain yang lebih mendesak
2. Kurangnya manajemen usaha
3. Kurangnya pendampingan dan monitoring dari pihak UPK terkait keberlangsungan usaha
4. Kurangnya sosialisasi terkait bagaimana cara mengelola dana pinjaman UEP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada sebagian anggota kelompok peminjam UEP di Desa Sendang, bebarapa diantara mereka terbukti mampu merintis dan mengembangkan usaha serta penggunaan dana pinjaman tersebut benar adanya digunakan untuk kegiatan produktif sebagaimana yang diharapkan oleh pihak UPK. Disamping itu, mereka juga menyatakan adanya peningkatan pendapatan setelah melakukan pinjaman UEP tersebut. Namun, ada beberapa informan yang menyatakan adanya pinjaman UEP tersebut tidak mempengaruhi tingkat pendapatannya secara signifikan. Hasil wawancara peneliti kepada anggota pinjaman UEP dapat disajikan pada tabel berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.1

Perbedaan Pendapatan Sebelum dan Sesudah Melakukan Pinjaman UEP

No	Nama	Jumlah Pinjaman	Pendapatan Sebelum Pinjam	Pendapatan Setelah Pinjam	(%)	Keterangan
1	Narju Nikmah	Rp. 2.000.000	0	Rp. 1.000.000	1000%	Pedagang Lauk
2	Munawar	Rp. 5.000.000	Rp. 500.000	Rp. 800.000	37,5%	Pedagang Bakso
3	Siti Aminah	Rp. 5.000.000	Rp. 150.000	Rp. 350.000	133,5%	Warung Kopi
4	Musringah	Rp. 2.000.000	0	Rp. 850.000	850%	Pedagang Sayur Keliling
5	Mukarromah	Rp. 4.000.000	Rp. 100.000	Rp. 900.000	800%	Pedagang Sayur Keliling
6	Maryam	Rp. 2.000.000	0	Rp. 800.000	800%	Pedagang Sayur Keliling
7	Kartini	Rp. 3.000.000	Rp. 170.000	Rp. 250.000	44,5%	Pedagang Sembako
8	Sukarti	Rp. 3.000.000	Rp. 150.000	Rp. 250.000	67%	Pedagang Sembako
9	Nadhiroh	Rp. 4.000.000	Rp. 175.000	Rp. 500.000	186%	Pedagang Es Teller
10	Mawadah	Rp. 5.000.000	Rp. 300.000	Rp. 600.000	100%	Produksi Tahu Tempe
11	Umyaroh	Rp. 2.000.000	0	Rp. 900.000	900%	Pedagang Nasi dan Mie Goreng
12	Kasminah	Rp. 2.000.000	0	Rp. 700.000	700%	Pedagang Sayur
13	Rasbingah	Rp. 5.000.000	Rp. 150.000	Rp. 1.000.000	567%	Pedagang Makan/ Warteg
14	Laili M.	Rp. 2.000 000	0	Rp. 450.000	450%	Pedagang Lontong
15	Agus	Rp. 2.000.000	Rp. 150.000	Rp. 450.000	200%	Pedagang Kopi/ Warkop
16	Nur Asih	Rp. 2.000.000	Rp. 250.000	Rp. 450.000	80%	Pedagang Kue Basah
17	Siti Fatimah	Rp. 2.000.000	0	Rp. 300.000	300%	Pedagang Jajan SD/TPA
18	Aslihatul	Rp. 5.000.000	Rp.3.500.000	Rp. 5.500.000	57,2%	Peternak Lele
19	Mukhayanto	Rp. 3.000.000	-	-	-	Penyalahgunaan Dana
20	Sumiati	Rp. 3.000.000	-	-	-	Penyalahgunaan Dana
21	Ahmad Naim	Rp. 5.000.000	Rp. 250.000	Rp. 400.000	37,5%	Produksi Kerupuk
22	Ropin	Rp. 5.000.000	Rp. 300.000	Rp. 600.000	100%	Pedagang Bawang
23	Ani	Rp. 5.000.000	Rp. 150.000	Rp. 500.000	233,5%	Pedagang Sembako dan Obat Pertanian
24	Hartatik	Rp. 4.000.000	Rp. 250.000	Rp. 130.000	-48%	Pedagang Barang Online
25	Khoridatul	Rp. 2.000.000	Rp. 150.000	Rp. 150.000	0%	Pedagang Sembako
26	Sukron	Rp. 2.000.000	Rp. 400.000	Rp. 400.000	0%	Pedagang Pentol
27	Muslimatus	Rp. 3.000.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000	0%	Pedagang Roti
28	Wartini	Rp. 5.000.000	0	0	0%	Penyalahgunaan Dana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Nama	Jumlah Pinjaman	Pendapatan Sebelum Pinjam	Pendapatan Setelah Pinjam	(%)	Keterangan
29	Sumaji	Rp. 3.000.000	0	0	0%	Penyalahgunaan Dana
30	Kanipah	Rp. 3.000.000	0	0	0%	Penyalahgunaan Dana

Sumber: Data Diolah 2020

Data diatas memperlihatkan bahwa, terdapat 9 orang yang tidak mengalami peningkatan pendapatan. Lima orang disebabkan karena mereka melakukan penyalahgunaan atas manfaat dana pinjaman UEP, sedangkan empat orang lainnya disebabkan masalah dalam penjualan barang dagangannya. Sebagaimana BAB II menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan seorang pedagang sektor kecil diantaranya adalah, modal, lama usaha, jam kerja, dan tingkat pendidikan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan peminjam dana UEP Desa Sendang di UPK Kecamatan Senori adalah:

a. Dana Pinjaman UEP

Berdasarkan hasil wawancara dengan 30 informan, 25 diantaranya mengatakan bahwa pendapatannya dipengaruhi oleh adanya pinjaman modal yang dalam penelitian ini adalah pinjaman UEP. Dengan adanya pinjaman UEP tersebut, mereka bisa menambah jumlah komoditi yang kemudian akan menarik konsumen dan bertambahnya jumlah konsumen. Dari peningkatan jumlah konsumen tersebut akan memberikan pemasukan/ pendapatan yang kian meningkat pula. Disamping itu, dana pinjaman digunakan untuk membuka usaha baru, yang mulanya mereka tidak dapat menghasilkan uang sendiri/ pendapatan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hingga pada akhirnya bisa memperbaiki keadaan ekonomi mereka melalui usaha yang dijalankan.

Jika pemanfaatan dana pinjaman UEP digunakan untuk kebutuhan produktif pengembangan usaha, maka kemungkinan adanya peningkatan pendapatan semakin besar. Namun, terdapat 5 informan yang mengatakan bahwa tingkat pendapatannya tidak melulu dipengaruhi oleh adanya pinjaman UEP tersebut, mereka mengatakan yang lebih utama di pengaruhi oleh jam kerja dan keterampilan. Terlebih jika dana tersebut disalahgunakan untuk kegiatan lain tentunya tidak memberikan pengaruh pada pendapatannya.

b. Ketersediaan Barang

Berdasarkan hasil wawancara dengan 30 informan menyatakan bahwa jumlah dan ragam barang yang diperjualbelikan mempengaruhi tingkat pendapatan mereka. Dengan memperbanyak barang dagangan, menurut mereka akan menarik para konsumen. Berdasarkan penuturan Ibu Khoridatul, hal utama yang mempengaruhi pendapatannya adalah ketersediaan barang dagangan. Pinjaman UEP yang digunakan untuk penambahan volume dan ragam barang dagangan akan menambah pendapatan mereka.

Menurut Ibu Muslimatus, ia mengatakan bahwa pendapatannya dipengaruhi oleh permintaan konsumen akan barang yang diperdagangkan. Sebagai penjual roti dan kue basah, pendapatannya tergantung pada ada atau tidaknya konsumen yang memesan roti kepadanya. Lebih lanjut ia menuturkan meskipun dana pinjaman UEP telah dicairkan, jika tidak ada pesanan maka tidak ada pemasukan pula yang pada akhirnya dana pinjaman UEP terpakai untuk kebutuhan konsumtif sehari-hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jam Kerja

Jam kerja atau dalam hal ini adalah berapa lama toko tersebut buka. Hasil wawancara dengan 30 informan, mereka secara tidak langsung menyatakan bahwa tingkat pendapatannya dipengaruhi oleh jam kerja. Mereka menuturkan karena banyak pesaing dari jenis barang yang diperdagangkan sama, maka harus rela buka toko/ berjualan lebih lama untuk dapat melayani konsumen. Terlebih untuk toko sembako, Ibu Kartini, Sukarti dan Khoridatul mengatakan mereka rela di siang hari harus tetap buka toko demi antisipasi kekecewaan konsumen yang datang di siang hari jika pada akhirnya toko mereka tutup dan beralih ke pesaing. Semakin lama jam kerja maka semakin banyak peluang pembeli yang datang. Selain itu, pedagang sayur keliling juga harus menjajakan dagangannya lebih pagi dari pesaing lain.

d. Keterampilan

Hasil wawancara dengan Bapak Sukron seorang pedagang pentol, ia mengatakan pendapatannya tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh adanya modal. Namun lebih pada aspek keterampilan, karena di era modern banyak pedagang yang menjual makanan-makanan baru yang unik sehingga menarik konsumen untuk membelinya. Sedangkan ia tidak memiliki keahlian lebih untuk berinovasi dengan produk-produk baru. Ibu Hartatik juga mengatakan bahwa keterampilan juga dapat mempengaruhi tingkat pendapatannya. Sebagai seorang pedagang online, ia mengatakan keterampilan penting memasarkan produknya. Marketing yang baik dan tepat sasaran akan membawa hasil yang memuaskan pula.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Banyaknya Pesaing

Hasil penelitian yang dilakukan, banyaknya pesaing juga mempengaruhi tingkat pendapatan seorang pedagang sektor kecil. Banyaknya pedagang dengan jenis komoditi yang sama akan membuat konsumen lebih pemilih, terutama dalam hal harga. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Mukarromah dan Bapak Munawar, mereka mengatakan penentuan harga jual barang sangat penting untuk bisa bersaing dengan pedagang lainnya. Namun, penetapan harga jual juga tidak semata-mata harus paling murah diantara yang lain. Hal itu akan menimbulkan kesenjangan dalam berdagang yang berakibat pada ketidakharmonisan hubungan antar pedagang, terlebih biasanya pesaing pedagang sektor kecil adalah tetangga.

Tingkat pendidikan pada penelitian ini tidak begitu berpengaruh pada peningkatan pendapatan masyarakat miskin (peminjam dana UEP), karena mayoritas peminjamnya berasal dari kalangan ekonomi rendah. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua kelompok peminjam Hidayatul Ummah dan Nangka 2, tingkat pendidikan para peminjam mayoritas hanya sampai pada jenjang SD dan SMP. Peminjam dana UEP diperuntukan bagi masyarakat miskin yangmana masih kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, oleh karena itu, mereka hanya mampu menempuh pendidikan sampai di jenjang SD dan SMP. Ibu Mutmainah sebagai ketua kelompok peminjam Hidayatul Ummah menuturkan lebih lanjut bahwa tingkat pendidikan tidak mempengaruhi pendapatan mereka. Karena pedagang sektor kecil tidak begitu mementingkan pengetahuan tentang teori bisnis, mereka lebih membutuhkan adanya modal dan pengalaman/ keterampilan untuk bisa tetap mengembangkan usaha mereka demi memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pinjaman Usaha Ekonomi Produktif Perspektif *Maṣlaḥah*

1. Kemaslahatan secara Umum

Tujuan dari pelaksanaan pinjaman UEP pada dasarnya sangat baik dengan memberdayakan masyarakat miskin melalui pinjaman tersebut, masyarakat miskin dapat meringankan beban masalah permodalan mereka dengan harapan bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup, meningkatnya pendapatan, dan penciptaan lapangan pekerjaan. Dalam pemenuhan kebutuhan hidup, masyarakat yang dalam kategori ekonomi ke bawah senantiasa membutuhkan bantuan untuk menghindari terjadinya keterpurukan dan keputusasaan. UPK hadir dengan harapan dapat menyelamatkan masyarakat dari belenggu kemiskinan melalui pinjaman UEP yang digadang dapat meningkatkan pendapatan peminjamnya secara berkelanjutan.

Suatu kegiatan dilakukan tentunya dengan harapan tercapainya sebuah maslahat. Sama halnya dengan pelaksanaan pinjaman UEP di UPK Kecamatan Senori, pinjaman tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membantu masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang berorientasi terciptanya sebuah kemaslahatan. Namun, disamping adanya maslahat dari pelaksanaan pinjaman UEP tersebut juga dijumpai sebuah penyalahgunaan dan keluhan atas pelaksanaannya. Pelaksanaan pinjaman UEP memang memberikan dampak baik pada aspek pendapatan peminjamnya, namun selain peningkatan pendapatan juga terdapat beberapa tolok ukur ekonomi sebagai penentu pinjaman UEP tersebut membawa kemaslahatan di bidang ekonomi atau tidak.

Menurut Asy-Syatibi *maṣlaḥah* dan mafsadah tidak ada yang murni, ukurannya ditentukan oleh kekuatan yang mendominasi dan banyaknya aktifitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dikerjakan. Jika *maṣlaḥah* lebih banyak dan kuat, maka disebut *maṣlaḥah*, sebaliknya jika mafsadahnya yang lebih banyak dan dominan, maka masuklah pada sesuatu yang mafsadah[3]. Berdasarakan syarat-syarat yang dikemukakan oleh Asy-Syatibi, pelaksanaan pinjaman UEP secara akal dan pertimbangan dari sisi syariah bisa tergolong kegiatan yang membawa *maṣlaḥah*. Syarat diatas menyatakan bahwa kemaslahatan dapat diaplikasikan dalam bidang sosial dan ekonomi, hal tersebut relevan dengan kegiatan yang dijalankan UPK yang beroperasi di bidang sosial dan ekonomi. Syarat ketiga yaitu tentang pemeliharaan terhadap aspek *dharuriyyah* (kebutuhan primer), *hajiyyah* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyah* (kebutuhan tersier), pelaksanaan pinjaman UEP berada pada tingkatan *hajiyyah*.

Pinjaman UEP secara tidak langsung membantu keberlangsungan hidup para peminjamnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketidakberadaan pinjaman UEP tidak mengakibatkan terhadap sesuatu yang darurat/ merusak, dalam artian ketika pinjaman UEP tersebut tidak dilaksanakan lagi, masyarakat Desa Sendang masih bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang lain. Pasalnya, usaha yang mereka jalankan bukan satu-satunya sumber penghasilan mereka. Namun keberadaan pinjaman UEP dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan masyarakat miskin Desa Sendang. Jika keberadaannya tidak diperhatikan, masyarakat miskin akan mengalami kesulitan, kendati tidak merugikan kemaslahatan secara umum.

[3] Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi* Usul...,20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Maṣlaḥah* dalam Lingkup Kesejahteraan Ekonomi

Maslahat itu sendiri adalah sesuatu yang identik dengan manfaat, keuntungan, kenikmatan, kegembiraan, atau segala upaya yang dapat mendatangkan hal tersebut. Pada tataran substansi, ulama mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai suatu kondisi dari upaya untuk mendatangkan sesuatu yang berdampak positif (manfaat) serta menghindarkan diri dari hal-hal yang berdimensi negatif (mudharat)[4]. *Maṣlaḥah* dalam bidang ekonomi juga memiliki artian yang serupa dengan teori *maṣlaḥah* itu sendiri, yaitu sebuah manfaat positif. Artinya untuk mencapai *maṣlaḥah* ekonomi harus ada tolok ukur tersendiri di bidang ekonomi pula.

Kesejahteraan ekonomi dari sisi Islam bertujuan untuk terciptanya sebuah kemaslahatan yang mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara. Dalam *maṣlaḥah* tidak terlepas dari sebuah kesejahteraan, karena *maṣlaḥah* adalah kesejahteraan itu sendiri. Dalam artian pinjaman UEP untuk bisa mencapai sebuah kemaslahatan di bidang ekonomi, maka pinjaman UEP tersebut harus membawa peminjamnya kepada tingkat kesejahteraan ekonomi. Tolok ukur kesejahteraan ekonomi menurut Biro Pusat Statistik (BPS) ada delapan macam.

1. Tingkat pendapatan, dari hasil wawancara dengan beberapa informan, mereka menyatakan mengalami peningkatan pendapatan setelah adanya pinjaman UEP. Presentase peningkatan pendapatan seperti pada Tabel 4.1 menunjukkan adanya peningkatan yang cukup tinggi.

[4] Amir Machmud, *Ekonomi Islam*...,20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pengeluaran rumah tangga, pengeluaran disini termasuk pada kegiatan usaha, yaitu kulakan. Informan mengatakan setelah pencairan dana UEP, mereka menggunakan dana tersebut untuk membuka ataupun mengembangkan usaha mereka. Selain itu juga dilihat pengeluaran konsumtifnya, dengan bertambahnya tingkat pendapatan yang diperoleh, tentunya keinginan untuk membeli sesuatu juga bertambah seperti untuk pembelian alat transportasi, perbaikan rumah, dan pembelian kebutuhan lainnya. Penggunaan dana pinjaman UEP telah disebutkan pada Tabel 4.1, terdapat 5 informan yang memanfaatkan dana tersebut untuk kebutuhan konsumtif. Selain daripada itu pengeluaran digunakan untuk kebutuhan berdagang.
3. Tingkat pendidikan keluarga, informan mengatakan pendidikan bisa ditempuh ketika kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi.
4. Tingkat kesehatan, hasil observasi yang peneliti lakukan terlihat pada kartu informasi keluarga sehat yang ditempel oleh pihak Puskesmas Kecamatan Senori di dinding rumah bagian depan menunjukkan mayoritas dari informan dikategorikan pada keluarga sehat, namun juga terdapat beberapa yang berada pada kategori pra-sehat.
5. Kondisi tempat tinggal
6. Fasilitas tempat tinggal, pekarangan cukup luas dan ada sebagian yang hampir tidak memiliki pekarangan; alat elektronik untuk TV mayoritas memiliki, ada sebagian yang terlihat juga memiliki kulkas; penerangan menggunakan lampu listrik; kendaraan yang dimiliki hanya sepeda motor, bahan bakar memasak mayoritas menggunakan gas elpigi, namun sebagian masih dengan kayu bakar; sumber air dari sanyo; air minum mayoritas masih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil air rebusan; fasilitas mandi cuci kakus dengan kamar mandi pribadi di rumah.

Tabel 4.2
Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan, Kondisi Tempat Tinggal, dan Fasilitas Tempat Tinggal Peminjam

No	Nama	Tingkat Pendidikan	Tingkat Kesehatan	Kondisi Tempat Tinggal	Fasilitas Tempat Tinggal
1	Narju Nikmah	SD, Suami: SD, Anak: SD, SMP, SMP	Sehat	Atap: Genteng Dinding: Kayu Lantai: Tanah	TV, Sepeda motor
2	Munawar	SD, Istri: SD, Anak: SD, SMP	Sehat	Atap: Genteng Dinding: Tembok Lantai: Plester	TV, Sepeda motor
3	Siti Aminah	SD, Suami: SD, Anak: SD, SD, SMP, SMP	Sehat	Atap: Genteng Dinding: Kayu Lantai: Tanah	TV, Sepeda motor
4	Musringah	SD, Suami: SD, Anak: SD, SD, SD	Sehat	Atap: Genteng Dinding: Kayu Lantai: Tanah	TV, Sepeda motor, Kulkas
5	Mukarromah	SD, Suami: SMP, Anak: SMP, SMP, SMA	Sehat	Atap: Genteng Dinding: Tembok Lantai: Plester	TV, Sepeda motor, Kulkas
6	Maryam	SMP, Suami: SD, Anak: SD, SD, SMA	Sehat	Atap: Genteng Dinding: Tembok Lantai: Lantai	TV, Sepeda motor, Kulkas
7	Kartini	SMP, Suami: SD, Anak: SD, SMA	Sehat	Atap: Genteng Dinding: Kayu Lantai: Tanah	TV, Sepeda motor
8	Sukarti	SD, Suami: SMP, Anak: SD, SMP, SMP	Sehat	Atap: Genteng Dinding: Kayu Lantai: Tanah	TV, Sepeda motor
9	Nadhiroh	SMP, Suami: SMP, Anak: SMP, SMP	Sehat	Atap: Genteng Dinding: Tembok Lantai: Lantai	TV, Sepeda motor, Kulkas
10	Mawadah	SD, Suami: SD, Anak: SMP	Sehat	Atap: Genteng Dinding: Tembok Lantai: Ubin	TV, Sepeda motor, Kulkas
11	Umyaroh	SD, Suami: SD, Anak: SMP, SMP	Sehat	Atap: Genteng Dinding: Tembok Lantai: Ubin	TV, Sepeda motor, Kulkas
12	Kasminah	SD, Suami: SD, Anak: SD, SD, SD, SMP, SMP	Sehat	Atap: Genteng Dinding: Kayu Lantai: Tanah	TV, Sepeda motor, Kulkas
13	Rasbingah	SMP, Suami: SMP, Anak: SMP, SMP	Sehat	Atap: Genteng Dinding: Kayu Lantai: Tanah	TV, Sepeda motor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Nama	Tingkat Pendidikan	Tingkat Kesehatan	Kondisi Tempat Tinggal	Fasilitas Tempat Tinggal
14	Laili M.	SMP, Suami: SD, Anak: SMP, SMP, SMA	Pra Sehat	Atap: Genteng Dinding: Kayu Lantai: Tanah	TV, Sepeda motor
15	Agus	SD, Istri: SD, Anak: SD, SMP, SMP	Sehat	Atap: Genteng Dinding: Kayu Lantai: Tanah	TV, Sepeda motor
16	Nur Asih	SMP, Suami: SD, Anak: SD, SD, SMA	Sehat	Atap: Genteng Dinding: Tembok Lantai: Ubin	TV, Sepeda motor, Kulkas
17	Siti Fatimah	SMP, Suami: SMP, Anak: SD, SD, SMP, SMA	Sehat	Atap: Genteng Dinding: Kayu Lantai: Tanah	TV, Sepeda motor, Kulkas
18	Aslihatul	SD, Suami: SD, Anak: SD, SD, SD, SMP, SMP	Sehat	Atap: Genteng Dinding: Tembok Lantai: Ubin	TV, Sepeda motor
19	Mukhayanto	SD, Istri: SMP, Anak: SD, SMP, SMP, SMP	Sehat	Atap: Genteng Dinding: Kayu Lantai: Ubin	TV, Sepeda motor, Kulkas
20	Sumiati	SMP, Suami: SD, Anak: SMP, SMP, SMA	Sehat	Atap: Genteng Dinding: Kayu Lantai: Plester	TV, Sepeda motor, Kulkas
21	Ahmad Naim	SD, Istri: SMP, Anak: SD, SMP, SMP	Pra Sehat	Atap: Genteng Dinding: Kayu Lantai: Tanah	TV, Sepeda motor
22	Ropin	SD, Istri: SD, Anak: SD, SMP	Sehat	Atap: Genteng Dinding: Kayu Lantai: Tanah	TV, Sepeda motor
23	Ani	SMP, Suami: SMP, Anak: SMP, SMP	Pra Sehat	Atap: Genteng Dinding: Kayu Lantai: Plester	TV, Sepeda motor, Kulkas
24	Hartatik	SMP, Suami: SD, Anak: SD, SD, SMA	Sehat	Atap: Genteng Dinding: Tembok Lantai: Ubin	TV, Sepeda motor
25	Khoridatul	SD, Suami: SD, Anak: SMP, SMP, SMA	Sehat	Atap: Genteng Dinding: Kayu Lantai: Tanah	TV, Sepeda motor
26	Sukron	SD, Istri: SD, Anak: SD, SMP, SMP	Sehat	Atap: Genteng Dinding: Kayu Lantai: Ubin	TV, Sepeda motor
27	Muslimatus	SMP, Suami: SD, Anak: SD, SD, SMP	Sehat	Atap: Genteng Dinding: Kayu Lantai: Ubin	TV, Sepeda motor
28	Wartini	SD, Suami: SD, Anak: SD, SD, SMP, SMP	Sehat	Atap: Genteng Dinding: Kayu Lantai: Keramik	TV, Sepeda motor
29	Sumaji	SD, Istri: SD, Anak: SD, SD, SMP, SMP	Sehat	Atap: Genteng Dinding: Kayu Lantai: Plester	TV, Sepeda motor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Nama	Tingkat Pendidikan	Tingkat Kesehatan	Kondisi Tempat Tinggal	Fasilitas Tempat Tinggal
30	Kanipah	SD, Suami: SD, Anak: SD, SD, SMP, SMP, SMA	Pra Sehat	Atap: Genteng Dinding: Kayu Lantai: Tanah	TV, Sepeda motor

Sumber: Data Diolah 2020

7. Kemudahan mendapatkan layanan kesehatan, untuk jarak ke rumah sakit cukup jauh yaitu berkisar 65 km, namun untuk jarak ke puskesmas cukup dekat, toko obat juga cukup dekat karena mayoritas peminjam lebih sering membeli obat di toko-toko kelontong dekat rumah.
8. Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi, ongkos kendaraan per hari hanya dibutuhkan sekitar 1 liter berkisar harga Rp. 10.000; kendaraan sepeda motor hampir seluruh peminjam sudah memiliki.

Pinjaman UEP dapat mempengaruhi kedelapan tolok ukur tersebut, dengan adanya pinjaman UEP, pendapatan piminjamnya mengalami peningkatan yang secara bersamaan juga meningkatkan pengeluaran mereka. Tingkat pendidikan anak juga lebih baik karena pemenuhan kebutuhan sehari-hari bisa tercukupi dengan menjalankan usaha. Kondisi dan fasilitas tempat tinggal bisa dipengaruhi pinjaman UEP, uang dari hasil usaha sebagian mereka gunakan untuk biaya perbaikan dan pembelian fasilitas rumah. Tingkat kesehatan sedikit juga bisa dipengruhi dengan adanya pinjaman UEP, seperti yang disampaikan Ibu Kanipah yang menggunakan dana pinjaman UEP untuk biaya rumah sakit suaminya. Fasilitas kendaraan juga bisa dipengaruhi oleh adanya pinjaman UEP, seperti kepemilikan atas sepeda motor, salah satu informan mengatakan sebagian dana pinjaman UEP digunakan untuk tambahan biaya pembelian sepeda motor *rengkek* (sepeda motor untuk ke sawah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Implementasi *maṣlaḥah* dalam kegiatan ekonomi seperti adanya mekanisme pasar, pembentukan lembaga hisbah/ regulator pasar, zakat produktif, dan pendirian lembaga keuangan syariah. Kegiatan tersebut bisa tercipta dengan pertimbangan melihat kondisi dan permasalahan ekonomi kontemporer. Prinsip *maṣlaḥah* menjadi acuan dan patokan penting dalam bidang ekonomi, karena terbatasnya *nash-nash* yang menyinggung masalah ekonomi kontemporer. Dengan adanya kegiatan ekonomi yang mengacu pada kemaslahatan akan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Seperti halnya zakat produktif yangmana zakat bisa dikelola secara produktif, sehingga manfaat atas zakat tersebut bisa dirasakan secara berkelanjutan.

Asy-Syatibi mengatakan bahwa penerapan *maṣlaḥah* dan mafsadat tidak ada yang murni, ukurannya ditentukan oleh banyakanya kekuatan yang mendominasi. Kegiatan-kegiatan ekonomi diatas dilaksanakan di era kontemporer ini karena dapat membawa kepada kemaslahatan, walaupun muncul sebuah mafasadat ditengah-tengah *maṣlaḥah*. Kendati demikian ukurannya lebih kecil sehingga *maṣlaḥah*-lah yang lebih mendominasi. Begitupun dengan pinjaman UEP, pelaksanaannya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi peminjamnya. Pinjaman UEP dapat mempengaruhi kedelapan tolok ukur kesejahteraan ekonomi yangmana kesejahteraan ekonomi merupakan tujuan dari *maṣlaḥah* sendiri di bidang ekonomi. Oleh karenanya pinjaman UEP menciptakan sebuah kemaslahatan, disamping adanya *maṣlaḥah,* pinjaman UEP juga membawa mafsadat terkait adanya penyalahgunaan pemanfaatan dana yang dilakukan oleh peminjam. Namun, permasalahan tersebut tidak menutupi tingkat *maṣlaḥah* yang lebih mendominasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat dijabarkan mengenai Analisis Pelaksanaan Pinjaman Usaha Ekonomi Produktif pada Peningkatan Pendapatan Peminjam Perspektif *maṣlaḥah* Studi pada Pinjaman UEP Desa Sendang di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, dalam analisis ini telah dijabarkan bagaimana pelaksanaan pinjaman usaha ekonomi produktif, tingkat pendapatan, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan peminjam, dan tinjauan *maṣlaḥah*, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Unit Pengelola Kegiatan memiliki beberapa pedoman tersendiri terkait persyaratan, cara analisis, dan teknik mengatasi kredit macet yang tercantum di SOP tentang pelaksanaan pinjaman UEP. Terbukti bahwa pinjaman UEP mampu meningkatkan pendapatan peminjamnya selama dana tersebut digunakan untuk kebutuhan produkif pengembangan usaha. Beberapa peminjam yang tidak mengalami peningkatan pendapatan disebabkan karena dana pinjaman UEP disalahgunakan untuk kebutuhan konsumtif dan kurangnya manajemen dalam usaha mereka.
2. Kemaslahatan pada pinjaman UEP terlihat lebih dominan daripada mafsadat yang ditimbulkan. Pinjaman UEP tergolong pada jenis *maṣlaḥah hajiyyah* yangmana seandainya pinjaman tersebut ditiadakan, tidak akan mematikan atau merusak kehidupan itu sendiri. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan masyarakat. Dalam lingkup ekonomi, pinjaman UEP dapat membawa peminjam menuju kesejahteraan ekonomi yang selanjutnya dari terciptanya kesejahteraan ekonomi tersebut akan mendatangkan sebuah *maṣlaḥah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah:

1. Pengurus Unit Kegiatan sebaiknya lebih detail dalam menentukan siapa saja yang layak untuk mendapat pinjaman tersebut. Diperlukan seleksi yang lebih ketat mengenai tujuan dan keperuntukkannya yang lebih jelas untuk keperluan produktif, sehingga kesejahteraan dan kondisi ekonomi yang dialami piminjam tidak hanya bertahan di posisi yang sama atau bahkan menurun. Selain itu perlu diberikan sosialisasi dan edukasi tentang manajemen usaha bagi calon peminjam agar setidaknya mereka memiliki bekal untuk mengahdapi masalah lain yang terjadi ketika menjalankan usaha.
2. Anggota peminjam dana UEP sebaiknya mempergunakan dana pinjaman UEP sebagaimana mestinya yang telah disepakati sebelumnya untuk kebutuhan produktif dan lebih terbuka terkait kendala yang dialami dalam menjalankan usahanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Zaenal. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Tanpa Agunan di UPK PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang". Skripsi--Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

Agustian. "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Seberang Ulu Plaju". *Jurnal Ilmiah MBIA*, Vol. 14, No. 3, 2015.

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Alwi. *Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Salemba Empat, 2005.

Ardiyos. *Kamus Besar Akuntansi*. Jakarta: Citra Harta Prima, 2004.

Arsyad, Lyncolin. *Ekonomi Mikro*. Jakarta: Gemapress, 1999.

Artianto, Ewsaningrat. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Gladag Langen Bogan Surakarta" (Skripsi--Universitas Sebelas Maret, Solo, 2010.

Asy-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Usul Asy-Syar'iyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 1997.

Asy-Syatibi. *Al-I'tisam*. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.

Brenda, Moniaga. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Seberang Ulu Plaju". *Jurnal Ilmiah MBIA*, Vol. 4, No. 3, 2015.

Christian, Ferry. "Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban pada PT. Bank Perkreditan Rakyar Prisma Dana Manado". *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 13 No. 2, 2018.

Edwin, Mustafa. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2007.

Ghony, M. Djunaidi & Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.

Fahlefi, Rizal. *Implementasi Maṣlaḥah dalam Kegiatan Ekonomi Syariah*, Juris Volume 14, Nomor 2 Desember 2015.

Hakimah. "Praktik Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada PNPM MP di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik (Studi Analisis Peraturan PNPM MP dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)". Skripsi – Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Hanum, Nurlaila. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Sektor Usaha Kecil di Kota Kuala Simpang". *Jurnal Samudra Ekonomika*, Vol. 1, No. 1, 2017.

Hikmat, Harry. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Huda, Nurul. *Ekonomika Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2009.

Kasmir. *Kewirausahaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Kasmir. *Manajemen Perbankan*, Cetakan Kedua. Jakarta: PT Raja Grafindo Prasada, 2011.

Kholil, Munawar. *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1995.

Machmud, Amir. *Ekonomi Islam untuk Dunia yang Lebih Baik*. Jakarta: Salemba Empat, 2017.

Mantra, Ida Bagoes. *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Moloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.

Munawaroh, Munjiati dan Hasnah Rimiyati. "Evaluasi Perkembangan Usaha Masyarakat Penerima Pinjaman Dana Bergulir Melalui UPK-SPP, di Wilayah Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul". *Jurnal Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. Vol 9, No 1, 2018.

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial.* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.

Nazir. Analisis Determinan Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Aceh Utara, (Thesis – Universitas Sumatera Utara, 2010.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.

Nurdiana, Dina. "Dampak Signifikansi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Tambahan Modal Dana UEP (Usaha Ekonomi Produktif) pada Peningkatan Keberdayaan Usaha Mikro Perempuan di Kecamatan Kota Sumenep". *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. Vol. 4, No. 2, ISSN 2303-341X, 2016.

Nuzulia, Atina. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Pedesaan (Studi Kasus di UPK Amanah Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang)". Skripsi – Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.

Pahruroji. "Analisis Efektivitas Pinjaman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan terhadap Peningkatan Pendapatan Peminjam di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pinjaman PNPM Mandiri Pedesaan Desa Sinar Saudara Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus)". Skripsi – Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intanlampung, 2016.

Poerwono, Hadi. *Tata Personalia*. Jakarta: Djambatan, 1991.

Probowo, Aan. "Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-Book)". *Jurnal Ilmu Perpustakaan*. Vol. 3, No. 2, 2013.

Qorib, Ahmad. "Penerapan *Maṣlaḥah Mursalah* dalam Ekonomi Islam". *Analytica Islamica*. Vol. 5, No. 1, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

S, Munawir. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty, 2002.

Sakti, Ali. *Analisis Teoritis Ekonomi Islam, Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*. Jakarta: Aqsa Publishing, 2007.

Sholikin, Rohmadani. "Tinjauan Yuridis Unit Pengelola Kegiatan sebagai Agen Pemerintah dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Susukan)". Skripsi - Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

Soekanto, Soerjono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,1982.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Suparmoko, M. *Pengantar Teori Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE, 2010.

Syarifudin, Amin. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Perjanjian pada Pemberian Dana Kredit Usaha Ekonomi Produktif (Studi Kasus pada Unit Pengelola Kegiatan PNPM Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen)". Manuskrip – Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.

Tika, Papundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Wijaya, Hari. *Teknik Penulisan Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Hangar Creator, 2008.

Wirawan, I Made Oka. "Efektivitas Program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam Upaya Peningkatan Kesempatan Kerja dan Pendapatan Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Kerambitan". *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 5, No. 1, 2015.

Zaim, Zaidi. *Restorasi Zakat Sebuah Keniscayaan: Teladan dari Kaum Muslim Cape Town Afrika Selatan*. Jakarta: Forum Zakat, 2006.

Dokumen Biro Pusat Statistik Tahun 2000.

Dokumen Laporan Pertanggungjawaban BKAD UPK Kecamatan Senori Tahun 2019.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: FEBI UIN Sunan Ampel, 2017.

SOP BKAD UPK Kecamatan Senori.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id